

Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Kalimantan Timur

333
T
S

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983/1984

SEJARAH

PERLAWANAN TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Tim Penulis

Koordinator : Drs. Tarib Koestarta

1. Drs. Fidy Finandar
2. M. Noor ARS
3. Hasjim Ahmad
4. Drs. Sjahrial Hanan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL

1983/1984

Penyunting :

1. Drs. R.Z. Leirissa MA
2. Sutrisno Kutoyo
3. Drs. M. Soenyata Kartadarmadja.

**Gambar kulit oleh :
Iswar Ks.**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1983
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 1301119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di berbagai wilayah di negara kita.

Bagi bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya kembali pada tanggal 17 Agustus 1945, sesudah berjuang melalui berbagai perlawanan fisik, maka sejarah perlawanan itu sendiri menempati kedudukan utama dan mempunyai nilai tinggi. Sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, telah terjadi perlawanan, besar maupun kecil, sebagai reaksi terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Pengalaman-pengalaman itu merupakan modal yang berharga dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah melakukan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan itu sebagai kejadian sejarah yang akan memberikan kesadaran akan jiwa kepahlawanan, terutama pada generasi muda, mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juni 1983
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PENELITIAN	6
C. RUANG LINGKUP	6
D. PROSEDUR DAN PERTANGGUNG- AN JAWAB PENELITIAN	7
BAB II PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJA- AN PASIR TERHADAP IMPERIALIS- ME KOLONIALISME TAHUN 1800 – 1907	8
A. IDENTIFIKASI	8
B. PERTUMBUHAN KERAJAAN PA- SIR	9
C. MASUKNYA KEKUASAAN BE- LANDA DI PASIR	9
D. LATAR BELAKANG PERLAWAN- AN	14
E. SEBAB-SEBAB PERLAWANAN ...	15
F. PERLAWANAN PANGERAN PANJI	28
G. AKIBAT PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJAAN PASIR TERHADAP IMPERIALISME KOLONIALISME TAHUN 1800 – 1907	34
BAB III PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJA- AN KUTAI TERHADAP IMPERIALIS- ME KOLONIALISME	36
A. IDENTIFIKASI	36

B. PERTUMBUHAN KERAJAAN KUTAI	37
C. KERAJAAN KUTAI KERTANEGARA	41
D. HUBUNGAN DENGAN KERAJAAN-KERAJAAN DI NUSANTARA .	45
E. PERLAWANAN TERHADAP IMPERIALISME KOLONIALISME	46
F. PERLAWANAN SEJAK TAHUN 1800	150
1. Perlawanan pada tahun 1825	50
2. Perlawanan terhadap Inggris tahun 1844	51
3. Perlawanan terhadap Belanda tahun 1844	54
4. Akibat Perlawanan Rakyat di Kerajaan Kutai terhadap Imperialisme Kolonialisme	61
G. PERLAWANAN RAKYAT SAMARINDA	61
1. Lahir dan Berkembangnya Kota Samarinda	61
2. Perlawanan Dalam Abad ke-XIX .	69
3. Perlawanan pada jaman Pergerakan Rakyat	71
a. Sarikat Islam	72
b. Muhammadiyah	72
c. Nahdlatul Ulama	73
d. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI)	73
e. Partai Indonesia Raya (Parindra)	74
f. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)	75

	Halaman
g. Penyadar	76
h. Gabungan Politik Indonesia (Gapi)	76
i. Majelis Islam ala Indonesia (MIAI)	77
4. Perlawanan pada jaman Jepang	78
BAB IV PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJAAN BERAU TERHADAP IMPERIALISME KOLONIALISME TAHUN 1673 – 1945	80
A. IDENTIFIKASI	80
B. PERTUMBUHAN KERAJAAN BE- RAU	82
1. Jaman Sriwijaya	82
2. Jaman Majapahit	83
3. Hubungan dengan Kerajaan Wajo, Kutai dan Sulu Pilipina Selatan ..	86
a. Hubungan dengan kerajaan Wajo Sulawesi Selatan	86
b. Hubungan dengan Kutai	86
c. Hubungan dengan kerajaan Sulu Filipina Selatan	87
4. Sosial, Budaya dan Ekonomi	87
C. KEDATANGAN IMPERIALISME DAN KOLONIALISME SPANYOL DAN BELANDA	88
1. Kedatangan Spanyol di Berau ...	88
2. Kedatangan VOC di Kerajaan Berau	88
D. JALANNYA PERLWANAN TER- HADAP HINDIA BELANDA (1800 – 1942)	88

E. PERLAWANAN H.A. KUNING GUNUNG TABUR	96
F. PERLAWANAN ABAD KE-XX (1900 – 1945)	98
1. Perlawanan Terhadap Pemerintah Kolonial Belanda	98
G. PERLAWANAN TERHADAP PEMERINTAH JEPANG (1942 –1945)	104
1. Perlawanan di Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Talisayan	109
2. Perlawanan di Kampung Talassan Kecamatan Gunung Tabur	109
3. Akhir masa Jepang	110
BAB V . P E N U T U P	112
DAFTAR BACAAN	113
LAMPIRAN	115

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kalimantan Timur terletak antara 119 B.T., 114 B.T. dan antara 4,2° L.U., 2,3 L.S. berbatasan dengan sebelah Utara Malaysia Timur Sebelah Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, sebelah Timur Selat Makasar dan sebelah Barat Malaysia Timur

Luas daerah Kalimantan Timur 211.440 km, dibagi 4 daerah Kabupaten dan daerah Kotamadya serta 69 Kecamatan dan 1057 Kampung, yakni Kotamadya Samarinda dan Kotamadya Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Berau, Kabupaten Pasir, Kabupaten Bulungan. Pembagian wilayah administrasi ini tidaklah dapat dilepaskan dengan sejarah pada masa lampau daerah ini.

Kotamadya Samarinda dibangun sejak tahun 1668 oleh orang-orang Bugis yang bermigrasi ke Kalimantan Timur di bawah pimpinan Pua Ade La Mohang Daeng Mangkona.¹ Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahan Belanda, Afdeeling Oost Borneo dan akhirnya menjadi ibu kota Propinsi Kalimantan Timur.

Adapun Kotamadya Balikpapan semula merupakan kampung yang kemudian menjadi kota minyak sejak tahun 1898 setelah di daerah ini ditemukan sumber minyak. Mula-mula dikelola oleh *Nederlandsche Industrie Handelmaatschappij* (Amsterdam) yang pada tahun 1907 diambil alih oleh B.P.M. (*Bataafsche Petroleum Maatschappij*).

1. I. Kirana Ranreng Daeng Risompa, *Catatan Sejarah Ringkas Kedatangan Orang Bugis di Samarinda*, Koleksi Mohd. Noor, ex Asisten Perw. P dan K Prop. Kaltim di Samarinda.

Pada tahun 1959, daerah istimewa Kutai dipecah menjadi tiga daerah yakni Kabupaten Kutai Kotapraja Samarinda dan Kotapraja Balikpapan, sesuai dengan Undang-undang No. 27 tahun 1959.

Pada sekitar abad ke-15 di daerah Kalimantan Timur telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, yakni Kesultanan Kutai, Kesultanan Pasir, Kesultanan Berau dan Kesultanan Bulungan. Pertumbuhan kerajaan-kerajaan ini tak dapat dipisahkan dengan tiga peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah tanah air kita dalam abad ke-15 dan 16.

Pertama adalah jatuhnya kerajaan Mojopahit, sebuah kerajaan yang bercorak Hindu yang telah pernah mempersatukan wilayah Indonesia dengan kekuatan armada lautnya. Tapi setelah kerajaan ini runtuh, maka daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan berusaha melepaskan diri.

Kedua perkembangan agama Islam yang berpusat di tepi pantai. Agama ini berkembang perlahan-lahan tapi mantap disiarkan lewat perdagangan. Kemakmuran yang dinikmati oleh penduduk kota-kota pantai dari hasil perdagangan yang sangat berkembang pesat menimbulkan tendensi untuk melepaskan diri dari penguasa di pedalaman yang hidup dari pertanian.

Ketiga makin meningkatnya permintaan rempah-rempah Indonesia oleh dunia Internasional dan Eropah khususnya. Daerah Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil lada, garu, beras, rotan, teripang, sarang burung, getah perca, kayu. Besi dan batu bara yang penting bagi perindustrian sudah diketemukan pada tahun 1851 di pulau Tarakan, yang diperlukan dalam dunia perdagangan.

Keadaan alam daerah Kalimantan Timur belum banyak mengalami perubahan alamnya yang masih diliputi oleh hutan belantara yang lebat dengan berbagai jenis kayunya, rawa-rawa serta sungai yang lebar-lebar dan panjang bermuara ke laut. Di Kalimantan Timur sungai-sungai besar merupakan pusat-

pusat kegiatan manusia sejak dahulu sampai sekarang, seperti di Kabupaten Kutai dengan sungai Mahakam di mana terletak kota Samarinda, Tenggarong dan Muara Kaman yang merupakan pusat-pusat pemerintahan sejak jaman dahulu. Sungai Berau yang mengalir di daerah Kabupaten Berau di mana terletak kota Tanjung Redeb dahulu pusat kerajaan Sambaliung dan Gunung Tabur. Kota Tanjung Selor ibu kota Kabupaten Bulungan sekarang terletak di sungai Kayan. Sungai Kayan yang mengalir di Kabupaten Bulungan, terletak kota Tanjung Palas sebagai pusat pemerintahan kerajaan Bulungan dahulu dan Tanjung Selor sebagai ibukota afdeeling Bulungan dan Berau, dan sekarang menjadi ibukota Kabupaten. Pasir Belengkong ibukota kerajaan Pasir dahulu dan Tanah Grogot sebagai ibukota Kabupaten Pasir sekarang terletak di tepi sungai Kandilo. Sungai bagi penduduk daerah Kalimantan Timur sangat penting kerna merupakan satu-satunya prasarana hubungan yang menghubungkan satu tempat dan tempat yang lainnya.

Penduduk Kalimantan Timur dapat diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli adalah Melayu Muda (Deutro Melayu) seperti suku Tidung, Bulungan, Berau, Kutai dan Pasir dan suku yang mendiami daerah pedalaman adalah suku Dayak, antara lain suku Benuaq, Basao, Bukat dan lain-lain. Adapun yang digolongkan ke dalam penduduk pendatang yang sering mereka sebut orang Haloq adalah suku Banjar, Bugis, Jawa, Menado, Madura dan lain sebagainya.

Agama yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Timur umumnya adalah agama Islam. Penganut-penganutnya mendiami daerah sepanjang pantai dan muara-muara sungai. Penganut-penganut agama suku pada umumnya adalah penduduk asli yang mendiami daerah pedalaman, yang kini banyak pula yang memeluk agama baru tersebut. Kalimantan Timur menjadi sangat penting pada abad ke-19 setelah diketemukannya tambang batubara dan minyak. Suatu peristiwa yang me-

maksa Belanda untuk merubah politiknya terhadap daerah Kalimantan Timur adalah ketika James Brooke seorang avonturur Inggeris berhasil mendapatkan daerah Serawak pada tahun 1840 dengan sewa 20.000 dollar setahun dari Sultan Berunei, yang kemudian diakuinya sebagai miliknya sendiri. Kemudian Sultan Berunei pada tahun 1846 menyerahkan Labuhan kepada pemerintah Inggeris.² Walaupun pemerintah Belanda mengadakan protes tetapi tidak berhasil seperti halnya ketika Inggeris menduduki Singapura.

Untuk mencegah terulangnya peristiwa seperti itu, maka pemerintah Belanda mengadakan perluasan wilayah ke arah Kalimantan Timur yang masih berdaulat dan merdeka. Walaupun sejak tahun 1817 antara Sultan Banjarmasin dan Belanda telah ada perjanjian yang antara lain menyebutkan bahwa wilayah Pasir, Kutai, Berau diserahkan pada Belanda, perjanjian itu hanyalah merupakan tanda formal bahwa pemerintah Hindia Belanda berkuasa atas wilayah Kalimantan Selatan, sampai ke Kalimantan Timur. Akan tetapi kedudukan serta kekuatan Belanda belum berarti apa-apa sehingga Residen hanyalah merupakan lambang politik belaka. Kemudian keadaan ini berubah dengan adanya usaha negara-negara Eropah lainnya (Inggeris) untuk mencari hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur yang memaksa pemerintah Belanda untuk merubah politiknya ke arah penguasaan langsung atas wilayah Kalimantan Timur. Agar bisa mencegah meluasnya imperialisme lainnya ke wilayah Kalimantan Timur, maka pada tahun 1846 pemerintah Hindia Belanda mengangkat Asisten Residen yang pertama H. Van Wall di Palaran. Kemudian pada tahun 1896 Samarinda dijadikan pusat pemerintahan *Afdeeling Oost Borneo*.³ Kemudian Belanda mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja di daerah Kalimantan Timur agar mengakui kekuasaan Belanda atas wilayahnya,

2. Krom J.S., *Memorie Overgave en overname*, Ktr Controleur Tanjongredeb, 1940

3. DR. J. Eisen berger, *Kroniek Zuider en Ooster afdeeling van Borneo*, Banjarmasin, 1936, hal 3.

memberikan izin kepada Belanda untuk membuka tambang batubara, serta memberikan konsesi pertambangan minyak tanah misalnya di Sanga-sanga pada tahun 1889.

Hubungan antara pemerintah Belanda dengan kerajaan di daerah Kalimantan Timur diatur dalam Surat Perjanjian yang disebut Perjanjian Pendek (*Korte Verklaring* dan Perjanjian Panjang (*Lange Verklaring*). Bagian Selatan dan Timur pulau Kalimantan diperintah oleh seorang Komisaris berkedudukan di Banjarmasin, dibantu seorang Residen, Asisten Residen dan Kontrolir, jabatan-jabatan mana kadang-kadang diduduki oleh opsir militer.

Di Kalimantan Timur, Residen Banjarmasin dibantu oleh dua orang Asisten Residen yang berkedudukan di Samarinda dan di Tanjung Selor.

Afdeeling Samarinda terbagi atas 3 onderafdeeling yaitu:

1. Onderafdeeling Kutai ibukotanya Tenggarong
2. Onderafdeeling Hulu Mahakam ibukotanya Long Iram
3. Onderafdeeling Pasir ibukotanya Tanah Grogot.

Afdeeling Bulungan dan Berau ibukotanya Tanjung Selor, terbagi atas 3 onderafdeeling yaitu:

- a. Onderafdeeling Berau ibukotanya Tanjung Redeb
- b. Onderafdeeling Bulungan dan Tidung ibukotanya Tanjung Selor
- c. Onderafdeeling Apo Kayan ibukotanya Long Nawang.

Daerah pedalaman yang didiami oleh suku-suku Dayak, pemerintahannya tetap dikepalai oleh kepala-kepala suku menurut petunjuk yang diberikan pegawai sipil militer.

Perlawanan rakyat Kalimantan Timur terhadap kolonialisme dan imperialisme dimulai sejak VOC, yang berusaha untuk memonopoli perdagangan pada pertengahan abad ke-17. Agama Islam menjadi anutan bagi kerajaan-kerajaan Kalimantan Timur dan merupakan dasar-dasar aturan kerajaan juga

menentukan dalam perlawanan terhadap Belanda, dan merupakan kekuatan penggerak masa rakyat untuk menentang penjajahan yang dianggap sebagai orang kafir.

Prinsip perlawanan sebenarnya adalah semangat kemerdekaan terhadap belenggu penjajahan. Semangat itu tetap subur hingga perang kemerdekaan.

B. TUJUAN PENELITIAN

Buku-buku sejarah Indonesia yang diajarkan baik di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat perguruan tinggi belum meliputi sejarah seluruh nusantara. Sejarah perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme di daerah Kalimantan Timur ini bertujuan mengungkapkan aktivitas bangsa Indonesia di daerah itu melawan penjajahan. Kegiatan ini dilakukan proyek dalam rangka inventarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional.

C. RUANG LINGKUP

Imperialisme adalah suatu paham suatu cita-cita untuk menaklukkan negeri lain guna kebesaran, kemakmuran dan kekayaan bangsa penakluk dengan tidak mengindahkan nasib bangsa yang ditaklukkannya. Imperialisme bukanlah orang atau bangsa, akan tetapi paham dan cita-cita yang dianut oleh sesuatu bangsa, yang selalu berusaha untuk menaklukkan dan memeras bangsa dan negeri lain. Menurut J.S. Barstra dalam bukunya yang berjudul *Geschiedenis van het Moderne Imperialisme 1880 – 1890*, imperialisme adalah suatu keinginan akan menambah-nambah tanah-tanah jajahan untuk memperbaiki perniagaan, kerajinan dan perusahaan serta menambah kekayaan dalam negeri sendiri, seperti kelihatan dengan jelas dalam tahun 1880 – 1906 dari sikap politik negeri-negeri yang terbilang besar di tanah Eropah. Salah satu pendukung paham itu adalah bangsa Belanda. Politik penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia yang ada di kawasan Kalimantan Timur dari abad

ke-17 sampai 1942. Kemudian akan ditampilkan sekilas lanjutan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan Jepang.

D. PROSEDUR DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode meneliti sumber-sumber bacaan, arsip-arsip serta dokumen yang ada di daerah ini yang dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang kejadian pada masa lampau. Di samping itu juga digunakan metode wawancara terhadap orang-orang yang berpengetahuan tentang sejarah di Kalimantan Timur atau keturunan dari raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan di Kalimantan Timur.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Pasir untuk sejarah Kerajaan Pasir, Kabupaten Kutai untuk daerah kerajaan Kutai yang berpusat di kota Tenggarong, daerah tingkat II Kabupaten Berau bekas kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung serta daerah tingkat II Kabupaten Bulungan bekas kerajaan Tidung dan Bulungan yang berpusat di Tanjung Selor. Dua Kotamadya masing-masing Samarinda dan Balikpapan yang merupakan pusat kegiatan pada masa penjajahan sebagai ibukota Karesidenan dan Balikpapan sebagai kota minyak, juga diteliti.

Sejak bulan Juli telah disusun rencana dan pengumpulan bahan-bahan informasi yang ada di kota Samarinda. Kemudian pada bulan September diadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi-informasi yang belum lengkap terutama di daerah Berau dan Bulungan. Pada bulan Oktober dilakukanlah penulisan sampai bulan Nopember.

BAB II

PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJAAN PASIR TERHADAP IMPERIALISME KOLONIALISME TAHUN 1800 – 1907

A. IDENTIFIKASI

Kerajaan Pasir pada jaman dahulu terletak di daerah Tingkat II Kabupaten Pasir. Daerah ini terletak pada bagian selatan Propinsi Kalimantan Timur, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai, sebelah timur dengan selat Makasar, sebelah selatan dengan Kabupaten Kota Baru, dan sebelah barat dengan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Daerah ini meliputi 9 Kecamatan dan 92 kampung dan luas wilayahnya 20.040 km². Wilayah ini pada umumnya terdiri dari dataran tinggi. Pada dataran tinggi terdapat gunung-gunung seperti Gunung Lumut (1.233 m), Gunung Serampakan (1.300 m), sedang dataran rendah terdapat pada kiri kanan sungai dan daerah pantai. Sungai yang mengalir di daerah ini antara lain sungai Kandilo, Telake, Kuaro, Sungai Apad. Peranan sungai bagi daerah ini penting sekali bagi perhubungan antara daerah pedalaman dan pantai. Daerah tingkat II Pasir adalah daerah yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Propinsi Kalimantan Selatan, hubungan dengan dunia luar lewat laut melalui pelabuhan tanah Grogot yang terletak di tepi sungai Kandilo.

Penduduk suku bangsa Pasir membangun desa di tempat yang sulit dicapai oleh orang. Umumnya rumah-rumah dan perkampungan mereka bangun di tengah-tengah hutan atau di tepi sungai. Kebiasaan hidup mereka berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain sesuai dengan pola perladangannya.

Suku Pasir terkenal dalam hal membuat keris beracun dan membuat racun yang sangat berbahaya.

B. PERTUMBUHAN KERAJAAN PASIR

Setelah kerajaan Majapahit berkurang kewibawaannya, di daerah-daerah berdirilah kerajaan-kerajaan kecil, seperti Kutai, Berau dan Pasir, yang menurut Dr. J. Eisenberger dalam *Kroniek Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*, terjadi pada awal abad XV. Menurut cerita rakyat raja yang pertama memerintah di kerajaan Pasir, adalah seorang wanita bernama Putri Petung. Pusat pemerintahan berkedudukan di Sadorangas di hulu sungai Kandilo. Pada tahun 1569 Agama Islam mulai berkembang di kerajaan Sadorangas dan akhirnya menjadi Agama Kerajaan Ratu Aji Putri Petung digantikan oleh putranya Aji Mas Pati Indra (1600 – 1624), lalu Pangeran Anom Singa Maulana (1644 – 1707). Pada masa pemerintahan Sultan Muhamad, Kerajaan Pasir selalu mendapat gangguan dari rakyat suku Dusun di hulu sungai. Perintah untuk memagar dan membuat kubu pertahanan dilaksanakan rakyat dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebelum pagar dan kubu itu selesai, kerajaan Pasir diserang oleh rakyat Hulu Dusun dan Hulu Sungai. Rumah-rumah dibakar, harta dirampas, termasuk Keraton Pasir yang indah juga turut terbakar.

Karena itu, Sultan Aji Muhamad beserta rakyatnya berpindah ke hilir sungai Kandilo, mencari tempat yang aman yaitu di Pasir Benua dekat Pasir Belengkong. Di tempat inilah Sultan Aji Muhamad membuat perkampungan baru, mendirikan istana dan perumahan rakyat secara bergotong royong. Mulai pada waktu itulah Pasir menjadi tempat kedudukan pemerintahan Sultan-sultan Pasir.

C. MASUKNYA KEKUASAAN BELANDA DI PASIR

Pada akhir bulan Desember 1816 datanglah ekspedisi Belanda ke Banjarmasin di bawah pimpinan J. Van Boeckholdz, yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda atas wilayah ini setelah konvensi London. Pada tanggal 1 Januari 1817 ditanda tangani suatu perjanjian yang meliputi 32 pasal antara Sultan Banjarmasin dengan J. Van Boeckholdz pasal

atau artikel 5 menentukan bahwa Pasir, Kutai dan Berau diserahkan pada Belanda.⁴ Atas dasar perjanjian itu maka Belanda merasa berkuasa atas wilayah kerajaan Pasir. Kerajaan Pasir pada masa itu diperintah oleh Sultan Sepuh putra Sultan Aji Muhamad. Pada waktu Sultan Sepuh memerintah, pertanian yang berupa perladangan dan perkebunan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga rakyat Pasir, tiada kekurangan makanan. Meskipun demikian Sultan Sepuh merasa susah, karena Kerajaan Pasir telah beberapa tahun lamanya tunduk kepada kerajaan Banjarmasin. Setiap tahun rakyat harus mengantar upeti kepada Sultan Banjarmasin, berupa sepuluh kati emas urai disertai dengan beras dan padi. Karena itulah Sultan Sepuh berkunjung ke Martapura menghadap Sultan Banjar, meminta supaya upeti sepuluh kati emas itu dikurangi, karena pembayaran itu dirasa terlampau berat, disebabkan sungai Kandilo kerap kali banjir, sehingga pendulangan emas tidak dapat dilakukan.

Sultan memohon agar upeti itu dapat dibayar sekaligus dan kerajaan Pasir dibebaskan dari kekuasaan kerajaan Banjar. Dalam perundingan ini Sultan Sepuh mengemukakan beberapa alasan yang diterima Sultan Banjar, yaitu upeti kerajaan Pasir dapat ditebus sekaligus dengan setengah pikul (50 kati) emas urai dan pembayaran itu harus dilunasi dalam masa setahun.

Perjanjian ini diterima baik oleh kedua belah pihak dan Sultan Sepuh dapat membayar pada tahun berikutnya. Ketika Sultan Sepuh kembali di Pasir, maka diadakanlah permusyawaratan dengan rakyat Pasir. Kemudian Sultan Sepuh meminta kepada rakyat yang menyimpan emas atau perhiasan emas, bila mana sampai waktunya akan mengantarkan upeti, dan ternyata kekurangan supaya menyerahkan emasnya itu kepada kerajaan Pasir.

4. J. Hagemann. Joz: *Aanteekeningen Omtrent een gedeelte Nan der Oost kust van Borneo*, Tijdschrift Indische Taal en Land volken kunde, deel 4, 1885, hal. 28

Mulai pada waktu itu, Sultan Sepuh memerintahkan rakyat Pasir, tua muda, laki-laki perempuan, anak-anak yang telah dapat menolong orang tuanya, agar bergotong royong mendulang emas di sungai Kandilo, untuk menebus kerajaan Pasir dari kerajaan Banjarmasin. Beribu-ribu rakyat Pasir, beramai-ramai mendulang emas di sungai Kandilo, sehingga dalam tempo satu tahun telah didapat hampir 100 kati emas.

Setelah sampai waktunya perjanjian, maka emas urai yang setengah pikul (50 kati), diserahkan kepada Sultan Banjarmasin oleh Sultan Sepuh untuk menebus kerajaannya. Sejak waktu itu, bebas lah kerajaan Pasir dari ikatan kerajaan Banjarmasin.⁵

Kemudian setelah Sultan Sepuh meninggal dunia, ia digantikan oleh kemenakannya yang bernama Dipati Anom. Selama Dipati Anom memerintah rakyat Pasir menjadi lebih makmur, karena tidak dibebani pekerjaan mendulang emas untuk pembayaran upeti kepada Raja Banjarmasin. Ladang, kebun dapat dipelihara dengan baik.

Setelah Sultan Dipati Anom meninggalkan dunia ia digantikan oleh sepupunya yang bernama Sultan Sulaiman. Dalam masa pemerintahan Sultan ini kerajaan Banjarmasin memperingatkan kepada Sultan Pasir akan kewajibannya untuk membayar upeti. Akan tetapi oleh Sultan Pasir hal ini tidak digubris. Tetapi pihak Belanda tidak tinggal diam. Dalam perjanjian tahun 1817 Belanda belum melakukan tindakan, maka diadakanlah menentukan kedudukan Pasir. Baru dalam perjanjian pada tanggal 4-Mei 1826 dinyatakan bahwa Sultan Adam harus menyerahkan, antara lain Pasir, Kutai dan Berau kepada Belanda. Sultan Pasir yang keempat belas yaitu Sultan Adam untuk pertama kalinya, telah membuat kontrak dengan Gubernemen Belanda yaitu pada tahun 1844.

Walaupun demikian Sultan Sulaiman, tetap memerintah Pasir yang merdeka dan berdaulat tanpa dicampuri oleh peme-

5. Dr. J. Eisen berger, op. cit. hal. 16

rintah Belanda. Setelah Sultan Sulaiman meninggal dunia ia digantikan oleh kemanakannya Sultan Ibrahim, putra dari Pangeran Surya Nata Negara. Peristiwa penting dalam pemerintahan Sultan Ibrahim, ialah pergeseran perbatasan antara kerajaan Kutai dan kerajaan Pasir. Sebelumnya perbatasan kedua kerajaan itu ialah sebuah sungai bernama sungai Aji Raden. Karena itu Balikpapan dan Panajam masuk wilayah kerajaan Pasir.

Pada waktu Sultan Ibrahim memerintah kerajaan Pasir, seorang putrinya kawin dengan putra Sultan Kutai. Ketika putri kerajaan Pasir yang bernama Aji Siti Jawiah berangkat ke Kutai dengan suaminya, maka secara resmi Sultan Ibrahim menyerahkan segala hasil laut dan darat kepada Siti Jawiah dengan suaminya. Karena hubungan kekeluargaan kemudian Balikpapan dan Panajam itu seterusnya menjadi daerah kerajaan Kutai.

Sesudah Sultan Ibrahim meninggal ia digantikan oleh saudara sepupunya Sultan Makhmud Khan dari tahun 1838 — 1843 putra sulung dari almarhum Sultan Sulaiman. Tiga tahun setelah Sultan memerintah kerajaan Pasir, tibalah sebuah kapal dagang Belanda Nakhoda dan anak buahnya datang ke istana untuk berkenalan dengan Sultan Makhmud Khan.

Menurut cerita itulah pertama kali, negeri Pasir didatangi orang Belanda. Kapal dagang tersebut datang melalui Banjarmasin dengan membawa barang seperti kain-kain, barang-barang permainan, roti-roti, gula-gula, cermin, mainan manik-manik, piring dan guci-guci. Barang dagangan ini diperjual belikan secara barter dengan hasil hutan seperti rotan, damar, dan emas urai hasil pedulungan rakyat.

Selain dari kapal Belanda yang mulai sejak ke negeri Pasir, banyak pula kapal dagang dari Jawa dan Makasar.

Setelah Sultan Makhmud Khan meninggal dunia ia digantikan oleh saudaranya Sultan Adam pada tahun 1844 — 1861. Acara penobatan dilakukan menurut adat lembaga kerajaan

Pasir sejak pemerintahan putri Petung, ialah menyerahkan alat kerajaan pusaka turun temurun berupa barang seperti: gong, ceret, pinggan melawan, baki dari tembaga dan dua buah meriam si Macan si Gantang. Semua pusaka kerajaan ini diserahkan oleh rakyat Pasir. Sesudah raja yang baru dinobatkan itu, menerima alat kerajaan ini, barulah raja itu sah sebagai raja yang diakui oleh seluruh rakyat Pasir.

Pada waktu penobatan Sultan Adam untuk pertama kali pemerintah kolonial Belanda turut menghadirinya yaitu Residen dari Banjarmasin.

Sebelum upacara penobatan dimulai, residen Banjarmasin A.L. Weddik yang berpangkat Comisaris Gubernemen Belanda untuk pulau Borneo, menyerahkan hadiah kerajaan Belanda sebagai tanda persahabatan berupa sebuah peti yang indah buatannya berisikan selembur baju terbuat dari kain lakan yang mahal harganya bersulam kembang yang terbuat dari benang emas, selembur celana dari kain lakan hitam dengan strip pita emas, sebilah pedang berhalukan gading, berbentuk emas dan berbentuk/bermahlkota dua ekor singa bertatahkan intan, sepasang sepatu dengan kaus tangan. Pakaian inilah yang dipakai Sultan Adam pada waktu dinobatkan menjadi Sultan kerajaan Pasir.

Setelah Sultan dinobatkan Belanda menyodorkan perjanjian yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

1. Kerajaan Pasir mengakui masuk wilayah jajahan Hindia Belanda.
2. Kerajaan Pasir setia kepada kerajaan Belanda dan taat kepada raja Belanda dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
3. Pasir tidak akan mengadakan hubungan langsung ataupun membuat perjanjian dengan negara lain. Musuh Belanda adalah juga menjadi musuh kerajaan Pasir.

Pada waktu pemerintahan Sultan Adam ada dua orang peda-

gang yang kerap kali berdagang di kerajaan Pasir. Pertama Syehk Syarif Hamid Alsegaf seorang pedagang Arab dari Semarang. Syekh Syarif Hamid kerap kali membawakan sultan pestol senapan, karena itu Syarif Hamid menjadi sahabat Sultan. Kemudian saudagar Arab itu kawin dengan kemanakan Sultan yang bernama Aji Musnah. Syarif Hamid Alsegaf kemudian diangkat menjadi menteri kerajaan dan dihiahi gelar Pangeran. Pedagang yang kedua bernama La Kumai dari Sulawesi Selatan, seorang saudagar yang kaya. Kemudian ia dikawinkan dengan putri bangsawan Pasir yang bernama Aji Rindu, anak dari almarhum Sultan Makhmud Khan. Ia dihiahi gelar Pangeran kemudian diangkat menjadi menteri kerajaan dengan nama Pangeran Mas.

Pada akhirnya pemerintahan Sultan Adam pemerintah Belanda tidak senang terhadapnya, karena ia membantu menyembunyikan pejuang-pejuang pengikut Pangeran Antasari yang memberontak terhadap Belanda sejak 1859. Ketika raja-raja pesisir Kalimantan Timur diminta Residen Belanda di Banjarmasin untuk menghadap menyatakan tanda setianya kepada Gubernemen, Sultan tidak bersedia menghadap ke Banjarmasin.

D. LATAR BELAKANG PERLAWANAN

Telah disinggung bahwa pemerintah Hindia Belanda telah merasa dirinya berhak atas seluruh wilayah Indonesia sejak adanya timbang terima kekuasaan dari Inggeris pada pemerintah Belanda tahun 1816.

Tetapi untuk melaksanakan politik penjajahan ini, Belanda sebenarnya merasa tidak mampu menguasai seluruh wilayah Indonesia. Tetapi hal ini dapat dilakukan dengan politik pemerintahan tidak langsung.

Demikianlah politik yang dijalankan oleh Belanda terhadap kerajaan Pasir. Dengan politik adu domba ia memperoleh keuntungan untuk mengecilkan kekuasaan raja Pasir.

Politik Belanda yang dijalankan itu tidak dapat diterima oleh rakyat Pasir yang cinta kemerdekaan, Belanda terlalu banyak mencampuri urusan pemerintah kerajaan, sehingga raja banyak merupakan boneka belaka. Di samping itu faktor pendorong bagi Belanda untuk segera menguasai kerajaan Pasir adalah agar supaya wilayah ini jangan sampai jatuh ke tangan bangsa imperialis Eropah lainnya.

Masyarakat Pasir yang umumnya beragama Islam memandang orang Belanda itu adalah orang kafir. Mati dalam melawan orang kafir adalah mati syahid. Karena itu mereka berjuang melawan orang Belanda.

E. SEBAB-SEBAB PERLAWANAN

Sejak Sultan Adam menanda tangani Korte Verklaring sebenarnya telah timbul benih permusuhan. Hal ini tampak ketika meletusnya perang perlawanan rakyat Banjarmasin, Sultan Adam aktif memberikan bantuan pada pasukan Antasari yang bersembunyi di wilayahnya. Perlawanan Sultan Adam terhadap Belanda adalah merupakan gerakan perlawanan di bawah tanah. Untuk menumpas gerakan di bawah tanah ini pemerintah Belanda menangkap Sultan Adam dan diasingkan ke Banjarmasin.

Sultan Adam digantikan kemanakannya yang bernama Sultan Sepuh Adil Khalifatulmukminin. Sultan ini sangat aktif memajukan pertanian. Pada waktu itulah mula-mula diadakan perkebunan karet di dalam kerajaan Pasir. Sultan dan keluarganya sendiri turut berladang dan berkebun untuk memberi dorongan kepada rakyat supaya giat bertani. Jaman Sultan ini, ada seorang pedagang ternak kaya dari Sulawesi Selatan yang bernama La Basso. Karena kekayaannya ia meminang keluarga dekat raja yang bernama puteri Aji Reinah. La Basso digelar Pangeran Dipati dan diangkat menjadi menteri kerajaan. Politik perkawinan ini adalah guna memperoleh bantuan orang-orang Bugis melawan penjajahan Belanda.

Sultan Adil Khalifatulmukminin digantikan putra almarhum Sultan Makhmud Khan yang bernama Sultan Muhammad Ali Khalifatulmukminin. Raja ini seorang yang taat beragama. Pada bulan puasa menteri kerajaan dan pegawainya diberikan keringanan. Dalam menjalankan urusan pemerintah sebab itu sering perintah residen dari Banjarmasin tidak mendapat layanan dari Sultan. Residen tidak senang atas kebijaksanaan Sultan. Residen semakin bertambah marah mendengar laporan-laporan dari bawahannya, bahwa Sultan Muhammad Ali menaruh simpati terhadap perjuangan Pangeran Antasari dan melindungi pemberontak-pemberontak yang bersembunyi dalam kerajaannya. Seorang Asisten Residen dengan secara diam-diam langsung menyelidiki hal itu. Dari rakyat Pasir ia mengetahui peristiwa itu, Asisten Residen meminta agar Sultan bersama-sama ke Banjarmasin untuk mempertanggung jawabkannya kepada Residen. Sultan tidak menanggapi permintaan Asisten Residen dan menyatakan ia belum bersedia meninggalkan Pasir selama bulan puasa.

Mendengar laporan itu, Residen sangat marah. Sebulan kemudian Residen sendiri dengan sepasukan tentara datang ke Pasir. Setibanya di Pasir, Residen Belanda menyatakan, bahwa Sultan tidak cakap, tidak ditaat kepada peraturan Gubernur dan suka melawan pemerintah. Mendengar pembicaraan Residen yang tidak sopan itu, Sultan Ali Muhammad menjadi marah, bahwa sebagai Sultan ia berhak menentukan kebijaksanaan sendiri dalam kerajaannya. Baru sekali inilah seorang Sultan berani menentang terus terang seorang Residen Belanda di kerajaan Pasir. Residen dengan paksa membawa Sultan ke Banjarmasin. Kemudian Sultan Ali dimaksudkan Belanda dan menentukan Banjarmasin sebagai tempat pembuangannya. Sultan Muhammad Ali meninggal dalam pembuangan di Banjarmasin. Sebagai penggantinya diangkat Sultan Abdurrahman putra almarhum Sultan Adam.⁶

6. *Ibid*, hal. 27

Pada jaman pemerintahan Sultan Abdurrahman, gubernemen Belanda mengadakan peraturan memungut belasting atau wang kepala di kerajaan Pasir. Setiap orang yang sudah dewasa diwajibkan membayar pajak tersebut.

Setelah Sultan Abdurrahman meninggal dunia pemerintahan diserahkan kepada Pangeran Nata Panembahan Sulaiman kemanakan Sultan Abdurrahman dicalonkan sebagai pengganti. Tetapi Pangeran Nata berkeberatan. Ia memberikan pernyataan kepada Residen, ia lebih senang bertani. Para bangsawan dan rakyat kerajaan Pasir lalu memilih Pangeran Ratu Raja Besar putra Sultan Sepuh Adil Khalifatulmukminin menjadi penggantinya. Setelah upacara menurut adat lembaga kerajaan Pasir selesai dilaksanakan dan pemerintahan diserahkan oleh Sultan Pangeran Nata Panembahan Sulaiman, beliau kembali ke kampungnya di Selinau.

Menteri kerajaan pada waktu itu ialah:

1. Aji Meja Putra Aji Gaga bergelar Pangeran Mangku Jaya Kesuma menteri pertama
2. Aji putra Pangeran Nata Panembahan Sulaiman bergelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat, menteri kedua
3. Pangeran Panji Nata Kesuma putra Almarhum Sultan Abdurrahman, menteri ketiga
4. La Basso gelar Pangeran Dipati sebagai menteri keempat.

Sultan Pangeran Ratu Raja Besar, kerap kali mempercayakan urusan pemerintahan kepada para menterinya. Di antara menterinya yang sangat dipercayainya ialah Pangeran Mangku Jaya Kesuma. Urusan pemerintahan dengan gubernemen Belanda di Banjarmasin, dipercayakannya kepada menteri pertama ini. Mertua Pangeran Jaya Kesuma bernama La Maraja, adalah seorang saudagar yang kaya raya. Ia banyak mempunyai hubungan dagang dengan saudagar di Banjarmasin, Surabaya, Gersik, Betawi dan Singapura. Karena selalu saja berurusan dengan Gubernemen Belanda di Banjarmasin, timbullah ambi-

sinya untuk lebih berkuasa. Dengan bantuan mertuanya yang kaya raya, ia bercita-cita untuk menjadi Sultan. Hubungannya dengan Residen J. Broers di Banjarmasin sudah sangat intim. Baik Pangeran Mangku Jaya Kesuma, maupun mertuanya, kerap kali membawakan nyonya J. Broers buah tangan sebagai tanda persahabatan. Karena hubungannya yang sangat baik itu, Pangeran Mangku Jaya Kesuma dan mertuanya La Maraja, tiada merasa malu dan segan dengan terus terang mengemukakan maksudnya itu, kepada residen. Residen J. Broers, setuju untuk membantu cita-cita Pangeran Mangku Jaya Kesuma, karena dengan berhasilnya rencana ini Residen dapat melaksanakan cita-cita pemerintahannya untuk menjalankan politik adu domba, memecah belah rakyat dan raja Pasir, yang selama ini bersimpati kepada perjuangan Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan. Untuk mencapai maksudnya itu, Residen La Maraja dan Pangeran Mangku Jaya Kesuma, mengatur suatu rencana.

Sultan Pasir Pangeran Ratu Raja Besar dengan menterinya Pangeran Mangku Jaya Kesuma menghadap residen di Banjarmasin. Setiba di Banjarmasin Residen menganjurkan kepada Sultan agar memberikan suatu surat kepercayaan kepada Pangeran Mangku Jaya Kesuma sebagai dasar hukum, untuk berurusan soal-soal pemerintahan dengan gubernemen Belanda. Dengan demikian Sultan tidak perlu pulang balik ke Banjarmasin. Anjuran residen ini, disetujui oleh Pangeran Ratu Raja Besar, untuk memberikan surat kepercayaan kepada menterinya Pangeran Mangku Jaya Kesuma sebagai menteri pertama. Oleh Residen dibacakan suatu konsep yang telah disediakan lebih dahulu.

Sultan setuju bunyi konsep itu. Keesokan harinya Sultan Pangeran Ratu Raja Besar dan menterinya dipanggil menghadap untuk menandatangani surat kepercayaan atau surat kuasa untuk menterinya Pangeran Mangku Jaya. Sultan menandatangani surat kuasa itu dengan tiada membacanya lebih dahulu serta membubuhi cap kerajaan Pasir. Sesudah itu, Pangeran

Mangku Jaya menanda tangani surat kuasa itu dan penghabisannya tuan residen sebagai saksi.

Setelah selesai penanda tangan surat kuasa itu, Sultan Pangeran Ratu Raja Besar dan menteriya, kembali ke Pasir.

Sesudah beberapa lamanya Sultan berada di Pasir, tersiar berita bahwa Sultan telah menandatangani suatu surat penyerahan kekuasaan kepada menteriya Pangeran Mangku Jaya dan mengundurkan diri sebagai Sultan. Para bangsawan Pasir yang merasa lebih berhak mewarisi kerajaan dan menggantikan Sultan, sangat marah mendengar berita itu. Mereka menghadap Pangeran Ratu Raja Besar untuk meminta keterangan tentang kebenaran berita itu. Oleh Sultan dijelaskan bahwa ia sekali-kali tidak menanda tangani pengunduran diri dan menunjuk Pangeran Mangku Jaya menjadi Sultan, yang ada ialah surat kuasa untuk menteriya Pangeran Mangku Jaya, supaya mudah berurusan di Banjarmasin. Mendengar penjelasan itu, para bangsawan Pasir menjadi lega hatinya.

Tiada berapa lamanya Sultan menerima salinan surat yang ditanda tangannya di Banjarmasin itu. Setelah dibacanya dengan teliti, alangkah terkejutnya, karena bunyi surat itu, tiada sesuai dengan konsep yang dibacakan. Sekarang barulah ia insyaf bahwa ia telah ditipu oleh residen dan menteriya Pangeran Mangku Jaya, dan menyesal karena kelalaiannya sendiri tidak hati-hati harus menanda tangani surat kuasa itu dengan tidak membacanya lebih dahulu. Sultan Pangeran Ratu Raja Besar dengan segera memanggil keluarganya yang lebih berhak untuk menjadi Sultan menurut adat lembaga kerajaan Pasir. Mendengar kejadian itu, keluarga Sultan sangat marah atas perbuatan Pangeran Mangku Jaya yang bersekongkol dengan residen mengkhianati rajanya Pangeran Ratu Raja Besar.

Tiada berapa lamanya, tiba di Pasir tiga buah kapal perang dengan seorang Overste dan Asisten Residen sebagai Wakil Residen Banjarmasin meminta kepada Sultan Pasir Pangeran Ratu Raja Besar, untuk mengadakan serah terima kekuasaan

pada Pangeran Mangku Jaya, sesuai dengan bunyi surat yang ditanda tangannya di Banjarmasin.

Sultan Pangeran Nata Panembahan Sulaiman menyatakan bahwa pengangkatan Pangeran Mangku Jaya Kesuma menjadi Sultan Pasir adalah bertentangan dengan adat lembaga kerajaan yang selama ini dengan taat dilaksanakan oleh para bangsawan dan seluruh rakyat Pasir. Untuk menjelaskan pernyataannya itu, ditunjukkan beliau silsilah raja-raja Pasir dan siapa yang patut menjadi Sultan apabila Pangeran Ratu Raja Besar mengundurkan diri. Pangeran Nata meminta supaya serah terima itu diundurkan, dan mendesak asisten residen, agar melaporkan hal itu kepada residen di Banjarmasin.

Residen menyatakan bahwa timbang terima antara Pangeran Ratu Raja Besar dengan Pangeran Mangku Jaya Kesuma harus dilaksanakan karena hal itu adalah kemauan Sultan sendiri, dan tidak bisa diubah lagi, karena sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Betawi. Untuk melaksanakan serta serah terima kekuasaan dan pengangkatan Pangeran Mangku Jaya menjadi Sultan Pasir, Residen sendiri dengan kapal perang Belanda datang ke Pasir disertai dengan pasukan tentara.

Dengan keadaan terpaksa Pangeran Ratu Raja Besar menanda tangani surat serah terima itu. Sekarang tercapailah maksud residen sebagai alat pemerintah kolonial, sesuai dengan politik penjajahan mengadu domba raja-raja dan rakyat Pasir. Pangeran Mangku Jaya dan mertuanya La Maraja mencapai cita-citanya.⁷

Pangeran Mangku Jaya gelar Sultan Ibrahim Khaliluddin memerintah antara 1900 — 1908. Pemerintahan Sultan Ibrahim Khaliluddin tidak dapat berjalan lancar, karena banyak bangsawan dan rakyat yang tidak menyetujui pengangkatannya sebagai Sultan Pasir. Di antara para bangsawan itu, yang

7. *Ibid*, hal. 32

besar pengaruhnya di kalangan raja-raja dan rakyat Pasir, ialah Pangeran Panji Nata Kesuma, putra almarhum Sultan Abdurrahman yang pernah menjadi menteri kerajaan pada jaman Sultan Pangeran Ratu Raja Besar. Aji Nyesei gelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat putra Pangeran Nata Panembahan Sulaiman dan Panglima Sentik. Wang kepala atau belasting tidak dibayar rakyat. Sultan Ibrahim tiada berdaya terhadap perlawanan rakyat. Mereka benci terhadap Sultan, *Pertama* rakyat tahu bahwa Sultan Ibrahim bersekongkol dengan residen Belanda mengkhianat Sultan Pangeran Ratu Raja Besar, *Kedua* Sultan Ibrahim telah berani melanggar tradisi raja-raja mereka dan menjadi raja dengan tidak menerima pusaka kerajaan dari rakyat secara adat; *ketiga* ada beberapa bangsawan Pasir yang lebih berhak untuk tahta dari Sultan Ibrahim.

Untuk mengatasi perlawanan rakyat, agar belasting tetap dibayar oleh rakyat, Sultan Ibrahim mengangkat saudaranya Pangeran menteri menjadi menteri kerajaan. Meskipun demikian rakyat tetap patuh kepada Pangeran Panji dan kawannya.⁸

Untuk melemahkan perlawanan Pangeran Panji, Sultan Ibrahim mengusulkan kepada Gubernemen Belanda, supaya Aji Nyesei gelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat, putra bekas Sultan Pangeran Nata Panembahan Sulaiman, menjadi Raja Muda. Sebahagian rakyat yang menjadi pengikut Aji Nyesei menghentikan perlawanan. Tetapi kemudian Sultan Ibrahim pun merasa khawatir karena Raja Muda Aji Nyesei bertambah pengaruhnya.

Dimintanya surat keputusan pengangkatan Aji Nyesei menjadi Raja Muda Pasir dengan alasan Residen Banjarmasin, meminta dibuatkan salinannya. Tetapi setelah beberapa kali Raja Muda meminta surat keputusan pengangkatannya, oleh Sultan Ibrahim selalu dijawab, belum dikembalikan Residen.

8. *Ibid*, hal. 27

Raja Muda merasa, bahwa ia dipermainkan oleh Sultan Ibrahim oleh karena itu, ia bergabung dengan Pangeran Panji menentang Sultan. Pertentangan antara keluarga Sultan Ibrahim di satu pihak dan pengikut-pengikut Pangeran Panji dan Aji Nyesei Raja Muda di lain pihak menjadi semakin buruk, sehingga Sultan Ibrahim tidak dapat menguasai keadaan. Rakyat tidak mau membayar wang kepala, menyebabkan pajak itu macet sama sekali, kedudukan Sultan Ibrahim menjadi semakin sulit, atasannya gubernemen Belanda menganggap ia terlalu lemah, sehingga pembayaran pajak tidak masuk sedikit jua pun, sedangkan di pihak para bangsawan dan rakyat tidak mematuhi perintah dan peraturan gubernemen. Dalam keadaan yang sulit itu Sultan Ibrahim mengundang mertuanya La Maharaja dan saudaranya Pangeran Menteri serta kaum keluarganya yang berpihak kepadanya, untuk memusyawarahkan situasi yang gawat itu. Pada perundingan itu, Sultan dan keluarganya berpendapat bahwa mereka tidak mungkin seterusnya mempertahankan kedudukan Sultan Ibrahim sebagai pemimpin pemerintahan kerajaan Pasir. Mereka sependapat lebih baik pemerintahan kerajaan itu diserahkan saja kepada Gubernemen Belanda, dengan meminta ganti rugi. Sebelum usul penyerahan dimajukan kepada Gubernemen Belanda, terlebih dahulu harus diadakan musyawarah dengan para bangsawan dan raja-raja Pasir yang berhak atas tahta kerajaan.

Pada suatu hari Sultan Ibrahim mengundang para menternya dan orang besar kerajaan Pasir. Dalam pertemuan itu Sultan Ibrahim, mengemukakan kesulitan-kesulitan yang akan terjadi kemudian hari, dengan adanya peraturan baru dari Gubernemen untuk mengadakan peraturan *heerendients* atau *rodi*, yang mewajibkan rakyat kerja paksa setiap tahun 20 hari di samping kewajiban membayar wang kepala. Jika peraturan ini dilaksanakan, rakyat akan menentang, karena jelas rakyat tidak akan menurut saja peraturan yang sangat memberatkan beban dan kehidupan mereka. Dan kalau peraturan ini tidak dilaksanakan, pasti Gubernemen akan menghukum, karena

dianggapnya melawan peraturan Gubernemen. Dianjurkannya agar supaya para menteri setuju, demikian juga para bangsawan yang hadir, untuk menyerahkan saja pemerintahan kerajaan Pasir langsung dilaksanakan oleh Gubernemen Belanda, dengan meminta ganti rugi, bagi para bangsawan yang berhak mewarisi tahta kerajaan.

Dalam perundingan itu, masing-masing mengeluarkan pendapat. Di pihak Aji Nyesei sebagai Sultan Muda dan sebagai menteri tidak bersedia menyerah kepada pemerintah Belanda, karena pada waktu yang baik ia dapat menjadi Sultan. Pangeran Panji Nata Kesuma bin almarhum Sultan Abdurrahman tidak setuju, karena kerajaan Pasir adalah pusaka turun temurun, harus diperintah oleh juriat raja-raja Pasir.

Tetapi Aji Meja Pangeran Menteri, Pangeran Mas, Pangeran Dipati yaitu menteri-menteri kerajaan Pasir, setuju supaya kerajaan Pasir diserahkan saja kepada Belanda dengan ganti rugi kalau sudah disetujui Gubernemen Belanda, baru wangnya dibagi-bagi kepada menteri-menteri kerajaan dan para bangsawan Pasir yang berhak atas tahta kerajaan. Pendapat yang terakhir ini disokong oleh Sultan Ibrahim Khaliluddin. Kemudian mereka membuat surat pernyataan yang akan dikirim kepada residen di Banjarmasin dan diteruskan kepada pemerintah di Betawi. Tiada berapa lamanya berselang didapat balasan dari Residen di Banjarmasin, yang isinya bahwa Gubernemen di Betawi setuju menerima penyerahan Pasir dan bersedia mengganti kerugian atau *schadeloosstelling* kepada Sultan, para menteri serta kepada para bangsawan Pasir yang berhak atas kerajaan Pasir, dengan perjanjian bahwa Sultan dan para menteri harus meletakkan jabatan dan melepaskan segala kekuasaannya atas kerajaan Pasir. Demikian juga para bangsawan Pasir tidak berhak lagi atas kerajaan Pasir.

Mendengar berita, bahwa Sultan dan para menterinya, menyerahkan kerajaan Pasir, Pangeran Panji, Panglima Sentik dan para bangsawan yang menentang usul itu, mengadakan pula gerakan bersama-sama rakyat. Mereka mengakui Sultan

Pasir dengan para menterinya sebagai pemerintah kerajaan Pasir yang sah. Sebagian besar mendukung Pangeran Panji dan kawan-kawannya.⁹

Setelah surat balasan dari pemerintah di Betawi diterima, Sultan Ibrahim Khaliluddin, saudaranya Pangeran menteri dan mertuanya La Maharaja berlayar ke Banjarmasin. Entah bagaimana pembicaraan dan perundingan Sultan Ibrahim dan Residen di Banjarmasin, tak seorang pun mengetahui, selain dari Pangeran menteri dan mertuanya La Maharaja.¹⁰

Dalam bulan Oktober 1908 oleh Residen J. Van Weert / dengan perantaraan Civiël Gezaghebber Tanah Grogot Kapten Droest, memberitahukan kepada Sultan Pasir bahwa permohonan minta ganti kerugian dengan menyerahkan seluruh hak-haknya di kerajaan Pasir kepada Gubernemen Belanda, diterima baik oleh pemerintah di Betawi dan tidak lama lagi wang ganti kerugian sebanyak N.F. 377,267 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah Belanda), akan dikirim ke Tanah Grogot dan diserahkan kepada Sultan, para menteri, serta para bangsawan yang berhak atau kerajaan Pasir yang namanya seperti berikut:

1.	Sultan Ibrahim Khaliluddin	N.F.	101.945
2.	Pangeran Nata Panembahan Sulaiman . . .	N.F.	85.000.
3.	Aji Nyesei Raja Muda	N.F.	66.267.
4.	Pangeran Panji bin Sultan Abdurrahman .	N.F.	28.855.
5.	Pangeran Perabu kampung Semuntai . . .	N.F.	25.200.
6.	Pangeran Menteri kampung Pasir	N.F.	10.000.
7.	Pangeran Dipati kampung Pasir	N.F.	10.000.
8.	Pangeran Mangku Tg. Aru kampung Landing	N.F.	10.000.
9.	Pangeran Mas	N.F.	10.000.
10.	Pangeran Singa Jaya kampung Muara Adang	N.F.	10.000.

9. *Ibid*, hal. 48

10. *Ibid*, hal. 78

11. Pangeran Ratu Raja Besar	N.F.	10.000.
12. Pangeran Suria Nata kampung Lempesu . N.F.		10.000.

J u m l a h N.F. 377.267.¹¹

(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh gulden).⁸⁾

Selain dari pada itu, diterangkan pula oleh Gezaghebber kepada Sultan Khaliluddin, bahwa apabila orang-orang tersebut masing-masing telah menerima wang pembagiannya, maka dengan sendirinya Sultan Pasir bersama-sama dengan menterinya, serentak melepaskan jabatannya, tidak turut lagi memerintah di kerajaan Pasir. Begitu pula para bangsawan Pasir menyerahkan segala hak kekuasaannya atas kerajaan Pasir kepada Gubernurnemen Belanda.

Kemudian berita ini, disampaikan pula oleh Sultan Ibrahim, kepada Pangeran Nata Panembahan Sulaiman dan Pangeran Ratu Raja Besar, tetapi dengan lain cara. Dikabarkannya bahwa pemerintah Belanda akan mengirimkan wang ganti kerugian kepada para bangsawan Pasir yang berhak atas kerajaan Pasir, terutama kepada Pangeran Nata Panembahan Sulaiman, jika melepaskan haknya menjadi Sultan Pasir sebesar N.F. 85.000. dan kepada Pangeran Ratu Raja Besar karena meletakkan jabatannya dibayar N.F. 10.000.

Begitu juga para bangsawan yang lain, lantaran melepaskan haknya dijelaskan oleh Sultan artinya tidak turut bekerja pada pemerintahan, akan mendapat bayaran juga. Sultan Ibrahim sendiri melepaskan haknya menerangkan kepada kedua Pangeran itu, ia sebagai Sultan mendapat ganti rugi sebanyak N.F. 100.000. Mendengar kabar itu, kedua bangsawan Pasir sangat gembira karena akan mendapat wang masing-masing sebagai tersebut di atas, dengan pengertian melepaskan haknya atas kerajaan Pasir, yaitu tidak turut bekerja pada pemerintahan Pasir.

11. *Ibid*, hal. 52

Demikianlah dalam bulan April 1908 wang N.F. 377.267. yang dikirim oleh Gubernemen Belanda diterima oleh *Gezaghebber* Tanah Grogot berupa wang perak terdiri dari rupiah dan ringgit yang akan dibagikan kepada Sultan para menteri dan bangsawan Pasir yang berhak atas kerajaan Pasir.

Pada suatu hari yang telah ditentukan oleh *Gezaghebber* Tanah Grogot mengundang Sultan Ibrahim, para menteri dan para bangsawan pasir yang berhak atas kerajaan Pasir. Sesudah semuanya hadir, maka *Gezaghebber* menerangkan bahwa pemerintah Gubernemen Belanda telah setuju menerima penyerahan kerajaan Pasir dari Sultan Pasir, para menteri dan para bangsawan Pasir yang berhak atas kerajaan Pasir, dengan ganti kerugian. Gubernemen Belanda telah mengirim wang sebesar N.F. 377.267. yang masing-masing akan diserahkan kepada yang berhak.

Setelah itu Sultan Ibrahim menjelaskan pula kepada hadirin dalam bahasa Pasir, bahwa pembayaran ini adalah ganti kerugian kepada para bangsawan Pasir yang melepaskan hak memerintah kerajaan Pasir, artinya melepaskan haknya yang ada di kerajaan Pasir.

Kemudian *Gezaghebber* mengeluarkan suatu akte penyerahan kerajaan dan selemba daftar yang harus ditanda tangani setelah penercmaan uang menurut haknya masing-masing.

Yang pertama-tama menanda tangani surat akte penyerahan dan daftar penerimaan uang ganti rugi ialah Sultan Ibrahim, lalu menerima uang sebanyak N.F. 101.945. berupa uang perak dan ringgit. Yang kedua Pangeran Nata Panembahan Sulaiman sebanyak N.F. 85.000, yang ketiga menanda tangani ialah Pangeran Perabu kampung Semuntai menerima uang sebanyak N.F. 25.200, yang keempat Pangeran Menteri sebanyak N.F. 10.000, yang kelima Pangeran Dipati sebanyak N.F. 10.000, yang keenam menanda tangani dan menerima uang sebanyak N.F. 10.000 ialah Pangeran Ratu Raja Besar,

yang ketujuh Pangeran Mas menerima sebanyak N.F. 10.000, yang kedelapan Pangeran Mangku Tg. Aru menerima sebanyak N.F. 10.000, yang kesembilan Pangeran Suria Nata sebanyak N.F. 10.000, yang kesepuluh Pangeran Singa Muara Adang menerima sebanyak N.F. 10.000, yang kesebelas Pangeran Panji Nata Kesuma bin Sultan Abdurrahman disuruh menanda tangani penerimaan uang sebanyak N.F. 28.855. Pangeran ini tidak mau menanda tangani surat tersebut serta tidak mau menerima uang sebanyak N.F. 28.855 dan menyatakan kepada *Gezaghebber* Belanda itu, bahwa ia tidak mau menjual negerinya, sedangkan waktu mengadakan perundingan dengan Sultan Ibrahim, ia sendiri tidak setuju menyerahkan kerajaan Pasir kepada Gubernemen Belanda.

Mendengar pembicaraan Pangeran Panji itu, *Gezaghebber* itu menjadi marah dan menerangkan bahwa keluarganya yang sama-sama dengan dia telah menanda tangani dan menerima uang tanda setuju menanda tangani dan menerima uang itu, nanti akan diserahkan kepada orang lain.

Kemudian Sultan Ibrahim menerangkan kepada *Gezaghebber*, bahwa dalam perundingan antara para menteri dan para bangsawan, Pangeran Panji juga menyetujui penyerahan kerajaan kepada Belanda.

Pangeran Panji menyangkal, karena itu terjadi pertengkaran antara Sultan Ibrahim dan Pangeran Panji. Lalu *Gezaghebber* bertindak mengatasinya. Pangeran Panji tidak senang, lalu meninggalkan sidang dengan tidak menanda tangani surat penyerahan itu dan tidak menerima uang yang disediakan pembagiannya, sebagai ganti kerugian untuk menyerahkan haknya atas kerajaan Pasir.

Karena peristiwa itu Sultan Ibrahim berunding dengan para menteri yang hadir. Keputusannya uang ganti rugi itu diserahkan kepada Pangeran Ratu Agung Luasi.

Yang kedua belas disuruh menanda tangani ialah Aji Nyesei Raja Muda. Karena Raja Muda sangat bimbang ter-

paksa ia meminta pertimbangan kepada ayahdanya Pangeran Nata Panembahan Sulaiman yang hadir pada waktu itu. Pikiran beliau kalau uang itu tidak diterima tentu Gezaghebber akan marah seperti terhadap Pangeran Panji dan uang itu tentu diserahkan pula kepada orang lain. Kalau diterima uang itu, berarti menyerahkan pangkatnya sebagai menteri dan Raja Muda. Karena sudah banyak yang menanda tangani dan menerima uang ganti rugi itu, terpaksa Aji Nyesei Raja Muda menanda tangani dan menerima uang ganti rugi penyerahan haknya atas kerajaan Pasir dan menerima uang perak dan ringgit seharga N.F. 66.267.

Dengan penanda tangan surat akte penyerahan kerajaan Pasir kepada Gubernemen Belanda dan menerima uang ganti kerugian seperti tersebut di atas, maka pada hari itu tenggelamlah kerajaan dan kesultanan Pasir untuk selama-lamanya. Pada hari itu Sultan Ibrahim Khaliluddin dan para menteri kerajaan Pasir serentak meletakkan jabatannya dan menyerahkan segala hak dan kekuasaan kepada wakil Gubernemen Belanda Kapten Van Droest Gezaghebber di Tanah Grogot.

F. PERLAWANAN PANGERAN PANTI

Setelah Pangeran Panji bertengkar dengan Kapten Droest, karena menolak menanda tangani surat penyerahan kerajaan Pasir kepada Gubernemen Belanda dan tidak mau menerima uang ganti kerugian untuk melepaskan haknya atas kerajaan, ia meninggalkan sidang. Kemudian pada tahun 1908 juga ia bermusyawarah dengan pengikut-pengikutnya Panglima Sentik, Singa Negara dari Pasir Tengah, Kepala Suku Dayak Kaka Degu Aji Mujub dan lain-lain.^{1 2}

Pangeran Panji adalah seorang ramah tamah dan seorang pemeluk agama Islam yang taat mengerjakan amal ibadat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

12. *Loc. cit.*

Di Banjarmasin ia banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh agama dan anggota-anggota Sarikat Islam yang baru saja berdiri di Banjarmasin.

Setelah kembali ke Tanah Grogot ia berdiam di pedalaman bersama-sama dengan adiknya Aji Mojo beliau menemu-mui para keluarganya di pedalaman, dan menerangkan kebusekusan politik pemerintah kolonial Belanda, yang mengadudomba para bangsawan dan rakyat Pasir.

Kepala Suku Dayak Pasir Kaka Degu dengan beribu-ribu pengikutnya dengan rela menjadi pengikut Pangeran Panji menentang pemerintah. Di antaranya banyak yang masuk menjadi pemeluk agama Islam yang taat. Mereka mupakat untuk menyerbu serdadu-serdadu Belanda yang ada di Tanah Grogot.

Berita akan timbulnya pemberontakan, diketahui oleh pemerintah kolonial Belanda di Tanah Grogot pada tahun 1912. Dengan segera dikirim sepasukan serdadu dengan alat persenjataan yang lengkap untuk menangkap Pangeran Panji dengan kawan-kawannya.

Keberangkatan serdadu-serdadu yang dikirim dari Tanah Grogot ini, diketahui oleh Pangeran Panji. Karena itu beliau dengan saudaranya Aji Mojo, dengan keluarganya Aji Benson dan Panglima Sentik dan beberapa kepala suku Dayak Pasir, mengadakan persiapan untuk melawan serdadu akan datang ke tempat itu.

Pada suatu tempat di sungai Kandilo dengan diam-diam Pangeran Panji dan kawan-kawannya menghadang serdadu-serdadu itu. Pagi-pagi dari tempat persembunyian mereka, kelihatan 6 buah perahu besar-besar berisi serdadu-serdadu Belanda. Sesudah perahu-perahu itu, mendarat di tempat yang tidak jauh dari persembunyian mereka, Pangeran Panji dengan kawan-kawannya serempak menyerang dengan bersenjatakan tombak, sumpitan, mandau dan perisai. Seketika itu, terjadilah pertempuran antara serdadu-serdadu Belanda yang bersenjatakan pistol dan senapang dengan pihak Pa-

ngeran Panji bersenjatakan mandau, tombak dan sumpitan. Karena persenjataan yang tidak seimbang itu Pangeran Panji dan kawan-kawannya tertangkap. Dengan keputusan Gubernemen Belanda Pangeran Panji dan Panglima Sentik untuk pengamanan sementara diasingkan ke Banjarmasin.¹³

Meskipun Pangeran Panji telah dibuang Belanda ke Banjarmasin, gerakan untuk mengusir Belanda dari Pasir, masih diteruskan oleh pengikutnya. Pada tahun 1913 pengikutnya yang bernama Matjanang mengadakan pula perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Gerakan itu terhenti dengan tertangkapnya Matjanang. Pada tahun 1914 saudara Pangeran Panji, dengan pengikutnya yang terdiri dari orang Pasir dan Dayak yang beragama Islam, mengadakan pemberontakan lagi. Ia tertangkap oleh serdadu-serdadu Belanda dan kemudian ditahan di kota Baru. Meskipun beberapa pemimpinnya tertangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda, rakyat Pasir tiada gentar terhadap serdadu-serdadu Belanda. Seluruh rakyat Pasir bertekad bulat untuk mengadakan pemberontakan. Pada bulan Juni 1915 terjadi perlawanan bersenjatakan di Pasir, mula-mula di beberapa kampung, kemudian meluas ke seluruh daerah Pasir sehingga merupakan suatu pemberontakan total. Beberapa pemuka-pemuka bangsa Pasir dan kepala-kepala suku Dayak bersatu mengadakan perlawanan. Pemimpin-pemimpinnya terdiri dari Wana, Sebaya, dan Uma Bongkat dari daerah suku Biu Pasir Selatan, Kaka Degu kepala suku Dayak dari hulu Tuyu, Singa Negara dan Walik kedua adalah kepala suku dari Satiu Pasir Tengah, yang banyak memperoleh pengikut dengan perjanjian akan membebaskan mereka dari pajak kepala dan rodi. Mereka bersumpah untuk melaksanakan wasiat dari Pangeran Panji. Ketika Pangeran Panji mendekati akhir hayatnya di tempat tidur pembuangannya di Banjarmasin, ia bersumpah bahwa ia dan pengikutnya akan melakukan pembalasan terhadap pegawai Gubernemen yang berke-

13. *Ibid*, hal. 88

bangsaan Eropah dan mengharap pemerintah kerajaan akan kembali memerintah rakyat Pasir.

Sejaman dengan pemberontakan Pasir itu, Partai Sarikat Islam mulai berkembang di seluruh tanah air. Sejak berdirinya cabang Sarikat Islam tahun 1914, organisasi itu mendapat sambutan yang baik dari rakyat Pasir. Seorang anggota pengurus dari organisasi itu dari Surabaya sengaja datang ke Pasir, untuk mempropagandakan maksud dan tujuan Sarikat Islam. Dalam rangka kunjungan pengurus Sarikat Islam itu ia mempunyai kesempatan berkenalan dengan bekas Sultan Pasir Sultan Ibrahim Khaliluddin, bekas menterinya Pangeran Menteri, para bangsawan Pasir yang lain.

Para bangsawan Pasir tertarik, sehingga banyak bangsawan Pasir yang menjadi anggota Sarikat Islam. Sultan Ibrahim sendiri bersedia menjadi Presiden Sarikat Islam di Tanah Grogot dan adiknya Pangeran Menteri menjadi Wakil Presiden. Dengan masuknya Aji Nyesei Raja Muda dan Pangeran Ratu Raja Besar menjadi anggota, Sarikat Islam semakin bertambah maju.

Dengan adanya penerangan politik dari Sarikat Islam barulah para bangsawan itu mengerti dan mempunyai kesadaran berpolitik, serta insyaf bahwa selama ini, mereka dijadikan alat kolonial dan diadu domba sesama bangsanya.

Karena kesadaran itu, barulah mereka mengerti dan mengakui Pangeran Panji yang tak mau menyerahkan kerajaannya, tanah airnya kepada penjajahan Belanda. Dengan diam-diam mereka mendukung dan bergabung dengan kelompok Pangeran Panji di daerah pedalaman. Hampir semua para menteri, bekas Sultan yang menanda tangani surat akte penyerahan kerajaan Pasir berbalik menentang Gubernemen Belanda.

Pangeran Ratu Raja ~~Besar~~ bersama-sama Andin Ngoko, Andin Gedang dan Andin Dek memimpin gerakan di bawah tanah di bagian Teluk Apar. Pangeran Singa bersama-

sama Wana dan Sebaya, memimpin gerakan di bawah tanah di bagian Teluk Adang.

Aji Nyesei gelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat bersama-sama dengan Pangeran Perwira mengadakan gerakan di bawah tanah di daerah Pasir Benua sampai ke pedalaman Kali Kandilo.¹⁴

Dengan adanya perlawanan bersenjata dari pengikut Pangeran Panji dan kawan-kawannya serta gerakan politik Sarikat Islam di bawah pimpinan bekas Sultan Ibrahim, Pangeran Menteri, Pangeran Raja Muda, Pangeran Ratu Raja Besar dengan para bangsawan Pasir, dapat dikatakan roda pemerintahan kolonial Belanda tidak berjalan sama sekali. Patroli-patroli, serdadu-serdadu Belanda kerap kali diserang dengan tiba-tiba, sehingga mereka tidak berani memasuki pedalaman Pasir.

Mula-mula patroli Belanda dibantu serdadu patroli dari Kandangan. Pada bulan Agustus tiba bantuan pasukan dari Banjarmasin. Terjadi pertempuran dengan kelompok pejuang Wana dan Panglima Singa. Kedua pemimpin ini tertangkap serdadu Belanda. Pada bulan Nopember 1915 datang pula dua pasukan infantri dari Banjarmasin untuk mengamankan daerah pemberontakan yang dipimpin oleh Andon Ngoko dan Andin Gedang. Bulan Desember 1915 datang pula bala bantuan serdadu-serdadu Belanda dari Jawa untuk memadamkan pemberontakan itu.

Pada tahun 1916 barulah serdadu-serdadu Belanda dengan bala bantuan dari Banjarmasin, Kandangan dan Jawa mengadakan serbuan ke pedalaman Pasir. Mula-mula serdadu-serdadu kolonial Belanda menangkap pemimpin-pemimpin Sarikat Islam. Bekas Sultan Ibrahim, Aji Nyesei Raja Muda, Pangedan Menteri dan Pangeran Perwira dibawa ke Banjarmasin. Dengan keputusan pemerintah kolonial Belanda, cabang Sarikat Islam di Tanah Grogot dianggap berbahaya untuk kepentingan umum, dan dengan surat keputusan Gubernemen

14. *Ibid*, hal. 78

tanggal 19 Nopember 1917 No. 43 partai Sarikat Islam dibubarkan. Semua pengurusnya dinyatakan bersalah, karena menghasut rakyat Pasir mengadakan pemberontakan. Oleh pemerintah Belanda dengan surat keputusan Gubernemen tanggal 31 Juli 1918 No. 25 ditetapkan sebagai berikut:

1. Sultan Ibrahim Khaliluddin bekas Sultan kerajaan Pasir dihukum buang seumur hidup dan diasingkan ke Teluk Betung
2. Pangeran Menteri bekas Menteri kerajaan Pasir dihukum seumur hidup dan diasingkan ke Padang
3. Pangeran Perwira dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Banyumas.
4. Aji Muyub diasingkan ke Bengkulu
5. Aji Nyesei Pangeran Jaya Kesuma Ningrat Raja Muda Pasir dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Banjarmasin. Sesudah itu operasi militer Belanda digiatkan terus, sehingga hampir semua pemimpin pemberontakan itu ditangkap dan dijatuhi hukuman
6. Pangeran Singa dihukum buang 10 tahun di Garut
7. Andin Dek dan Andin Ngoko dihukum masing-masing 10 tahun dan diasingkan ke Aceh dan Sawah Lunto.
8. Andin Gedang, Sebaya dan Wana masing-masing dihukum 10 tahun diasingkan ke Semarang, Cilacap dan Blitar.

Sesudah beberapa tahun di Teluk Betung Sultan Ibrahim selalu menderita sakit sehingga kemudian dipindahkan ke Cimahi. Sakit beliau bertambah berat sehingga beberapa tahun meninggal dunia di tempat pembuangan itu. Pangeran Menteri sesudah beberapa tahun menjalani hukumannya di Padang, meninggal dunia di tempat pembuangan.

Adapun para pejuang-pejuang lain senasib semuanya meninggal dunia dalam pembuangan. Hanya Andin Dek dan Pangeran Jaya Kesuma Ningrat bekas Sultan Muda dengan selamat kembali ke Pasir sesudah menjalani hukumannya. Pa-

ngeran Panji yang ditahan di Banjarmasin, kemudian dengan Surat Keputusan Gubernemen tanggal 22 April 1914 No. 14 dibuang ke Padang, tetapi sebelum berangkat ke tempat pembuangannya meninggal di Pasir.

Demikianlah riwayat kisah kerajaan Pasir dengan pahlawannya Pangeran Panji Nata Kesuma dan kawan-kawan seperjuangannya yang menentang pemerintah Belanda yang dengan akal licinnya mengadu domba dan menindas rakyat Pasir.

G. AKIBAT PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJAAN PASIR TERHADAP IMPERIALISME KOLONIALISME TAHUN 1800 – 1907

Setelah perlawanan Sultan Salehuddin pada 1844 di Tenggarong dapat dipatahkan pasukan Belanda dan memaksakan kedaulatannya atas kerajaan itu, tiba pula giliran kerajaan Pasir.

Mengingat kekuatan pasukan Belanda yang dipersenjatai dengan alat modern, Sultan Adam dari kerajaan Pasir, terpaksa menanda tangani suatu perjanjian mengakui kedaulatan Belanda pada bulan Oktober 1844.

Mulai waktu itu Belanda menjalankan politik *divide et impera* mengadu domba bangsawan dari kerajaan Pasir, sehingga keluarga raja-raja Pasir terpecah menjadi dua, yaitu: golongan Sultan Ibrahim Khaliluddin dan golongan Pangeran Panji yang menentang kekuasaan Belanda.

Pertentangan yang berlarut-larut itu, menjadi alasan untuk Belanda menghapuskan kerajaan Pasir dengan membayar ganti rugi kepada golongan Sultan Ibrahim Khaliluddin. Pada bulan Mei 1908 kerajaan Pasir dihapuskan dan langsung diperintah oleh Gubernemen Belanda. Karena tindakan Belanda ini pangeran Panji dan kawan-kawannya semakin gigih mengadakan perlawanan, sehingga Belanda kewalahan dan mendatangkan bantuan serdadu-serdadu dari Banjarmasin dan Jawa.

Berkat usaha Sarikat Islam yang berdiri di Pasir pada tahun 1914 kedua golongan Pasir yang tadinya saling bertentangan bersatu kembali, mengadakan perlawanan bersama-sama menentang Belanda.

Dengan tibanya bantuan Angkatan Perang Belanda dari Jawa dan Banjarmasin, perlawanan Pasir dapat dipatahkan. Raja-raja dan pemimpin dari kerajaan Pasir dibuang ke Jawa dan ke Sumatera, pada tahun 1917.

Sejak itulah Belanda memberikan tekanan kepada rakyat Pasir, dan tidak diberikan kesempatan untuk maju, sehingga tidak ada putra daerah Pasir yang memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah menengah mau pun sekolah tinggi seperti *Kweekschool*, *Normaalschool* dan *Osvia*.

Sampai kepada perang dunia ke II rakyat Pasir, hidup dalam tekanan, kemiskinan dan kebodohan, sebagai akibat politik penjajah Belanda yang menguasai bekas kerajaan itu. Karena hampir semua pemimpin rakyat ditangkap, berpuluh-puluh yang mati dalam pembuangan, sesudah tahun 1917 rakyat Pasir tidak mampu lagi mengadakan perlawanan.

BAB III

PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJAAN KUTAI TERHADAP IMPERIALISME KOLONIALISME

A. IDENTIFIKASI

Luas kerajaan Kutai sejak pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa Ing Martapura (1605 – 1635), meliputi kabupaten Kutai, Kotamadya Samarinda dan Kotamadya Balikpapan sekarang, sebelah utara berbatasan dengan kerajaan Berau, sekarang menjadi kabupaten Berau dan di sebelah Selatan berbatasan dengan kerajaan Pasir, sekarang menjadi kabupaten Pasir.

Luasnya wilayah 89.413 km dengan jumlah penduduknya dewasa ini hampir 400.000 jiwa. Suku yang terbanyak ialah Suku Kutai yang tersebar hampir di seluruh daerah itu. Selain dari itu, berdiam pula suku pedalaman yang terdiri dari beberapa suku seperti suku Tuntung, suku Bahau, suku Kenyah, suku Benuaq, suku Modang, suku Leng Gelat, suku Basap dan suku Punan.

Kerajaan Kutai terletak 1,5° LS dan 1° LS dan diantara 114° BT – 119° BT. Di sebelah utara membumi dan bermacam-macam jenis kayu yang banyak menghasilkan devisa.

Tempat-tempat yang menghasilkan minyak bumi ialah Sang-Sanga dan Balikpapan. Batubara didapat di Loa Kulu, Separi, Batu Dinding dan Loa Tebu.

Emas didapat di hulu sungai Mahakam, dekat Long Iram, sebelah timur terdapat selat Makasar yang kaya dengan ikan laut.

Karena potensinya yang sangat kaya dengan sumber alamnya, Kutai pada permulaan abad ke XIX menjadi rebutan penjajah bangsa Eropah terutama Inggeris dan Belanda.

B. PERTUMBUHAN KERAJAAN KUTAI

Sampai sekarang para sejarawan masih sependapat bahwa kerajaan yang tertua di nusantara ini ialah kerajaan Kutai Mulawarman. Pendapat ini adalah berdasarkan penemuan prasasti (Yupa) yang tertua dari seluruh prasasti-prasasti yang pernah didapat di Indonesia. Dalam tulisan prasasti-prasasti sendiri tidak disebutkan nama kerajaan itu. Batu yang bertulisan itu, diketemukan di Muara Kaman di daerah Kutai dan nama rajanya yang terkenal seperti yang tersebut dalam prasasti bernama Mulawarman, sehingga para penulis sejarah menamakan kerajaan itu Kutai Mulawarman.

namakan kerajaan itu *Kutai Mulawarman*. Menurut Prof. Kern, berdasarkan ceritera rakyat Kutai yang dapat dipercaya adalah sebagai berikut:

Menurut sumber-sumber itu, "Kutai" sudah terkenal di India. Orang India (Hindu) bukan saja mengunjungi negeri itu, tetapi juga tinggal menetap di Kutai. Hal itu terbukti dengan benda-benda purbakala yang ditemukan di Kutai yang berasal tahun 400 Masehi.¹⁾

Kemudian dijelaskan oleh Prof. Kern, berdasarkan sumber-sumber tertulis dalam bahasa Sangsakerta sebagai berikut:

Sekitar tahun 520 pada sumber-sumber tertulis bahasa Sangsakerta Kutai disebutkan "Koti" diucapkan "Jawa Koti" yang dimaksudkan bukan Jawa tetapi Kutai, yang dianggap sebagai jalur penghabisan dari pelayaran bangsa Hindu pada jaman itu.²⁾

Dr. Eisenberger menuliskan sebagai berikut:

Pada abad kelima Kutai mengalami pengaruh langsung dari India. Hal itu ternyata dari benda-benda peninggalan sejarah yang didapat di Gua Kombeng, di Kota Bangun dan di Muara Kaman. Pengaruh Hindu untuk beberapa

-
1. S.C. Knappent, *Beschrijving van de Onderaf deeling van Kutai*, Gravenhage, 1905, halaman 575
 2. S.C. Knappent, op. cit., hal. 567

generasi tidak tampak lagi. Dari beberapa prasasti yang ditemukan, ditulis ada seorang raja bernama Mulawarman, putra dari Aswawarman, cucu dari Maharaja Kudungga. Raja itu sangat kasih kepada para Berahma.³⁾

Dari Kroniek Cina, dari abad-abad pertama masehi, dikatakan bahwa orang-orang Cina berdagang ke daerah ini dan menamakannya KHO THAY artinya bahagian besar dari pulau.⁴⁾

Beralasan pada sumber-sumber autentik inilah sejarawan atau penulis-penulis sejarah, menamakan kerajaan di Kutai pada abad kelima itu "Kutai Mulawarman".

Dari tujuh buah batu bertulis ini ada dua diantaranya yang dianggap penting, yang pertama berbunyi:

1. Çrimatah crinarendrasya,
2. Kudungasya mahatmanah,
3. Putrovavarme vikhiyatah,
4. Vança karta yatham cuman,
5. Tasya putra mahatmanah,
6. Trayas traya ivayah,
7. Tesan trajana pravarah,
8. Tapo bola dananvitah,
9. Çri Mulawarman rajendro,
10. Yastra bahusuvrnakam,
11. Tasya yaqasya yupoyam,
12. Dvijedrais samprakal pita.⁵⁾

Ada pun terjemahannya sebagai berikut:

Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia, mempunyai putra yang mashur Sang Ancawarman namanya, seperti Sang Ançuman (dewa Matahari) menjadi pendiri keluarga Ançawarman,

-
3. Dr. J. Eisenberger, *Kroniek Zuider en Ooster afdeeling van Borneo*, Banjarmasin 1936, halaman 3
 4. Proyek Penelitian Kebudayaan Daerah, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 7,8
 5. *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Dep. P dan K, Proyek Penelitian Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah*, Jakarta 1978, hal. 7

mempunyai putra tiga orang yang seperti api (sinarnya) yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman raja yang besar yang berbudi baik, kuat dan kuasa yang telah mengadakan upacara korban yang disebut 20 mas amat banyak untuk memperingati upacara korban itu lah tugu itu didirikan oleh para pendeta.

Prasasti yang satunya berbunyi:

- a. Çrimato hrpmukhysya,
- b. Rajnah çri Mulavarmanah,
- c. Danam puy natame kstre,
- d. Yad dattam vaprakeçvare,
- e. Dwijatibhyo dnikalpbhyah,
- f. Vinçatir ggosahasrikan,
- g. Tasya punysya yu poyam,
- h. Krto vripair lha gataih,

Adapun terjemahannya :

Sang Mulawarman raja yang mulia dan terkenal telah mengadakan upacara korban 20.000 ekor sapi di tempat yang suci. Vaprakecwara untuk memperingati upacara korban itulah maka tugu dibuat para pendeta yang datang.

Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dari India Selatan, memakai bahasa Sangsakerta, disusun dalam bentuk syair. Prasasti itu sendiri tidak menyebut angka tahun. Perkiraan bahwa prasasti tersebut berasal dari abad ke IV masehi adalah dengan membandingkan huruf yang dipakai prasasti itu dengan huruf Pallwa sebagai yang terdapat di India yang kebetulan mempunyai angka tahun.

Menurut tulisan salah seorang keluarga turunan Sultan Kutai Kertanegara yang disusun secara ringkas berdasarkan catatan dan cerita-cerita yang dikumpulkan beliau, asal usul kerajaan Kutai Mulawarman adalah sebagai berikut.⁶⁾

6. Aji Bambang Abdurrachman, *Sedikit Kutipan Catatan Sejarah Kutai*

Pada abad ke III masehi terjadi peperangan antara kerajaan Petali putra dan kerajaan Kalingga di India. Maharaja Kalingga kalah perang, ia mundur ke tanah Malaya. Di sini ia mendirikan kerajaan baru, ibu negerinya bernama Kota Perak, rajanya yang pertama bernama Maharaja Salendra Rajendra Warman. Raja ini mempunyai tiga orang putra:

- 1). Maharaja Mulawarman Nala Dewa, yang mendirikan kerajaan Kutai I di Martapura, Muara Kaman. Inilah kerajaan Hindu pertama (yang tertua) di Indonesia dalam tahun 400 masehi.
- 2). Maharaja Gunawarman, yang kemudian mendirikan kerajaan dan menjadi raja Taruma Negara di Jawa Barat.
- 3). Maharaja Jayawarman, yang kemudian menjadi raja di Kota Perak, Champa dan Kamboja.

Pada akhir abad ke IV Sang Maharaja Mulawarman Nala Dewa pergi berkelana keluar negerinya dengan sebahagian rakyatnya dengan menggunakan perahu-perahu layarnya. Suatu hari sampailah mereka pada suatu pulau di sebelah timur nusantara ini. Pulau itu bernama Nala Dwipa (sekarang Kalimantan). Kemudian mereka memudik sungai Mahakam, berhenti di suatu tempat yang bernama Martapura. Di sini mereka mendirikan suatu kerajaan, ibukotanya diberi nama Muara Kaman dan kerajaannya dinamai Martapura.

Berdasarkan cerita inilah ada beberapa penulis sejarah daerah yang cenderung menamakan kerajaan Kutai Mulawarman itu sama dengan Kerajaan Martapura dan rajanya Mulawarman Nala Dewa.

Menurut ceritera ini, urutan raja-raja yang memerintah kerajaan Martapura ini, mulai dari Mulawarman, sebanyak 25 orang sampai kepada raja, yang penghabisan yang disebut "Tiga Raja Sekali Nobat" yaitu Maharaja Darma Setia, Maharaja Setia Guna dan Maharaja Setia Yuda. Pada permulaan abad ke XVII, Muara Kaman ibukota kerajaan Martapura dikalahkan oleh Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa (1605 –

1635) raja ke VIII dari kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri pada abad ke XIV di Kutai Lama. Sesudah raja ini, mengalahkan kerajaan Martapura atau Martadipura ia bergelar Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa Ing Martapura.

Dalam naskah silsilah Kutai yang disusun oleh Encik Muhammad Thaib, ditulis dengan aksara Arab, tahun 1284 H, sudah disebutkan nama "Martapura" yang dikaitkan dengan nama Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa. Tetapi tidak pernah dicantumkan nama Mulawarman.

Sekarang naskah itu disimpan dalam museum Kutai Mulawarman Tenggarong, tetapi beberapa lembar telah hilang termasuk lembar pertama, di sana tercantum nama pengarangnya.

C. KERAJAAN KUTAI KERTANEGARA

Sekitar abad ke-XIV, muncul pula sebuah kerajaan baru, di suatu tempat yang sekarang bernama Kutai Lama sedang nama aslinya *Tepian Batu*, tetapi dalam ceritera rakyat disebut pula *"Jahitan Layar"*. Kerajaan ini kemudian bernama kerajaan Kutai Kertanegara, dan pernah pula disebut oleh penulis sejarah lokal Kutai II, untuk membedakan dengan kerajaan Kutai Mulawarman atau kerajaan Martapura yang disebut kerajaan Kutai I.

Rajanya yang pertama ialah Aji Batara Agung Dewa Sakti. Karena letaknya yang strategis, dekat muara sungai Mahakam, tidak jauh dari Selat Makasar, ibukota kerajaan itu, ramai disinggahi oleh perahu-perahu layar, pedagang-pedagang Bugis, Makasar, Jawa, Sulu, Cina. Keadaan itu sangat menguntungkan bagi kerajaan yang baru berdiri itu dan menjadikannya maju dengan pesat.

Pada tahun 1365 di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dengan Patihnya Gajah Mada, seluruh Kalimantan menjadi wilayah kerajaan Majapahit, termasuk Pasir, Kutai dan Berau.

Untuk menjalankan pemerintahan, kerajaan Majapahit mengadakan pungutan pajak, dan dalam usaha memajukan perdagangan diadakan hubungan dengan Jawa, yang dilaksanakan oleh menteri-menteri dari Jawa dengan bantuan armada angkatan laut.⁷ Untuk melancarkan roda pemerintahan sesuai dengan politik kebijaksanaan pemerintah pusat Aji Batara Agung Dewa Sakti diundang ke Majapahit dengan kendaraannya yang bernama Lembu Suana, langsung tiba di rumah Patih Gajah Mada.⁸

Hubungan dengan kerajaan Majapahit ini masih berlangsung sampai kepada pemerintahan raja Kutai ke III yaitu Maharaja Sultan (1450 – 1500).

Maharaja Sultan raja Kutai ke III; raja ini mengunjungi Jawa di bawah pemerintahan Brawijaya, antara tahun 1468 dan 1478. Sesudah kepergiannya ke Jawa ia memakai gelar Sang Ratu.⁹

Pada waktu kunjungan Maharaja Sultan ke Majapahit, pengaruh Islam sudah mulai kuat di pesisir Utara Jawa Tengah dan Timur, seperti Gresik, Tuban, Pati, Kudus dan Demak. Di bawah pimpinan kerajaan Islam Demak, kerajaan Majapahit akhirnya hilang pengaruhnya. Pengaruh dan perkembangan Islam ini, masuk pula di kerajaan Kutai Kertanegara, sehingga pada pemerintahan raja Kutai ke IV Aji Mandarsyah, Islam telah berkembang di kerajaan Kutai (1500 – 1530).¹⁰

Di bawah pemerintahan Aji Mandarsyah Agama Islam berkembang di kerajaan Kutai oleh seorang Arab bernama *Tuan Tunggang Parangan*.

Pada pemerintahan raja Kutai ke VI raja Makuta (1565 – 1605) ajaran Islam semakin bertambah sampai ke Loa Bakung,

7. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.* halaman 3

8. Dr. C.A. Mees, *Kroniek van Koetai*, Santpoort, halaman 187

9. Dr J. Eisenberger, *op. cit.* halaman 5

10. A.L. Weddik, *Beknopt. overzicht van het Rijk Koetai*, *Indisch Archief*, I, 1, 1849, halaman 90

ke Utara sampai pulau Manubar, Sangkulirang dan ke Selatan sampai ke Balikpapan.

Hubungan dengan kerajaan Goa Sulawesi Selatan bertambah erat dengan dikirimnya seorang aulia bernama Abdul Makmur Chatib Tunggal (Dt. R. Bandang) seorang ulama berasal dari Minangkabau. Setelah beberapa lamanya ulama ini, menyebarkan agama Islam di Kutai, ca kembali ke Makasar.¹¹

Kerajaan Kutai Kertanegara, makin bertambah pengaruhnya, sesudah Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa menduduki kota Muara Kaman ibukota kerajaan Martapura. Dengan jatuhnya Muara Kaman seluruh kerajaan-kerajaan kecil di hulu sungai Mahakam, menggabungkan diri dengan kerajaan Kutai Kertanegara. Pada pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa inilah kerajaan Kutai mencapai puncak kebesarannya.

Kerajaan itu sudah mempunyai sistim pemerintahan yang ketatanegaraannya yang baik. Hal ini terbukti dengan diadakannya undang-undang yang disebut *Panji Selaten* dan undang-undang *Maharaja Nanti* atau *Beraja Niti*. Kedua undang-undang dibuat sesudah Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa dapat mempersatukan kerajaan Kutai Kertanegara dengan kerajaan Martapura di Muara Kaman.

Kerajaan diatur dengan sistem pemerintahan yang rapi, mulai dari dusun, kampung, negeri dan kerajaan. Menurut undang-undang Panji Selaten yang dinamakan kerajaan ialah yang beraja, bermenteri, berorang, berhulubalang, berhukum dengan adatnya. Yang berpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan teluk rantaunya, berpanglima dengan angkatan perbalanya.

Sedang undang-undang Beraja Niti yang mengatur hubungan rakyat dengan rakyat dalam kerajaan itu, memuat hukum-hukum baik sifatnya perdata maupun pidana, misalnya:

11. *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah*, Jakarta 1978, *op. cit.* hal. 49

Pasal 8.

Jikalau orang yang mencuri sampai sepuluh real harta yang dicurinya itu dipotong tangannya, dan jika kurang dari sepuluh real dipotong semua jarinya.

Pasal 40.

Bab ini peri hukumnya orang membagi pusaka yaitu dua bagian pada anaknya yang laki-laki dan sebagian pada anak bininya. Jika anak laki-laki semuanya sama saja bagiannya. Jika anak bininya semuanya saja bagiannya, jikalau tiada anaknya, maka hartanya dibagi tiga sebagian pada bininya dan dua lagi kepada raja, demikianlah hukumnya.

Pasal 41.

Sebermula tiga perkara anak yang tidak menerima pusaka orang tuanya atau ibu bapaknya, pertama anak yang disumpahai ibu bapaknya serta dipersaksikan pada hari Jum'at kedua anak yang membunuh ibu bapaknya, ketiga anak yang masuk agama kafir atau ke luar dari agama Islam.

Pasal 33.

Bermula segala orang yang tidak memberi zakat, karena hak Allah Taala, maka dipintanya kepadanya jika ia tiada memberi zakat, maka dia dikreasi, jika ia mati tiada bica-ranya, atas yang membunuh itu. Jika ia menurut kata maka binasakan juga harta harus diganti. Ada pun harta cacat itu orang yang memelihara mesjid itu yang mempunyai makanan zakat fitrah itu. Ada pun orang yang lapar itu seperti api makan padang yang kering.

Dari kutipan pasal-pasal undang-undang Beraja Niti dari kerajaan Kutai Kertanegara itu, banyak unsur-unsur hukum Islam yang diterapkan dan menjadi pandangan hidup rakyat Kutai pada masa itu.

D. HUBUNGAN DENGAN KERAJAAN-KERAJAAN DI NUSANTARA

1. Kerajaan Kutai Kertanegara, sangat erat hubungannya dengan kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan Gowa, Wajo dan Paneki. Pangeran Dipati Tua Ing Martapura yang disebut juga Pangeran Jembayan, kawin dengan seorang putri Makasar yang terkenal yaitu Karaeng Bontorambo pada tahun 1705¹²

Sultan Muhammad Idris alias Sultan Maslahuddin Idris (1735–1780) kawin dengan putri Aji Doya Senggeng Ri Sompacucu dari La Madukelleng Arung Matowa Wajo (1736–1754), Perkawinan dengan putri Wajo ini, melahirkan Aji Imbut yang kemudian menjadi Sultan Muslihuddin (1770–1816) yang mendirikan dan membangun Kota Tenggarong. Keturunan Sultan inilah yang menjadikan raja-raja dan bangsawan Kutai sekarang.

2. Hubungan Kutai dengan Kerajaan Pasir

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Aji Doya Senggeng Ri Sompacucu dari Pasir adalah anak dari Petta Sibangerang putra La Madukelleng. Petta Sibangerang menikah dengan seorang putri bangsawan Pasir yang bernama Anden Ajeng. Dari perkawinan inilah lahir Aji Doya Senggeng Ri Sompacucu. Karena percampuran perkawinan inilah antara kerajaan Kutai dengan rakyatnya erat hubungannya dengan kerajaan Pasir.

3. Hubungan dengan kerajaan Berau

Selagi mudanya Sultan Zainal Abidin kemakan Sultan Aji Kuning dari kerajaan Berau berkelana ke Kutai pada jaman pemerintahan Pangeran

12. E. Muhammad Tayib, *Silsilah Kerajaan Kutai Kertanegara Keraton Kutai*, 1284 N, halaman 163

Anom Panji Mendapa alias marhum Pamarangan. Dalam menghadapi bajak laut solok, Zainal Abidin memberikan bantuannya kepada kerajaan Kutai. Karena jasanya itulah ia dikawinkan dengan putri dari Pangeran Mangkubumi, cucu Marhum Pamarangan yang bernama Aji Galuh Besar. Sesudah Zainal Abidin mangkat ia terkenal dengan nama Marhum di Muara Bangun dan dikeramatkan rakyat Berau. Beliau dianggap berjasa mempertahankan Berau dari penggurap Solok, mengamankan *Baddil Kuning* alat pusaka kerajaan dan mengembangkan agama Islam.

Raja Alam Sultan Sambaliung di daerah Berau, menikah dengan Aji Nantu, putri dari Petta Pangeran dengan Aji Bungsu putri bangsawan Kutai.

Dari perhubungan perkawinan inilah terjadi hubungan yang baik dengan raja-raja Berau. Terakhir Sultan Siranuddin Sultan Gunung Tabur (1892 – 1921), menikah dengan Aji Nasibah anak Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850 – 1888), dari kerajaan Kutai.

E. PERLAWANAN TERHADAP IMPERIALISME KOLONIALISME

Di bawah pimpinan raja-rajanya yang berpandangan luas, dengan masa depan kerajaan itu, kerajaan Kutai yang termasuk kerajaan yang mempunyai daerah luas di kawasan nusantara ini, berkembang terus, serta bersahabat dengan kerajaan-kerajaan lain berdasarkan prinsip saling hormat menghormati. Kerajaan Kutai mengadakan hubungan bukan saja dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Wajo, Gowa, Berau, Singasari, Kediri dan Majapahit, tetapi juga dengan luar negeri seperti Cina, dan India, sejak jaman kerajaan Majapahit, yakni pada permulaan berdirinya kerajaan ini, bukan saja di bidang perdagangan, tetapi juga dibidang pemerintahan. Hubungan dengan

luar negeri semakin bertambah pesat, terutama sesudah pusat pemerintahan kerajaan Kutai Lama dipindahkan ke Kota Tenggarong sesama pemerintahan Sultan Muslihuddin pada tahun 1792 hubungan perdagangan diperluas dengan negara-negara Eropah, Rusia, Asia dengan prinsip saling hormat menghormati atas kedaulatan negara mereka masing-masing.

Hampir bersamaan waktu, yakni pada saat-saat kerajaan Kutai Kertanegara membenahi diri di dalam pergaulan internasional sbagai suatu kerajaan yang merdeka, negara Eropah seperti: Portugis, Belanda, Spanyol dan Inggeris, mencari daerah-daerah baru disegenap pelosok bumi ini, termasuk Belanda, melalui kompeni Hindia Timur (VOC) yang terkenal dengan pedagang yang bertongkatkan senapang.^{1 3}

Pada tahun 1634 Kompeni mengirim 3 buah kapal dagangnya ke Kutai dan Pasir, dengan bantuan kerajaan-kerajaan itu mengusir pedagang-pedagang Makasar dan Jawa.

Tentu saja maksud ini ditentang oleh raja Kutai Kertanegara karena melanggar prinsip dasar hubungam antara Kutai Kertanegara dengan kerajaan Gowa dan kerajaan di Jawa. Selain dari sikap VOC itu jelas mengadu domba raja-raja di Indonesia dan memaksakan sistim monopoli perdagangan yang merugikan pihak Kutai. Sikap dari kerajaan Kutai Kertanegara dan kerajaan Pasir ini adalah permulaan dari sejarah menentang kolonialisme Belanda.

Pada tahun 1635 VOC mengirim Gerrit Thomassen Pool ke Kutai untuk memperingatkan Kutai akan kewajibannya membayar upeti pada Banjarmasin.^{1 4}

Peringatan yang disampaikan oleh Gerrit Thomassen Pool itu tentu tidak diterima begitu saja oleh kerajaan Kutai dan Pasir. Kerajaan Kutai maklum akan taktik kotor dari VOC yaitu mengadu domba kerajaan Kutai dan Banjarmasin, seperti yang dilakukannya dengan kerajaan lain di nusantara ini.

13. Dr. J. Eisenberger, op. cit, halaman 6

14. *Ibid*, halaman 7

Raja Kutai marah kepada VOC karena sudah kedua kalinya ia mengadu domba Kutai, pertama dengan Makasar dan Jawa kedua kalinya dengan kerajaan Banjarmasin.

Pada tahun 1671 Kompeni mengirimkan pedagang senior Paulus de Beck dengan kapal Chialop de Noorman ke Kutai dan ke Berau, untuk berusaha mengadakan hubungan dagang. Di Kutai Paulus de Beck mendapatkan Pangeran Sinom Panji Mendapa Ing Martapura, tetapi tidak berhasil mengadakan hubungan dagang.¹⁵

Untuk ketiga kalinya VOC tidak berhasil membujuk Kutai dan Berau untuk mengadakan hubungan dagang, karena sikap dan tindakan mereka yang hendak memaksakan sistim monopolinya. Takut karena pemukiman baru orang Inggeris di Banjarmasin pada tahun 1747 kompeni mengirimkan ekspedisi yang terdiri dari 7 buah kapal di bawah pimpinan Van der Heyden ke sana dengan perintah untuk menghadang perahu-perahu Cina dan kemudian menuju ke Banjarmasin. Van der Heyden juga mendapat tugas, untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang Kutai dan Pasir, kerajaan-kerajaan itu dianggap baik untuk teman berdagang, tetapi untuk orang-orang Eropah sangat berbahaya untuk mencobanya.¹⁶

Di dalam laporan Van der Heyden ada dua hal yang tidak diungkapkan. Pertama Kutai dan Pasir dapat dijadikan teman berdagang yang baik, serta menguntungkan, kedua sangat berbahaya bagi orang Eropah untuk mencobanya.

Memang untuk memajukan kerajaan serta rakyatnya, kerajaan Kutai Kertanegara, sejak berdirinya telah mengadakan hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di nusantara, maupun dengan negara-negara lain di luar negeri, seperti India, Cina, Pilipina. Tetapi hubungan itu didasarkan atas saling harga menghargai dan menghormati kedaulatan masing-masing.

15. *Ibid*, halaman 13

16. *Loc. cit*

Terhadap VOC pun pernah dilakukan perdagangan pada tahun 1672 Kutai dan Pasir pernah mengirim barang-barang dagangan ke Makasar, tetapi atas perundingan bilateral yang tidak merugikan salah satu pihak. Kasus yang kedua sangat berbahaya bagi orang Eropah yang langsung mencoba sendiri dengan kapal dagangnya berhubungan sendiri dengan rakyat Kutai dan Pasir, karena tindakan itu adalah melanggar kedaulatan kedua kerajaan itu.

Jika VOC diberi kesempatan langsung berdagang dengan rakyat Kutai dan Pasir, Belanda dengan akal liciknya akan mempunyai kesempatan mengadu domba rakyat dengan pemimpin-pemimpin kerajaan itu, seperti yang dilakukannya di kerajaan Pasir.

Masalah yang penting yang menjadi pertimbangan adalah kerajaan Kutai Kertanegara adalah sekutu erat dari kerajaan Wajo yang pada waktu itu dipimpin oleh La Madukelleng Arung Matowa Wajo (1736 – 1754), seorang pahlawan Wajo yang sangat anti kepada penjajah bangsa Eropah terutama sekali terhadap VOC La Madukelleng dengan anak buahnya menguasai pelayaran di selat Makasar.

Menurut asisten residen Bone L.A. Emanuel, La Madukelleng adalah "Bajak Laut" yang paling ditakuti dengan 40 kapal perahu layar pengacau di perairan Selat Makasar.

Sedang La Madukelleng sejak umur 14 tahun jadi selama 22 tahun, tinggal menetap di Kalimantan Timur, terutama di Pasir. Tetapi selama 22 tahun ia berkelana di lautan Selat Makasar, Sulawesi, Brunai sampai ke Malaya. Sesudah kembali diangkat menjadi raja Wajo pada tahun 1736, putra-putranya Petta Turawe, Petta Sibangerang dan turunannya banyak yang menikah dengan raja Kutai, Pasir dan Berau.¹⁷⁾

Putra La Madukelleng yang ketiga ialah Petta To Siangka yang berdagang ke Sulawesi Tengah dan menurunkan raja-raja di daerah itu.

Selain dari itu La Madukelleng dibantu oleh beberapa bangsawan menengah seperti La Mohang Daeng Mangkona, yang menguasai perairan Kutai Selat Makasar, La Pallawa Daeng Marowa menguasai lautan di daerah Pasir, Puanna Dekko yang menguasai lautan di daerah Pulau Laut dan Pegatan, La Siredjo Daeng Menambong pergi ke Kalimantan Barat kawin dengan saudara raja Matan Nyai Tua, perahu-perahu layarnya menguasai lautan di pesisir pantai pulau itu, La Mandja Daerang Lebbi pergi ke Riau di kampung Penyengat dan kawin dengan saudara Bendahara raja Riau.

Dengan mempertimbangkan kekuatan kerajaan Kutai Kertanegara yang dibantu oleh pelaut-pelaut suku Bugis inilah, Van der Heyden menganggap, belum saatnya untuk mengadakan hubungan dengan kerajaan Kutai dan Pasir. Sampai pada jatuhnya VOC tahun 1799, kompeni Hindia Timur itu, tidak dapat menguasai Kutai Kertanegara dan kerajaan Pasir dan tidak seorang bangsa Eropah pun yang berani bermukim di kedua kerajaan itu. Tidak satu pun kerajaan di Kalimantan Timur yang mengadakan perjanjian persahabatan, apalagi kontrak pengakuan kedaulatan Belanda. Semua kerajaan itu, dapat mempertahankan kemerdekaannya sampai kepada masa mulai pemerintah Hindia Belanda tahun 1800.

F. PERLAWANAN SEJAK TAHUN 1800

1. Perlawanan pada tahun 1825

Pada conventie London 1814, perjanjian antara Inggris dan Belanda, Inggris menyerahkan kembali Indonesia menjadi jajahan Belanda. Pemerintah Belanda mengirimkan Komisaris Jendralnya untuk memantapkan kekuasaannya di Indonesia. Hampir seluruh pelosok tanah air, menolak kedatangan penjajah Belanda itu.

Pada tahun 1825 pemerintah Betawi mengirimkan utusannya yang bernama George Muller.¹⁸ Karena akal licik utusan Belanda itu, Sultan Salehuddin (1816 – 1845) bersedia

18. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.*, hal. 20

mengadakan perjanjian, George Muller sebagai bangsa Eropah pertama, mencoba menjelajahi dan menyelidiki kerajaan Kutai Kertanegara melalui sungai Mahakam dan jika memungkinkan meneruskan perualangannya sampai ke Pontianak di Kalimantan Barat.

Sikap dan tindakan George Muller dianggap oleh pemerintah kerajaan Kutai Kertanegara sebagai dan perbuatan yang melanggar kedaulatan dan kehormatan kerajaan. George Muller dianggap sebagai utusan sekaligus mata-mata Belanda. Oleh prajurit ia dengan pengikutnya dibunuh dekat Muara Kaman. Kapten Gravessome dengan sebagian besar anak buahnya juga dibunuh oleh prajurit kerajaan Kutai. Pemerintah Hindia Belanda, tidak dapat bertindak untuk melakukan pembalasan, karena sedang memusatkan tentaranya menghadapi perang Paderi (1821 – 1837) dengan Pangeran Diponegoro (1825 – 1830).

2. Perlawanan terhadap Inggris 1844

Sebagian dari orang-orang Inggris tidak dapat menyetujui isi dari *conventie* London. James Brooke menduduki Kalimantan Utara tahun 1826. Ia mengangkat dirinya sebagai raja Kalimantan Utara. Di antara beberapa orang Inggris ada yang mencoba menurut jejak James Brooke untuk menjadikan Kalimantan Timu seperti Kalimantan Utara. Seorang Inggris bernama John Dalton dengan secara diam-diam telah mengadakan penyelidikan di daerah Kutai. Dengan cara menetap sementara pada suatu tempat kemudian berkeliling ke tempat lain, selama sebelas bulan dari bulan Desember 1827 sampai Oktober 1828, ia dapat mengumpulkan data-data tentang keadaan kerajaan Kutai. Menurut laporannya antara lain yang dianggap penting ialah tentang kematian Mayor George Muller. Dalton berpendapat bahwa Sultan Salehuddin terlibat dalam perencanaan pembunuhan Muller.

Bagi Gubernemen tidak terlalu sukar untuk menempatkan Kutai di bawah pemerintahannya, walaupun untuk orang

Eropah sangat berbahaya dan tidak mudah bepergian di daerah ini dalam keadaan selamat. Dalton sendiri dengan susah payah melarikan diri dari daerah Kutai. Ia selamat sampai di Sulawesi.

Tujuh belas tahun kemudian seorang Inggeris bernama J. Erskine Murray mencoba mengadu untung mengikuti jejak James Brooke. Yang menjadi tujuannya ialah Kutai di Kalimantan Timur. Di Hongkong ia berhasil menyewa dua buah *brig* (sejenis perahu dagang).

Pada bulan Pebruari 1844 ia datang ke Kutai dengan sekunarnya *The Young Queen* dan *The Anna*. Sultan Salehuddin menyambut baik kedatangan orang Inggeris itu. Sultan mengharapkan dengan kedatangan J.E. Murray ini, akan membuka jalan bagi datangnya saudagar-saudagar bangsa Inggeris berdagang ke Kutai. Tetapi setelah J.E. Murray meminta sebidang tanah untuk mendirikan sebuah *factorij* (kantor dagang bagi tempat pemukiman orang Inggeris) dengan alasan melindungi pedagang-pedagang Inggeris, Sultan Salehuddin tidak dapat menyetujuinya. J.E. Murray bersikeras memaksakan kemauannya sehingga terjadilah persengketaan. Penolakan Salehuddin itu berarti menggagalkan rencana petualangan J.E. Murray untuk menguasai Kutai.

Sultan, orang-orang besar dan rakyat Kutai sangat marah atas tindakan dan sikap J.E. Murray yang sombong itu, yang dengan sengaja hendak melanggar kedaulatan kerajaan Kutai. Angkatan Perang Kutai bersiap-siap menjaga segala kemungkinan.

J.E. Murray memerintahkan kedua sekunar dagangnya mudik ke kota Tenggarong. Orang-orang Inggeris itu mengancam Sultan, akan memusnahkan kota Tenggarong, apabila Sultan tidak memenuhi permintaannya.

Sultan dan rakyat Kutai yang sebelumnya belum pernah menemui sikap orang Eropah yang sekasar itu dengan segera memerintahkan supaya menghukum orang-orang Inggeris itu dengan menembaki sekunar dagang Murray dari sebelah me-

nyebelah sungai Mahakam. Murray dapat dikalahkan J.E. Murray sendiri tewas bersama dua orang anak buahnya.

Peristiwa J.E. Murray ini, oleh W. Gave Thomas dalam buku karangannya yang berjudul *Murray Expedition to Borneo* yang diterbitkan di London pada tahun 1893 adalah sebagai berikut:

In Pebruari 1844 The Young Queen and The Anna two british trading brigs chartered and commanded by an enterprising cot name The moon, Erakine Murray arrived at Koetei on the East of Boeneo The local Sultan gave warm welcome to Murray and his companion and expressed and the hope that the re would be first of many smilar visits by british merchants but the Leader on the expedition asked permission to take up permanent residence at Koetei, in order to protect british trade, his request was premtorily refused.

This should undoubtedly have served as warning but Murray very foolisbly allowed his ships to be lured up to Mahakam river ti Tenggarong a small twon some twenty five miles from Samarinda.

The Sultan immediately stand up betteries of gims along the rivers banks to prevent their escape, Murray threaten to destory the town if not allowed to proceed, but his bluff failed and he and his men had to fight their way down the coast amid a strom of hostile fire.

There, when they had almost succeed in the gauntlet of Sultans goms, they were engaged by a large flotilla of pirates and three number's of the expeditions, including its Commanders were killed.¹⁹⁾

Peristiwa kekalahan Murray ini diketahui oleh pemerintah Inggris yang memutuskan akan mengirimkan angkatan laut-

19. *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Sejarah Daerah Kalimantan Timur*, Dep. P & K, Jakarta 1978, hal. 40, 41

nya untuk menghukum Kutai, dan menuduh bahwa pemerintah Belanda tidak mampu memelihara ketertiban dan keamanan jajahannya. Keputusan pemerintah Inggris ini diprotes oleh pemerintah Belanda. Dengan perantaraan kedutaannya di London, dikemukakannya bahwa keputusan Inggris untuk mengirimkan angkatan lautnya ke Kutai adalah bertentangan dengan Conventie London 1814 yang diperkuat dengan Tractat van London 1824. Pemerintah Belanda sendiri menyanggapi untuk menertibkan jajahannya. Kejadian-kejadian ini menyebabkan merosotnya pandangan luar negeri atas ketidak mampuannya pemerintah Hindia Belanda terhadap pelaksanaan Conventie London.

Kasus Kutai dengan terbunuhnya J.E. Murray menjadi peristiwa yang sangat penting dimata internasional, terutama bagi bangsa Inggris dan Pemerintah Hindia Belanda. Dengan selesainya perang Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol angkatan perang penjajah Belanda mulai bertindak memerangi kerajaan Kutai Kertanegara.

3. Perlawanan terhadap Belanda tahun 1844

Pada awal Pebruari 1844 pemerintah Hindia Belanda mengirimkan angkatan lautnya di bawah pimpinan Letnan satu T. Hoofd ke Kutai.²⁰) Utusan Belanda meminta supaya Sultan menanda tangani suatu contract yang isinya pengakuan Sultan terhadap kedaulatan pemerintah Belanda atas kerajaan Kutai.

Kerajaan Kutai Kertanegara yang sejak runtuhnya kerajaan Majapahit pada awal abad XV, jadi lebih dari 300 tahun, memerintah sebagai kerajaan yang merdeka, tentu tidak akan begitu mudah menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah asing, apalagi pada bangsa Belanda yang terkenal di seluruh nusantara sebagai bangsa penjajah yang kejam dan berdasarkan undang-undang *Beraja Niti* adalah orang kafir.

Permintaan Belanda itu ditolak oleh Sultan Salehuddin dengan seluruh angkatan perangnya. Dengan demikian terja-

20. Dr. J. Eisenberger, *op. cit*, halaman 26

dilah peperangan antara kerajaan Kutai Kertanegara dengan angkatan perang kerajaan Belanda. Sultan Salehuddin yang dalam tubuhnya masih mengalir darah La Madukelleng Arung Matowa Wajo pahlawan Sulawesi Selatan pada pertengahan abad ke XVIII, pantang menyerah sebelum bertempur. Armada Belanda menembaki kota Tenggarong dari kapal perang dan dari kampung Prijiwa di seberang ibukota yang sudah diduduki angkatan laut Belanda. Pada tanggal 17 April 1844 kota Tenggarong dibumi hanguskan Belanda termasuk kraton turut terbakar. Banyak pahlawan Kutai tewas dalam pertempuran yang sangat hebat itu. Rakyat Kutai dibantu oleh pejuang-pejuang Bugis Wajo yang terkenal keberaniannya.

Sultan Salehuddin memindahkan markasnya ke kota Bangun karena kraton sudah habis terbakar. Pertempuran berkurban terus, kota Tenggarong dikepung Belanda dari segenap jurusan. Serdadu-serdadu Belanda yang sudah terlatih itu serta mempergunakan alat senjata modern, bedil dan meriam jarak jauh dengan pengalaman perangnya di Jawa dan Sumatera, maju terus menggempur prajurit Kutai dan Bugis yang bertahan dengan semangat juang berkorbar-kobar mengimbangi kekuatan lawan yang mengandalkan persenjataannya. Dalam pertempuran ini dua orang putra Sultan Salehuddin yaitu: Pangeran Surya Manggala dan Pangeran Dipati, dapat ditangkap oleh Belanda. Menurut ceritera rakyat, konon seorang panglima perang Kutai bernama Awang Long yang sudah tua tewas ditimpa reruntuhan kayu ulin.

Sesudah kematian panglima perangnya dan tertangkap kedua putra Sultan Salehuddin, perlawanan prajurit diteruskan secara kecil-kecilan. Dengan akal liciknya kedua putra Sultan dijadikan sandera. Pimpinan perang Belanda mengancam putra Sultan akan dihukum, dibawa ke Betawi, jika rakyat tidak menghentikan perlawanan.

Mangkubumi kerajaan Kutai Nyi Raden Bangsa yang sudah berumur 90 tahun merasa cemas kalau-kalau kedua putra Sultan dibawa Belanda ke Betawi dan dibunuh di sana.

Oleh karena itulah Nyi Raden Bangsa mudik ke Kota Bangun bermusyawarah dengan Sultan dan orang besarnya serta sebagian menteri kerajaan berpendapat, agar untuk sementara waktu diadakan gencatan senjata. Pertama kota Tenggarong telah dibakar musuh dan prajurit banyak yang tewas. Kedua obat pasang telah habis, sedang nahoda Lembay dan Daeng Pasereg yang ditugaskan di Singapura membeli obat bedil, belum juga datang. Ketiga khawatir kedua putra akan dihukum mati oleh tentara Belanda. Kalau peperangan diteruskan lebih banyak ruginya dari pada keuntungannya. Di pihak rakyat akan lebih bertambah lagi korban yang dideritanya. Oleh karena itulah Sultan Salehuddin terpaksa ke Tenggarong mengadakan perundingan dengan wakil Gubernemen Belanda Komisaris A.L. Weddik.

Pada tanggal 11 Oktober 1844 diadakan penanda tangan perjanjian yang antara lain berbunyi sebagai berikut:²¹⁾

1. Sultan Salehuddin mengakui bahwa pemerintah Belanda adalah pemerintah tertinggi lagi sah,
2. Pemerintah kerajaan Kutai Kertanegara harus mentaati Gubernemen Belanda,
3. Pemerintah kerajaan Kutai Kertanegara berjanji akan menjaga ketertiban dan keamanan daerahnya dari gangguan perampok dan menghukumnya.

Dengan ditanda tangannya perjanjian ini, maka lenyaplah kedaulatan kerajaan Kutai sebagai suatu kerajaan merdeka.

Setelah itu Gubernemen Belanda memerintahkan Gezaghebber Van de Wall mengadakan perjalanan dari Banjarmasin ke Pasir dan Kutai dari tanggal 1 Nopember 1846 sampai 2 September 1847 untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan menyusun garis kebijaksanaan politik untuk memerintah kerajaan Kutai.

21. S.C. Knoppert, *op. cit.*, hal. 582

Beberapa bulan kemudian sesudah penanda tangan perjanjian itu Sultan Salehuddin meninggal dunia tahun 1845.

Dalam laporan perjalanan Van de Wall yang berjudul *Overzicht van het Rijk van Koetei* ditulisnya sebagai berikut:²²

11 Desember 1846

Kota Tenggarong terletak di dataran rendah. Rumah dibangun tinggi di atas tanah, sebanyak 25 buah di darat dan 97 buah rumah sakit. Penduduknya 700 orang suku Kutai, 100 orang suku Bugis dan 3 orang Cina. Dimana-mana nampak bekas-bekas kebakaran sebagai akibat peperangan. Tiang-tiang kraton kelihatan hangus akibat terbakar. Setelah peperangan itu Sultan Salehuddin meninggal dunia di Kota Bangun yang jauhnya 3 hari mudik dari Tenggarong jenazahnya dimakamkan di Tenggarong, di tempat pemakaman raja-raja dari kerajaan Kutai. Pada waktu pemakaman itu, banyak sekali rakyat dan keluarga Sultan berkumpul di Tenggarong. Pada kesempatan itulah rakyat dan keluarga Sultan dapat melihat dan terkenang kembali bekas kediaman mereka. Selesai pemakaman Sultan, rakyat kembali membangun rumah kediaman mereka di atas puing-puing reruntuhan kota Tenggarong.

Van de Wall kemudian diangkat Gubernur Belanda menjadi Asisten-Residen yang pertama di Kalimantan Timur bertempat tinggal di Palaran dekat kota Samarinda Seberang.²³ Perjanjian yang dibuat oleh A.L. Weddik tanggal 11 Oktober 1844 hanya berlaku sampai tanggal 19 Oktober 1850. Sesudah itu dibuat pula perjanjian baru oleh J.A. Gallois, residen Selatan dan Timur pulau Borneo dengan perwakilan kerajaan Kutai Kertanegara, karena Sultan Aji Muhammad Sulaiman masih di bawah umur. Pada tanggal 17

22. *Ibid*, halaman 583

23. *Loc. cit*

Juli 1863 dibuat pula kontrak baru yang ditanda tangani oleh residen Selatan dan Timur pulau Borneo Kolonel E.C.F. Happe dengan Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Pada tanggal 12 Juli 1896 dibuat perjanjian tambahan, mengenai kewajiban untuk memasukkan dan mengeluarkan, senjata dan obat bedil di kerajaan Kutai, harus mendapat ijin dari residen Selatan dan Timur pulau Borneo. Pada tanggal 16 Maret 1898 Gedr. St. 1898, 1899, 166 No. 31 dibuat pula suatu ketetapan, tentang hak Gubernemen Belanda mengusir orang-orang yang dianggap berbahaya bagi ketertiban dan keamanan umum dari kerajaan Kutai. Akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1898 ditanda tangani oleh Sultan Aji Muahmmad Sulaiman penyerahan penguasaan pelabuhan dan polisi pelabuhan kepada Gubernemen Belanda.²²⁾

Perjanjian, kontrak tambahan, pelaksanaan hak kekuasaan kepada Gubernemen adalah bertujuan untuk memantapkan penjajahan pemerintah Belanda terhadap kerajaan Kutai. Dengan tidak diijinkannya Kutai memasukkan, membeli, senjata, kerajaan Kutai tidak berkesempatan lagi untuk mengadakan perlawanan bersenjata.

Dengan adanya ketentuan dan hak Gubernemen, untuk mengusir orang-orang yang dianggap berbahaya bagi ketertiban dan keamanan umum, akibatnya tokoh-tokoh pergerakan politik atau pun partai politik tidak dapat hidup subur di kerajaan Kutai Kertanegara.

Partai politik hanya dapat hidup di daerah langsung diperintah oleh Gubernemen seperti kota Samarinda, daerah *rechtstreeks Gouvernement bestuur gebied* dari tahun 1896 – 1942. Di kota ini partai politik Parindra dan Gerindo dapat hidup dan berkembang.

Selama satu generasi yaitu pada jaman pemerintah Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850 – 1899), Gubernemen Belanda telah dapat menancapkan kukunya untuk memantapkan penjajahannya di kerajaan Kutai Kertanegara.

Tetapi di bidang ekonomi Sultan Sulaiman masih mempunyai hak untuk memungut segala cukai masuk dan keluar kerajaannya, masih dapat mengadakan hubungan dagang ke Singapura dan ke Hongkong, sehingga rata-rata pendapatannya setahun lebih kurang satu setengah juta gulden, sehingga menjadikan beliau seorang Sultan yang kaya raya.

Pada tanggal 2 Desember 1899 Sultan Aji Muhammad Sulaiman meninggal dunia. Putranya Aji Muhammad Alimuddin Al Adil Khalifatul Mukminin dengan Surat Keputusan Gubernemen tanggal 22 Maret 1900 No. 9 diakui Gubernemen sebagai Sultan.

Dengan Sultan yang baru ini Gubernemen Belanda mulai mengadakan perjanjian yang menguntungkan di bidang keuangan. Pada tanggal 25 Juli 1900 Geds. St 2 de Kamer St Gen 1900 — 1901, 169 No. 6 ditanda tangani contract penyerahan hak dari kerajaan Kutai kepada Gubernemen Belanda tentang:

- a. Hak pemungutan cukai barang masuk dan ke luar dari kerajaan Kutai Kertanegara.
- b. Hak untuk memasukkan dan menjual candu di kerajaan itu
- c. Hak untuk memasukkan dan menjual garam
- d. Hak untuk menghapuskan cukai di Tenggarong
- e. Dan lain-lain.

Dengan penghapusan pemungutan cukai dan penyerahan kepada Gubernemen, dan hak-hak lain seperti tersebut di atas, Sultan Muhammad Alimuddin, mendapat ganti rugi dengan pemberian gaji cukai tambang minyak, ganti kerugian pemungutan cukai, dan lain-lain sejumlah F. 622.900 (Enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus gulden), setahun.

Demikian pula menteri kerajaan Kutai Kertanegara mendapat gaji yang cukup besar dari kerajaan Kutai.

Pada tanggal 28 April 1910 Sultan Muhammad Alimuddin meninggal dunia. Karena Pangeran Adipati Anom Soeria putra mahkota masih di bawah umur dengan Surat Keputusan Gubernemen tanggal 26 September 1911 no. 17 diangkat Pangeran Mangku Negorosebagai *Regent van Koetei*.

Sesudah Pangeran Adipati Anom Soeria Adiningrat akil baliq berdasarkan Surat Keputusan Gubernemen tanggal 14 Nopember 1920 diangkat menjadi Sultan Muhammad Parikesit dari kerajaan Kutai Kertanegara; Gaji dan pendapatan lain diterima dari Kes kerajaan f. 322.900 (Tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus gulden), setahun. Dengan Sultan penghabisan ini dibuat pula suatu perjanjian yang disebut *Zelfbestuur regelen Staatsblad 1930* no. 529 di Samarinda isinya mengenai sistem pemerintahan untuk kepentingan Belanda.

Dengan politik penjajahannya yang licik dan memberikan fasilitas yang menyenangkan, Gubernemen Belanda dapat menjinakkan Sultan-sultan dengan orang besarnya, sehingga sesudah Sultan Salehuddin meninggal dunia tidak ada lagi perlawanan bersenjata dari kerajaan Kutai Kertanegara. Perjanjian dan kontrak yang mengikat raja-raja itu, menyebabkan rakyat tidak dapat bergerak untuk mengadakan perlawanan baik dengan senjata maupun melalui bidang politik. Betapa kuatnya ikatan dan cengkeraman Belanda terhadap kerajaan Kutai, sehingga kerajaan Kutai tak dapat bergerak apa-apa kecuali memilih alternatif, mentaati perjanjian demi perjanjian yang telah ditanda tangani.

Keadaan ini berlangsung terus sampai masuknya tentara Jepang tahun 1942. Pada masa awal pemerintahan imperialisme Jepang, rakyat Kalimantan Timur menunjukkan simpatinya, khususnya di daerah Kutai terutama dengan semboyan tiga A-nya. Tetapi setelah Jepang menunjukkan sikap yang bertentangan dengan janjinya, maka sikap rakyat pun membalik menjadi antipati.

Saat-saat Jepang menghadapi kehancurannya, rakyat Muara Muntai di hulu Mahakam mempunyai kesempatan un-

tuk mengadakan perlawanan dengan membunuh beberapa orang tentara Jepang.

4. Akibat Perlawanan Rakyat di Kerajaan Kutai Terhadap Imperialisme Kolonialisme

Politik

1. Kerajaan Kutai tidak dapat berbuat sebagai suatu kerajaan yang berdaulat penuh dengan telah ditanda tangani perjanjian yang mengakui kedaulatan Belanda atas kerajaan Kutai
2. Keadaan sebagaimana punt 1, memberikan peluang besar kepada penjajah, untuk mengadakan suatu peraturan yang menguntungkan baginya.
3. Pemecahan wilayah kerajaan Kutai menjadi dua pola pemerintahan, yaitu daerah yang langsung dikuasai oleh Belanda disebut (*rechtstreeksbestuurgebied*) dan daerah di bawah kekuasaan kerajaan Kutai (*Zelfsbestuurgebied*).

Sosial Ekonomi

1. Monopoli perdagangan oleh Belanda.
2. Kerajaan Kutai tidak boleh melakukan hubungan dagang legal/ilegal dengan luar negeri kecuali Belanda.
3. Keadaan ekonomi rakyat tertekan.

G. PERLAWANAN RAKYAT SAMARINDA

1. Lahir dan Berkembangnya Kota Samarinda

Meskipun Samarinda, dahulu adalah bagian dari kerajaan Kutai, namun perlu disoroti secara khusus karena kegiatan partai-partai di sana relatif lebih leluasa dari pada di wilayah kerajaan Kutai sendiri seperti di ibukota Tenggarong.

Hal ini dapat kita baca dari *Suppletoire Centracketen* antara Sultan Aji Muhammad Sulaiman dengan pemerintah Hindia Belanda.

Pada tanggal 16 Maret 1898 karena haknya pemerintah Hindia Belanda dapat mengusir ke luar kerajaan Kutai orang-orang yang dianggap berbahaya bagi ketertiban umum dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Kotamadya Samarinda sekarang yang wilayahnya seluas 2727 km² ²⁴⁾ dan terbelah oleh sungai Mahakam. Sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Timur berasal dari sebuah desa kecil yang didirikan oleh pengungsi-pengungsi suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Desa itu bernama Samarinda dan sekarang menjadi Samarinda Seberang.

Sampai sekarang Samarinda Seberang penduduknya terutama terdiri suku Bugis. Di bagian kota yang bernama Samarinda, penghuninya terutama suku Banjar. Namun banyak pula suku Kutai, Jawa, Madura, Makasar, dan lain-lain. Perdagangan antar pulau apalagi ekspor impor ada di tangan orang-orang Cina.

Bagian sungai Mahakam yang membelah kedua bagian kota Samarinda lebih lebar dari bagian sungai Mahakam lainnya, sehingga mudah bagi kapal-kapal besar berlabuh di sana.

Yang dinamakan Samarinda asal mulanya hanyalah bagian kota yang sekarang bernama Samarinda Seberang. Seperti telah disebutkan di atas penduduk Samarinda Seberang itu terutama orang-orang Bugis yang pindah dari tempat asalnya Sulawesi Selatan.

Mengapa mereka pindah ke tempat yang sekarang bernama Samarinda Seberang?

Pada tahun 1710 suatu perkawinan agung akan dilaksanakan antara putra Mahkota kerajaan Gowa dan Tallo (Makasar) dengan putri raja Bone. Dalam kesibukan penyelenggaraan perkawinan agung terbit kerusuhan yang berpangkal pada matinya anak Mattola Bone atau bangsawan tinggi tersebut diti-

24. BAPPEDA Tingkat I, Kalimantan Timur, *Kalimantan Timur dalam angka*, Samarinda, 1982 halaman 5.

kam oleh La Madukelleng putra Arung Paneki dari kerajaan Wajo (Sengkang).

Peristiwa tersebut terjadi pada waktu acara menyabung ayam dalam suatu gelanggang khusus di depan Istana raja Bone. Pada jaman itu adalah umum bila ada perhelatan besar, terutama perkawinan raja-raja, maka dipancarkanlah gelanggang sabung ayam. Para penonton terutama raja-raja, mengikutinya dengan taruhan yang besar.

Pada upacara perkawinan agung tersebut raja Bone mengundang raja-raja tetangganya, termasuk juga raja Wajo. Raja Wajo yang mengutus putra dari Paneki yaitu anak Petta Cakkuridi. Petta Cakkuridi ini adalah anggota pemerintahan kerajaan Wajo (menteri) tetapi beliau juga Arung dari Paneki.

Beberapa hari menjelang perkawinan agung berlangsung, raja-raja yang diundang ikut bermain menyabung ayam dengan taruhan tersebut.

Perutusan kerajaan Wajo terdiri dari 28 orang putra-putra bangsawan Wajo dikepalai oleh La Madukelleng. Rombongan ini tak mau ketinggalan ikut menyabung. Namun malang bagi rombongan utusan Wajo tersebut, ayam mereka kalah dan mati. Para penonton dalam gelanggang tersebut bersorak sorai, bahkan ada yang mengejek dan mencemoohkan utusan Wajo tersebut dengan kata-kata yang menyakitkan hati.

La Madukelleng yang duduk berdampingan dengan putra Makadangngi Tana kerajaan Bone (bangsawan tinggi Bone), merasa tersinggung karena mendengar kata-kata penghinaan yang di luar tatacara menyabung ayam yang lazim menurut adat terus menghunus kerisnya dan menikamnya kepada Makadangngi Tana kerajaan Bone yang duduk didekatnya, putra bangsawan Bone tersebut tersungkur dan meninggal di tempat itu juga.

Dalam suasana keributan yang terjadi dihadapan sauraja Bone (istana) itu, La Madukelleng beserta pengikut-pengikutnya meninggalkan gelanggang penyabungan dengan menung-

gang kuda terus pulang menuju negeri Wajo. Lima hari kemudian datang perutusan kerajaan Bone ke Wajo, perutusan itu langsung menghadap raja Bone yang sudah tua renta berumur 90 tahun, Petta Arung Ma Towa Ra Salengeng Ta Tenri Puajung. Mereka menuntut agar La Madukelleng beserta rombongannya diserahkan agar dapat diadili dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut bukan saja telah menyebabkan matinya putra seorang bangsawan tinggi, tetapi telah mencemarkan Majelis raja Bone dan menodai Sauraja Bone.

Tuntutan raja Bone tersebut disertai ancaman apabila La Madukelleng serta anggota rombongannya tidak diserahkan untuk diadili di Bone, atau mayatnya sekalipun maka daerah Tancung dan Impa Kimpa yang merupakan bagian kerajaan Wajo akan diduduki dan dinyatakan sebagai milik kerajaan Bone.

Tuntutan itu dijawab oleh raja Wajo Petta Arung Matowa La Salengeng Tenri Rua dengan penuh bijaksana. Baginda meminta waktu sehari semalam untuk mengadakan sidang Dewan kerajaan lebih dahulu. Perutusan Bone kembali dan menunggu jawaban Wajo di perbatasan kerajaan.

Raja Wajo mengundang menteri-menterinya yang disebut Arung Ennengnge yang terdiri dari:²⁵

- a. *Petta Ranreng Betteng Pala* = Perdana Menteri merangkap Kehakiman dan Keamanan;
- b. *Petta Ranreng I Tua* = Menteri dalam Negeri;
- c. *Petta Ranreng Salo Tenreng* = Menteri Keuangan dan Per-ekonomian;
- d. *Petta Cakkuridi* = Menteri Luar Negeri;
- e. *Petta Pilla* = Menteri Pertanian;
- f. *Petta Pattola* = Menteri Pertahanan;

dan 3 orang penasihat agung yang disebut *Arung Suro Ri Basa*.

25. Moh. Noor, *Lontara Samarinda*, saduran tidak dipublikasikan, Samarinda, 1964, halaman 1

Dalam rapat kerajaan (*aduppa rapang*) setelah terjadi perdebatan, maka diputuskan sesuai dengan hukum adat kerajaan Wajo, tidak diperkenankan raja menyerahkan penduduknya pada kerajaan lain untuk diadili dan dihukum.

Kerajaan Wajo sendiri tidak akan menjatuhkan hukuman kepada La Madukelleng. Sebabnya adalah kelalaian dan kesalahannya aparat kerajaan Bone sendiri tidak dapat menangkapnya atau membunuhnya sekali pun pada waktu terjadinya insiden tersebut. Dalam peristiwa tersebut La Madukelleng dianggap sudah mati. Maka tidaklah mungkin menghukum orang yang sudah mati.

Keputusan sidang kerajaan Bone tersebut disampaikan kepada perutusan kerajaan Bone yang menunggu di perbatasan. Sekembalinya perutusan kerajaan Wajo tersebut, maka tentara kerajaan Bone pun bergerak memasuki daerah Wajo. Tentara kerajaan Wajo sendiri dipersiapkan menyongsong tentara Bone ke perbatasan kerajaan.

Tentara kerajaan Wajo bukanlah imbalan tentara Bone yang kuat dan besar jumlahnya. Namun karena Dewan kerajaan Wajo telah mengeluarkan putusan yang bunyinya sebagai berikut:²⁶

"Amomuna maiwa tedokeppang makarana pura napuelo ade pura anrona Wajo, tampedding riappisonangata pa'banuana Wajo, nakarana nateppa elo datu wanua seliwenna Wajo".

"Meskipun kita melawan laksana kerbau pincang tetapi kita mempertahankan undang-undang dasar kerajaan Wajo yang mempertahankan tidak menyerahkan rakyatnya pada kerajaan lain yang menggagahinya."

Maka terjadilah pertempuran ketika kedua pasukan kerajaan itu bertemu. Karena jumlahnya yang lebih besar dan

26. *Ibid*, halaman 2

pengalaman berperang maka tentara Bone makin lama makin maju ke dalam wilayah Wajo.

La Madukelleng serta ketiga anaknya, masing-masing bernama:

Petta To Si Berangeng, Petta To Rawe, Petta To Siangka.
dengan disertai 8 orang bangsawan menengah yaitu:

- 1). La Mohang Daeng Mangkona,
- 2). La Pallawa Daeng Marowa,
- 3). Puanna Dekke',
- 4). La Siraj' Daeng Menambong,
- 5). La Mandja' Daeng Lebbi',
- 6). Puanna Tereng,
- 7). La Sawedi Daeng Sagala,
- 8). La Manrapi' Daeng Punggawa.⁴⁾

dengan keputusan Dewan kerajaan Bone meninggalkan kerajaan Wajo dan ke luar pulau Sulawesi. Mereka disertai oleh 200 orang dalam 4 buah perahu layar. Tujuan mereka semula ialah ke wilayah kerajaan Kutai. Namun karena kehabisan perbekalan terutama air minum, armada La Madukelleng ini membuang sauh di Muara Pasir (sebuah tempat di Kabupaten Pasir sekarang).²⁷⁾ ✱

Di Muara Pasir mereka membuat perkampungan sambil menangkap ikan. Pekerjaan ini merupakan keahlian mereka. Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan hidup.

Kira-kira sebulan kemudian berdatanganlah orang-orang Wajo dan Soppeng dengan jumlah ribuan jiwa. Mereka membawa kabar bahwa kerajaan Wajo sudah dikalahkan oleh Bone. Rakyat Wajo diperintahkan untuk kerja paksa yang sangat berat oleh pembesar-pembesar Bone. Karena mereka tidak tahan, maka mereka melarikan diri. Raja Wajo yang sudah lanjut usianya itu tetap sebagai raja tawanan.

27. *Loc. cit.*

Dengan makin banyaknya pengungsi yang datang ke Muara Pasir, mengakibatkan makin sukarnya penghidupan sehari-hari maka La Madukelleng mengadakan musyawarah besar yang disebut *Aduppa rappang*. Melihat makin sempitnya tanah pertanian di sekeliling Muara Pasir itu maka diputuskan, bahwa pemukiman mereka harus dipencarkan mencari daerah-daerah yang masih luas memungkinkan untuk berusaha. Dalam sidang itu disepakati:²⁸

- a). La Mohang Daeng Mangkona disuruh pergi ke Kutai. Pada masa itu kerajaan Kutai diperintah oleh Pangeran Dipati Mojikusumo yang setelah wafat bergelar (Marhum Pamanayan);
- b). La Pallawa Daeng Marowa tetap di Muara Pasir. Keturunannya kemudian mengadakan perkawinan dengan raja-raja Pasir;
- c). Puanna Dekke pergi ke Tanah Bumbu (Kalimantan Tenggara) dan mendirikan kampung di sana. Kampung tersebut dinamai Kampung Baru, tetapi kemudian diganti dengan Pegatan;
- d). La Sira Daeng Menambong ke Kalimantan Barat kawin dengan saudara raja Matan kemudian mendirikan kerajaan Mempawah;
- e). La Manja' Daeng Lebbi' pergi ke Rian;
- f). Puanna Tereng dan La Sawedi Daeng Sagala tetap di Muara Pasir;
- g). La Manrapi Daeng Punggawa berdagang antar pulau yaitu dari Kutai, Pasir dan kota-kota di Jawa.

Anak-anak La Madukelleng sendiri yaitu: Petta To Sibirangeng, Petta To Siangka dan Petta To Rawe tidaklah berkumpul semuanya di Muara Pasir.

Petta To Sibirangeng kawin dengan putri raja Pasir yang bernama Anden Ajang. Dari perkawinan ini lahirlah seorang

28. Moh. Noor, *op. cit.*, hal. 3

putri yang dinamai I Sengong Daeng Sirompa atau Aji Doja putri Agung. Putri ini kelak bersuamikan Sultan Muhammad Idris dari kerajaan Kutai Kertanegara.

Petta To Siangka, pergi berdagang ke Sulawesi Tengah dan kawin di sana. Keturunannya kelak menjadi raja-raja Donggala, Banawa, Tawaili dan lain-lain.

Petta Torawe tidak menetap di suatu tempat ia selalu mengembara disertai pengiringnya yang 250 orang jumlahnya. Mereka sambil merampok dengan menggunakan armada yang terdiri delapan buah perahu layar.²⁹ Dalam pengembaraan perampokan ini ia pernah menyerang daerah Malinau dan mpmawan raja Tidung yang bergelar Panglima Muda. Kemudian mereka masuk ke Berau dan menjalin persahabatan dengan Sultan Sambaliung untuk menghadapi perampok-perampok dari Sulu.

La Moha Daeng Mangkona yang diperintahkan ke daerah Kutai oleh La Madukelleng, diterima oleh raja Kutai Lama yang merupakan pusat kerajaan Kutai Kertanegara.

Pada tahun 1700 La Moha Daeng Mangkona pindah ke arah udik sungai Mahakam yang kemudian dinamai Samarinda. Ia mengepali orang-orang Bugis. Mereka bertempat tinggal pada rumah-rumah yang dibangun di atas rakit-rakit. Ia diijinkan mendirikan pemerintahan sendiri semacam Republik. Yang menjadi kepala pemerintahan ialah La Mogang Daeng Mangkona sendiri, dengan gelar Pua Ado'.

Tahun 1703,³⁰ Pua Ado' pertama La Mohang Daeng Mangkona, mendirikan pemukiman di dataran yang menjadi Samarinda Seberang sekarang. Semua orang Bugis tadinya tinggal di rakit diperintahkan membangun rumah di darat.³¹ Raja Kutai yang memberikan daerah Samarinda kepada La

29. *Loc. cit.*

30. Moh. Noor, *op. cit.* hal. 4.

31. Sebagian besar orang berpendapat bahwa karena melihat tanah yang datar, daerah itu dinamai *Samarendah* akhirnya Samarinda.

Mohang Daeng Mangkona ialah Pangeran Dipati Mojokusumo (Marhum Pamarangan). Tanah itu diberikan dengan perjanjian bahwa orang-orang Bugis itu setia kepada raja Kutai dan apabila terjadi serangan terhadap Kutai yang datang dari muara Mahakam maka menjadi tanggung jawab orang-orang Bugis untuk memerangnya.

Pua Ado' La Mohang Daeng Mangkona yang tidak lain adalah saudara dari isteri La Madukelleng, berusaha sekuat tenaga agar Samarinda berkembang menjadi pelabuhan yang ramai. Karena itu berdagang ke Tanah Ulu (pedalaman Mahakam) diberikan pula kepada orang Bugis maka mereka membuat pos-pos tempat berdagang di kampung-kampung Long Iram Melak, Muara Pahu, Kota Bangun, Tabang, Muara Wahau, Muara Ancalong dan Tenggarong. Hasil bumi yang terkumpul seperti damar, rotan, jelutung dan lain-lain, dibawa dan dikumpulkan di Samarinda dan selanjutnya dibawa dengan perahu layar ke Surabaya dan Singapura. Kapal-kapal dari Singapura pun datang ke Samarinda dan pedagang-pedagang besar bangsa Cina Singapura itu menempatkan perwakilannya di Samarinda seperti Gowan Hi dan Ban Seng.³²

Kota Samarinda diperintah oleh Pua Ado' (yang karena berjanji setia kepada Kutai pengangkatannya dengan persetujuan raja Kutai) didampingi oleh sebuah Majelis bernama Ade' Lompo yang anggotanya 15 orang dan 3 orang penasihat yang disebut Matowa Ri Bate.

Pada tahun 1730 Samarinda dibagi menjadi lima kampung yaitu: Kampung Dagang, Kampung Wajo, Kampung Baru, Kampung Polewali dan Kampung Pada E Lo'. Tiap kampung diperintah oleh seorang Kapitan didampingi oleh seorang Panglima dan seorang Anderi Guru.

2. Perlawanan Dalam Abad ke-XIX

Janji setia orang-orang Bugis penduduk Samarinda dengan kepala pemerintahannya Pua Ado' La Mohang Daeng Mang-

32. *Loc. cit.*, halaman 4

kona dipatuhinya. Begitu pula Pua Ado'Pua Ado'penggantinya kemudian.

Kesetiaan ini terlihat ketika penyerangan perampok-perampok Solok (Pilipina) di ibukota Kutai, Pamarangan. Dalam peristiwa itu tentara Bugis membantu Kutai sehingga perampok Solok tersebut dapat dikalahkan.

Pada tahun 1844 sebuah armada Inggeris di bawah pimpinan Erskine Murry menyerang Tenggarong yang menjadi ibukota kerajaan Kutai sejak tahun 1781.

Pertempuran ini terkenal dengan nama perang Maris. Orang-orang Bugis dari Samarinda bahu membahu dengan tentara Kutai menghadapi serangan itu. Karena menemui kesukaran dalam hubungan pemerintahan Belanda dengan kerajaan Kutai maka pada tahun 1846 seorang asisten residen di Palaran.³³ Namun karena tempat tersebut kurang baik letaknya maka dibukalah pemukiman bar di daerah Samarinda berseberangan dengan Samarinda Seberang tempat pemukiman orang-orang Bugis.

Pada tahun 1870 diusahakan memindahkan pusat pemerintahan ke Samarinda. Di Samarinda dibuka daerah pemukiman, jalan-jalan dan pelabuhan.

Samarinda yang dibuka Belanda untuk menandingi Samarinda Seberang makin lama makin berkembang menjadi tempat yang ramai. Apalagi pelabuhannya baik letaknya. Orang-orang Banjar yang datang dari Kalimantan Selatan bermukim di sana. Mereka giat dibidang pertanian dan perdagangan.

Pada tanggal 16 Agustus 1896 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belandanomor 75 yang menetapkan, bahwa daerah yang bernama *Vierkante Paal* itu ialah lahan yang terletak antara sungai Karang Asam Besar di ulu dan sungai Karang Munus di hilir. Surat Keputusan itu di-

33. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.* hal. 3

tanda tangani oleh Sekretaris Jenderal ADH Heringa.³⁴ Kedu-
dukan asisten residen dipindahkan ke Samarinda.

Demikianlah Samarinda makin berkembang menjadi
pusat pemerintahan dan pusat perdagangan.

Surat Keputusan tersebut diperbaharui kembali dengan
Surat Keputusan Gubernur Jenderal nomor 25 tanggal 28
April 1903 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal CB
Nederberg.³⁵ Dengan keputusan tersebut, maka wilayah
Vierkante Paal lebih luas lagi yaitu antara sungai Karang
Asam Besar dengan sungai Kerbau dengan 800 meter ke dalam
menurut alur sungai Mahakam.

Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tersebut
maka Samarinda dengan batas-batas seperti tersebut di dalam
surat keputusan tersebut berada langsung dalam kekuasaan
pemerintah Hindia Belanda.

Keadaan itu tidak berubah sampai kedatangan Jepang
pada tahun 1942. Mengenai pergerakan rakyat, praktis lebih
bebas bergerak di Samarinda dari pada di wilayah kerajaan
Kutai sendiri seperti ibukotanya Tenggarong. Sebab itu perla-
wanan rakyat di kota Samarinda dalam bentuk pergerakan
rakyat tidaklah dapat diabaikan.

3. Perlawanan pada Jaman Pergerakan Rakyat (1918 – 1942)

Pergerakan rakyat yang tumbuh pada awal abad 20 ter-
utama di Jawa berpengaruh juga sampai ke Kalimantan Timur.
Semangat untuk merdeka dan memiliki negara sendiri telah
tumbuh di dalam masyarakat terutama di kalangan orang-
orang yang sudah mengenyam pendidikan baik pendidikan
Barat mau pun pendidikan Islam. Sebab itu maka semangat
kemerdekaan yang tumbuh dan berkembang di Jawa itu de-

34. Dahlan Sjahrani, *Samarinda dengan perkembangan Dakwah Islam*; Samarinda
1981, hal. 4

35. *Ibid*, halaman 4

ngan mudah tumbuhnya di Kalimantan Timur terutama di Samarinda. Semangat kebangkitan nasional dalam jiwa masyarakat Kalimantan Timur mendapat penyalurannya dalam bentuk organisasi-organisasi politik antara lain:³⁶

a. **Sarikat Islam**

Dalam tahun 1917 berdirilah di Samarinda Sarikat Islam (SI). Anggota pengurusnya antara lain: H. Abd. Manap, M. Yusuf Arief, Kamaluddin dan Y.M. Halid. Seorang anggota pengurusnya yaitu, Y.M. Halid pernah diutus ke Jawa untuk menghubungi H.O.S. Tjokroaminoto (Ketua Umum SI).³⁷

Sarikat Islam dalam pengembangan organisasinya membentuk pula *Young Mohammadan* (YM) yaitu bagian penudanya. Organisasi pemuda Sarikat Islam giat dalam bidang olah raga dan kesenian terutama musik. Di samping itu mereka giat mendidik anggota dalam memperdalam agama Islam.

Untuk membiayai organisasi, Sarikat Islam mendirikan sebuah toko yang diberi nama *Sarikat Dagang Islam*. Toko ini dibuka untuk umum.

Pernah pula diselenggarakan pasar malam yang pendapatannya dipergunakan untuk membangun gedung Sarikat Islam yang sampai sekarang masih berdiri di jalan Panglima Batur, Samarinda.

b. **Muhammadiyah**

Muhammadiyah didirikan di Samarinda pada tahun 1927. Anggota pengurusnya antara lain: H. Abd. Manap dan M. Siddik. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang tidak berpolitik, giat dalam bidang agama dan sosial serta pendidikan.³⁸

36. Drs. Sjahbandi dkk, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur*, Jakarta, 1928, hal. 26

37. *Ibid*, hal. 27

38. *Ibid*, halaman 28

Sebagai wadah pembentukan kader organisasi dibentuk kepanduan *Hizbul Wathon* (H.W.). Muhammadiyah pernah pula mengumpulkan dana dengan menyelenggarakan pasar malam amal seperti yang dilakukan Sarikat Islam.

Muhammadiyah giat pula menyebarkan ajarannya yang merupakan pembaharuan dalam melaksanakan ibadah agama Islam. Dalam mulut rakyat disebut *Kaum Muda*. Namun karena pada umumnya rakyat belum dapat menerima paham baru tersebut, maka perkembangan Muhammadiyah sangat lambat.

c. Nahdlatul Ulama

Organisasi yang berdasarkan agama Islam juga, yaitu Nahdlatul Ulama membuka cabangnya di Samarinda pada awal tahun 1925 pula.³⁹ Pengurus cabang tersebut antara lain terdiri dari: H. Abdussamad dan Abd. Madjid. Kemudian pengurus dipercauakan kepada K.H. Abdullah Marisi, H. Ismail dan H. Abd. Gani.

Nahdlatul Ulama juga mempunyai organisasi kepanduan yang bernama *Anshor*. Dalam agama, Nahdlatul Ulama melaksanakan ibadah secara tradisional yang biasa disebut aliran *Kaum Tua*.⁴⁰ Karena ajaran-ajarannya tidak bertentangan dengan pengetahuan agama rakyat yang sudah ada dan beberapa tradisi yang hidup di kalangan rakyat tetap lestari maka dengan cepat Nahdlatul Ulama dapat merebut hati rakyat.

d. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI)

Dalam tahun 1933 sekelompok pemuda yang berjiwa kebangsaan berusaha mendirikan cabang PBI di Samarinda. Pelopornya seorang yang datang dari Kota Baru, Pulau Laut, (Kalimantan Selatan) bernama Horas Siregar. Ia menjadi pemimpin redaksi dan penanggung jawab sebuah surat kabar mingguan yang bernama *Panggilan Waktu*.

39. *Loc. cit.*

40. *Loc. cit.*

Karena koran ini selalu menerompatkan suara-suara keras yang bernada non-kooperasi, pemerintah Hindia Belanda selalu waspada dan bertindak cepat agar suara-suara non-kooperasi tersebut tidak meluas. Akibatnya H. Siregar selalu berurusan dengan polisi.

PBI adalah partai yang mau bekerja sama atau, kooperator.⁴¹

e. **Partai Indonesia Raya (Parindra)**

Pada tahun 1934 salah seorang tokoh PBI di Kota Baru (Kalimantan Selatan) pindah ke Samarinda yaitu Rustam Effendi.⁴² Pengurus cabang PBI di Samarinda direorganisasi. Rustam Effendi duduk sebagai Ketua, Wakil Ketua adalah Achmad Noor (sebelumnya Sekretaris). Dalam tahun 1934 itu M. Rasyad bekas anggota Partindo Surabaya pindah ke Samarinda. Ia menggabungkan diri dengan PBI. PBI cabang Samarinda makin bersemangat, anggotanya makin bertambah.

Dalam tahun 1935 PBI dilebur dengan beberapa organisasi lainnya menjadi Partai Indonesia Raya sejalan dengan kebijaksanaan pengurus pusat PBI di Jakarta. Pengurus cabang Parindra Samarinda disusun kembali. Ketuanya tetap Rustam Effendi (Ketua PBI) dan wakil ketuanya H. Arief Rachim sedang Achmad Noor kembali menjadi Sekretaris.

Sebagai wadah pembentukan kader dibuka Gerakan Kepanduan *Suryo Wirawan*. Parindra giat pula di bidang pendidikan, antara lain membuka kursus pemberantasan buta huruf dan pendidikan politik. Pada tahun 1936 didirikan pula *Menhak School* setingkat HIS untuk menyaingi sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda.

M. Hoesni Thamrin, anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat), salah seorang pengurus besar Parindra berkunjung ke Kalimantan Timur pada tahun 1937. Sehubungan dengan itu diadakan

41. *Ibid*, halaman 40

42. *Ibid*, halaman 50

rapat di Balikpapan dan Samarinda. Parindra makin berkembang dan pegawai negeri ada yang berani memasukinya.

Supir-supir bangsa Indonesia bergabung dalam organisasi *Bond Indonesische Chouffeurs* (BIC) yang menjadi *onderbouw* Parindra.⁴³

Pada tahun 1939, seorang anggota Suryo Wirawan, Bustani Hs, turut berbicara pada rapat umum yang diselenggarakan Parindra di Sangkulirang. Karena pidatonya berapi-api, Bustani Hs terkena *Spreekdelict* dan dituduh melanggar pasal 153 bis dan ter. Pada bulan Januari 1940, Bustani Hs ditangkap di Samarinda. Ia diajukan ke Pengadilan, dalam sidangnya tanggal 14 Mei 1940.⁴⁴ Bustani Hs dijatuhi hukuman penjara 2 tahun yang harus dijalannya di Nusakambangan.

f. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Pemimpin-pemimpin di Jawa yang kurang puas terhadap Parindra, pada tahun 1937 mendirikan partai baru bernama *Gerakan Rakyat Indonesia* (Gerindo). Para pemimpinnya antara lain: Mr. Moh. Yamin, Mr. Amir Sjarifuddin, Dr. A.K. Gani, Sarmidi Mangunsarkoro.⁴⁵

Pada tahun 1937 itu juga berdiri cabang Gerindo di Samarinda atas prakarsa Aswin Toyo, Ishak Sani, Oemar Dahlan dan M. Djunaedi. Meskipun Gerindo bersifat koperator? Namun lebih revolusioner dibandingkan dengan Parindra.

Karena sifatnya yang lebih tegas itu maka hampir tidak ada pegawai negeri yang menjadi anggota Gerindo.

Pada tahun 1938, Dr. A.K. Gani ketua besar Gerindo berkunjung ke Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu diadakan rapat umum di Balikpapan dan Samarinda.⁴⁶ Dalam

43. *Ibid*, halaman 53

44. *Ibid*, halaman 54

45. Drs. Soeroto, *Indonesia di tengah-tengah Dunia dari abad ke abad*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1961, halaman 56

46. Drs. Syahbandi dkk, *op. cit*, halaman 56

tahun 1939 salah seorang anggota pengurus besar Gerindo lainnya berkunjung ke Kalimantan Timur.

Meskipun penjagaan polisi Belanda baik selama di jalan mau pun di penginapan, mengingat keadaan kritis menjelang pecahnya Perang Dunia II, namun rapat-rapat umum di Samarinda dan Balikpapan itu berhasil juga.

g. **Penyadar**

Karena perbedaan pendapat tentang siasat perjuangan di kalangan Partai Sarikat Islam Indonsia maka sebagian anggota pengurusnya besarnya mendirikan partai baru yang dinamai *Penyadar*. Pada tahun 1939, tumbuhlah cabang *Penyadar* di Kalimantan Timur. Salah seorang ialah A.M. Sangaji.⁴⁷ Beliau ini pemimpin lama Sarikat Islam yang tinggal di Tenggarong (Kabupaten Kutai sekarang) pada tahun 1917 sampai awal tahun dua puluhan. Beliau diusir dari Kutai karena perjanjian antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan Sultan Kutai Aji Muhammad Sulaiman seperti tertulis pada awal karangan ini.

A.M. Sangaji tinggal di Samarinda karena lebih bebas bergerak dari pada di wilayah kerajaan Kutai. Beliau berhasil membentuk beberapa cabang *Penyadar*.

h. **Gabungan Politik Indonesia (Gapi)**

Pada tahun 1940, partai-partai politik terdiri dari: PSII, Parindra, Gerindo, Pasundan, Partai Katolik, Partai Islam Indonesia (PII) menggabungkan diri dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia).⁴⁸ Pengurusnya berbentuk presidium terdiri dari enam orang yang diperjuangkan oleh GAPI ialah: *Menuntut Indonesia Berparlemen*.

Bangsa Indonesia menghendaki Parlemen yang nasionalistis, mewakili partai-partai dan tidak hanya sebagai penasihat

47. *Ibid*, halaman 57

48. Drs. Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Almaarif, Bandung, Cetakan ke V, 1981, hal. 625

seperti Dewan Rakyat (*Volksraad*). Parlemen itu mempunyai hak menentukan nasib sendiri.

GAPI mempunyai cabang-cabang di Samarinda dan Balikpapan. Hanya ada dua partai pendukungnya di Kalimantan Timur yaitu Gerindo dan Parindra, karena partai-partai lain memang tidak ada cabangnya di daerah ini. Namun dukungan moril dan materiil datang dari organisasi-organisasi non politik seperti Muhammadiyah.

Pada awal tahun 1940, Gapi berhasil mengorganisasi suatu rapat umum di Samarinda,⁴⁹ yang dikunjungi oleh berbagai lapisan rakyat.

i. Majelis Islam a'la Indonesia (MIAI)

Suatu badan Federasi partai dan organisasi Islam didirikan di Surabaya bernama *Majelis Islam a'la Indonesia* (MIAI). Partai dan organisasi yang bergabung di dalamnya ialah: PSII, Partai Islam Indonesia, NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis dan pergerakan-pergerakan Islam lainnya. Yang dipercayai memimpin ialah: Kiayi Haji Abdul Wahid Ha3yim.⁵⁰ Federasi itu didirikan pada tanggal 21 September 1937.⁵¹

Di Kalimantan Timur berdiri juga cabang MIAI ini, sebagai ktuanya M. Soejono dan Oemar Dahlan sebagai Sekretaris. Kedua tokoh ini adalah tokoh politik, karena MIAI di Samarinda didukung oleh partai politik.

Kegiatan MIAI Kalimantan Timur antara lain mengumpulkan uang dari para darmawan untuk disumbangkan kepada mukmin Indonesia yang terlantar di tanah suci Makkah, melalui MIAI pusat.

Demikianlah perlawanan rakyat Samarinda terhadap penjajahan dilakukan melalui organisasi pergerakan politik. Dari partai-partai politik yang pernah mempunyai cabang di Sama-

49. Drs. Sjahbandi dkk, *op. cit*, hal. 60

50. K.H. Sjaifuddin Zuhri, *op. cit*, hal 624

51. Drs. Sjahbandi, *op. cit*, hal. 60

rinda hanya Partai Sarikat Islam yang benar-benar tersebar sampai ke daerah Berau.

Sarikat Islam Pasir yang berdirinya karena pengaruh cabang Banjarmasin dianggap berbahaya bagi ketentuan umum oleh pemerintah dan dinyatakan dengan surat keputusan pemerintah tanggal 9 Nopember 1917 nomor 43 karena mengganggu peranan dalam pemberontakan raja-raja Pasir.⁵²

Yang termasuk radikal namun kooperator adalah Gerindo sehingga tak ada pegawai negeri yang berani menjadi anggotanya karena takut kehilangan pekerjaannya.

Petisi Sutarjo yang menuntut suatu negara Indonesia dalam lingkungan kerajaan Belanda tidak mendapat perhatian dari rakyat Kalimantan Timur.

Menjelang pecahnya perang pacifik partai-partai seolah-olah beku karena ketatnya penjagaan pemerintah dan karena diadakan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap membahayakan pemerintah.

4. Perlawanan pada Jaman Jepang

Pada tanggal 8 Desember 1941 secara tiba-tiba Jepang melancarkan serangan ke Pearl Harbour sebuah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik.⁵³ Lima jam setelah penyerangan atas Pearl Harbour itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborng Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang.⁵⁴ Tentara Jepang kemudian bergerak ke selatan ke Pilipina dan Indonesia tanggal 10 Januari 1942 tentara Jepang telah sampai di Tarakan. Komandan KNIL di Tarakan menyerahkan diri pada tanggal 13 Januari 1941.⁵⁵

52. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.*, hal. 98

53. Sartono Kartodirdjo dkk; *Sejarah Nasional* jilid VI, Dep. P dan K, Jakarta, 1975, hal 1.

54. *Loc. cit*

55. *Loc. cit*

Meskipun jauh-jauh sebelumnya pemerintah Hindia Belanda telah bersiap-siap menghadapi kedatangan tentara Jepang dengan menambah kekuatan tentara KNIL yang ada di Tarakan, Balikpapan dan tempat-tempat lain dengan *Landwacht* untuk menjaga daerah dan *Stadwacht* serta milisi,⁵⁶ namun karena kekuatan tentara KNIL sendiri kecil saja, maka tak ayal lagi kota demi kota jatuh ke tangan Jepang.

Kapitulasi pemerintah Hindia Belanda terjadi pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukan oleh Letjen. H. Ter Poorten, Panglima angkatan perang sekutu di Indonesia kepada angkatan perang Jepang di bawah pimpinan Letjen. H. Imamura.⁵⁷ Dengan demikian tentara KNIL yang ada di Kalimantan Timur yang dipusatkan di Samarinda II pun berkapitulasi kepada tentara Jepang.

Selama pendudukan Jepang, semua partai dilarang, hukum militer yang dijalankan sangat keras. Di samping itu kehidupan rakyat makin mengalami kesukaran. Bahan makanan sangat kurang begitu pula barang-barang keperluan lainnya.

Karena hal-hal tersebut, maka pergerakan rakyat pun mati. Perlawanan dan gerakan di bawah tanah pun tidak dapat tumbuh akibat tekanan pemerintah balatentara Jepang.

56. Drs. Asnawi Anang Acil, dkk, *op. cit.*, hal. 20

57. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, jilid 6 halaman 5

BAB IV
PERLAWANAN RAKYAT DI KERAJAAN BERAU
TERHADAP IMPERIALISME KOLONIALISME
TAHUN 1673 – 1945

A. IDENTIFIKASI

Untuk mengetahui latar belakang timbulnya perlawanan rakyat kerajaan Berau, terlebih dahulu diuraikan pertumbuhan kerajaan Berau (Berayu), sebab dalam perkembangannya akan terlihat suasana politik, ekonomi dan budaya masyarakat, serta perhubungannya dengan kerajaan-kerajaan tetangganya, yang mempengaruhi sifat struktur dan bentuk perlawanan.

Menurut Residen Selatan dan Timur pulau Borneo J.G. Gallois (1849/m April 1851) dikutip dari *de Bijdragen Koninklijk Instituut van 1856*, berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas bahwa Bulungan dahulunya merupakan bagian dari kerajaan Berau, kemudian memisahkan diri.

Keterangan residen J.G.A. Gallois ini dibenarkan pula oleh peneliti/penulis bangsa Belanda J. Hageman Joz dalam *Tijdschrift Bataviaasche genootschap* (TBG) deel 4, tahun 1885, halaman 79, H.J. Grijzen di dalam tulisannya yang berjudul "*Onze Dajak-Politiek in Noord-Oost Borneo*", tahun 1925 halaman 116, Dr. J. Eisenberger di dalam *Kriniek Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*, tahun 1936 halaman 17.

Bahkan oleh H.J. Grizen dan J.S. Krom Controleur van Beraoe (1940), landschap Alas dan Tungku di Malaysia Timur berbatasan dengan kerajaan Bernuai termasuk daerah kerajaan Berau pada jaman dahulu.

Persatuan dan kesatuan kerajaan itu dikukuhkan pula ketika kekuasaan Majapahit memasuki daerah ini pada tahun 1365, dengan menetapkan Aji Surya Nata Kesuma menjadi Kepala Pemerintahan Wilayah itu.

Sesudah kerajaan Majapahit menjadi lemah, Berau dengan seluruh wilayahnya mendirikan kerajaan sendiri yang dapat dipertahankannya sampai penjajah Belanda mendudukinya pada tahun 1834. Letak kerajaan Berau pada waktu jayanya antara $1\frac{1}{2}^{\circ} - 7^{\circ}$ dan $116^{\circ} - 119^{\circ}$ BT. Luas kerajaan Berau termasuk Bulungan dan Tidung sebesar 3 x negeri Belanda dengan jumlah penduduk pada tahun 1848 sebanyak 100.000 jiwa di daerah Bulungan (Belchers Voyage, London 1848) dan Berau sekitar 20.000 orang.

Daerah yang cukup luas mempunyai potensi yang sangat besar, dengan sumber alam yang cukup banyak. Hutan yang sangat luas dengan hasil seperti kayu ekspor, sarang burung, rotan, kayu gaharu, hasil tambang minyak tanah di pulau Tarakan dan Bunyu, batubara di Teluk Bayur (Berau), emas di sungai Kelay yang pernah ditulis oleh J. Hagemam dalam laporan perjalanannya.

Lautan yang kaya dengan bermacam-macam ikan, penyu, teripang yang pada abad XIX menjadi salah satu bahan komoditi perdagangan jaman itu.

Sungai-sungai besar seperti; sungai Berau (Kuran), sungai Kayan, sungai Sekatak, sungai Sembakung dengan sungai Sebuku. Dataran rendah yang maha luas diselang-selingi oleh gunung-gunung yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang tetap menghijau sepanjang tahun.

Berau pernah dilukiskan oleh seorang pengunjung bangsa Eropah sebelum abad ke-XIX, yang diungkapkan kembali oleh H. Van de Wall dalam bukunya yang berjudul *"Aanteekeningen omtrent de Noordoostkust van Borneo"* (TBG) deel 4, 1885, halaman 428, sebagai berikut:

Daerah-daerah ini memberikan sepanjang sungai-sungai yang dapat dilayari dengan pemandangan-pemandangan yang romantis, liar dengan kesuburan yang melimpah ruah. Berau pernah dinamai oleh seorang pengunjung sebagai Zwis-nya Borneo, betul-betul merupakan tempat yang layak bagi masyarakat yang rajin.

Berhubung dengan keadaan alam dengan sumber-sumber yang kaya akan mineral, pemandangan-pemandangan alamnya yang romantis serta letaknya yang strategis, beberapa apunturis bangsa Inggeris mencoba mengadu untung seperti James Brooke di Kalimantan Utara, antara lain Kapten angkutan laut Inggeris bernama E. Belcher, pada tahun 1834 memasuki Berau, alasannya ialah menyelidiki tenggelamnya kapal Inggeris Premier di dekat pulau Panjang sebuah pulau di kerajaan Berau.

Sejak penjajah Belanda mulai menjalankan politiknya hendak menguasai Indonesia dari jaman VOC 1602, Belanda merasa belum cukup kuat untuk menundukkan kerajaan Berau, karena raja-raja Berau, Bulungan, Tidung, kerajaan Sulu di Pilipina Selatan dibantu oleh kerajaan Wajo dengan tokohnya La Madukelleng, bersatu menentang pennajah kulit putih termasuk Spanyol, Inggeris, dan Belanda, yang masing-masing hendak merebut daerah itu.

Kesatuan pandangan raja-raja itu diikat oleh kesatuan iman yang dilandasi ajaran agama Islam yang sudah mendarah daging sejak Makdum Baginda Raja menyebarkan dakwah Islamiyah pada tahun 1380 — 1390 di Sulu dan Kalimantan Utara. Ketaatan dan kefanatikan inilah yang mendorong rakyat memiliki rasa persatuan, patriotisme, heroisme, pengabdian tanpa pamrih, mempertahankan tanah air mereka dari penjajah kulit putih.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Conventie London 1814 dan Tractat van London 1824 serta selesainya perang Dipenogoro, angkatan perang kerajaan Belanda memerangi Berau dengan sekutu-sekutunya.

B. PERTUMBUHAN KERAJAAN BERAU

1. Jaman Sriwijaya

Berdirinya kerajaan Berau belum dapat diketahui secara pasti. Dilihat dari bentuk wajah, bahasa, adat istiadat dan ke-

senian, penduduk pribumi di daerah Berau banyak persamaannya dengan suku-suku Melayu di Sumatera Selatan dan Sumatera Timur. Menurut Prof.Dr. Ahmad Ramali ketika beliau bertugas sebagai dokter pada tahun 1938 bersama-sama J.S. Krom di daerah itu, suku Berau berasal dari Deutro Melayu Sumatera beberapa abad yang lampau, membuat daerah permukiman di tempat itu. Kemungkinan besar peristiwa itu terjadi, ketika Kalimantan menjadi wilayah dari kedutaan Sriwijaya di antara abad ke VII sampai abad ke XIV. Tetapi sampai kini belum diketemukan sumber-sumber sejarah, hubungan antara kerajaan Berayu atau Berau dengan kerajaan Sriwijaya.

2. Jaman Majapahit

Sesudah pertengahan abad ke-XIV kerajaan Berau menjadi wilayah kerajaan Majapahit.² Wilayah Berau mulai dari Tanjung Mangkalihat ke utara berbatasan dengan kerajaan Berunai, yang terdiri dari Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan dan Sabah Malaysia Timur sekarang.³ Untuk memimpin wilayah itu, diangkat Aji Raden Surya Nata Kesuma yang dalam Legenda Berau, terkenal dengan nama Baddit Dipatung. Raja inilah yang menurunkan raja-raja Sambaliung, Gunung Tabur, Bulungan, dan sebagian turunannya bermukim di Sabah sekarang.

Untuk mengatur pemerintahan di daerah yang luas itu diangkatnya para wazirnya yang berkedudukan di beberapa tempat yang penting, antara lain:

Rangga Batara berkedudukan di negeri Pantai di rantau Berau dengan beberapa orang tua yang bernama Rantai Tumiang Panas Karamian, Ujian Barari, dan Unjit-unjit Raja. Rangga

1. J.S. Krom, *Memorie van overgave*, Kantor Controleur Tanjung Redeb, 1940, hal. 41
2. Dr. J. Eisenberger, *op. cit*, halaman 3
3. J.S. Krom, *Sultan Ahmad Maulana; Sultan Aminudin cs: catatan Silsilah Berau*

Batara mempunyai seorang putri yang arif bijaksana bernama si Kannik Berau Sanifah.

Tumanggung Macan Nagara berkedudukan di benua Kuran. *Angka Yuda* berkedudukan di negeri Bulalung berputra si Kuripan.

Si Patungut gelar *Kahar Janggi* dan *Si Balamman* gelar *Kahar Pahlawan*, mengurus pemerintahan di sungai Kelai kecamatan Sambaliung, dan kecamatan Muara Lasan sekarang.

Jaya Pati mengurus pemerintahan di negeri Bunyut. Ia mempunyai seorang putri yang terkenal bernama Si Dayang Bunyut. *Nini Barituk* mengurus pemerintahan di sungai Ulak, sungai Lati dan Panguawan.

Mereka masing-masing mempunyai daerah sebagai daerah kekuasaan sendiri. Untuk mengatur ketertiban dan keamanan, diadakan semacam undang-undang perdata dan pidana, yang selalu disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada jaman itu. Setiap raja dapat menambah pasal-pasal yang dianggap perlu, menurut keadaan atau situasi politik dan sosial budaya di dalam kerajaan itu. Peraturan perdata dan pidana itu dinamai *Pematang Ammas*. Peraturan itu dibuat secara mupakat dan musyawarah bersama-sama para orang besar kerajaan dan kepala-kepala administrasi pemerintahan seperti yang telah diuraikan di atas.

Majapahit mewajibkan penduduk membayar pajak yang dipergunakan untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan. Perhubungan dengan pulau Jawa diatur oleh para menteri yang dibantu oleh angkatan laut dan armada perdagangan. Pengaruh Majapahit di daerah ini, tidak terlalu lama karena pada bagian pertama abad ke XV, karena pusat pemerintahan kerajaan Majapahit di pulau Jawalah mulai berkurang kewibawaannya, raja-raja kecil di daerah-daerah menyatakan dirinya bebas dan melaksanakan pemerintahan sendiri.

Dari sekian penguasa kerajaan, ada sembilan raja-raja yang berwibawa yang dapat memelihara keutuhan peraturan seluruh wilayah kerajaan dari Tanjung Mangkalihat sampai ke perbatasan dengan kerajaan Berunai yaitu: Aji Raden Surya Nata Kesuma, Aji Nikullan, Aji Nikutak, Aji Nigindang, Aji Panjang Ruma, Aji Tumanggung Barani, Aji Sura Raja, Aji Surya Balindung, Aji Dilaya.

Aji Dilaya berputra dua orang laki-laki, yang tua bernama *Pangeran Tua* dan yang muda bernama *Pangeran Dipati*. Untuk memelihara keutuhan kerajaan kedua turunan kedua Pangeran itu berganti-ganti menjadi raja. Apabila seorang menjadi raja, yang lain menjadi wakilnya. Untuk jabatan wakil, Gunung Tabur lebih senang memakai gelar *rijkbestuurder* (penguasa atau mangkubumi) sedang Sambaliung senang akan titel Raja Muda. Masing-masing kedua pangeran ini mempunyai wilayah sendiri-sendiri yang diwariskan kepada turunannya. Sesudah Aji Dilaya meninggal dunia kerajaan berganti-ganti diperintah oleh:

1. Pangeran Tua.
2. Pangeran Dipati.
3. Aji Busamma gelar Aji Kuning I, putra Pangeran Dipati.
4. Sultan Hasanuddin putra Pangeran Tua.
5. Zainal Abidin putra Ammas Sinasari, kemanakan Aji Kuning I.
6. Sultan Badaruddin, cucu Sultan Aji Kuning I.
7. Salehuddin putra Maharaja Laila, kemanakan Sultan Hasanuddin Marhum di Kuran.
8. Amirilmukminin Marhum di Rijang, putra Hasanuddin.
9. Aji Kuning II putra Sultan Badaruddin.

Demikianlah kerajaan Berau diperintah berganti-ganti antara turunan Pangeran Tua dan Pengeran Dipati. Setelah kerajaan Berau dikalahkan Belanda kerajaan itu terpecah dua menjadi kerajaan Sambaliung yang diperintah oleh raja Alam putra Amirilmukminin, cucu Sultan Hasanuddin; dan kerajaan Gunung Tabur diperintah oleh Gazi Mahyudin Aji Kuning II.

3. Hubungan dengan Kerajaan Wajo, Kutai dan Sulu Pili-pina Selatan⁴

a. Hubungan dengan kerajaan Wajo Sulawesi Selatan

Ketika kerajaan Berau diperintah oleh sultan Hasanuddin Marhum di Kuran, telah datang kunjungan muhibah dari Petta Torawe putra La Madukelleng Arung Matowa (1736 – 1754). Arung Matowa Wajo ini terkenal seorang raja yang gigih mengusir penjajah Belanda. Dengan sahabatnya karaeng Bontolangkasa dari Gowa, ia dapat mengalahkan tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor Steinmetz.

Sebagai tanda persahabatannya Petta Torawe, menuliskan suatu piagam di pintu gerbang istana sultan Sambaliung yang isinya antara lain berbunyi, jika seorang telah berlindung di halaman Suraja (istana) ia telah menjadi orang raja dan tidak boleh diganggu keamanannya. Untuk memelihara kesinambungan hubungan Wajo dan Berau, seorang panglimanya berdiam di Berau bernama La Madu Daeng Pallawa yang keturunannya kemudian mendirikan kampung Bugis di Tanjung Redeb. Cucu Petta Torawe ini kemudian kawin dengan Raja Alam cucu dari sultan Hasanuddin.

b. Hubungan dengan Kutai

Zainal Abidin Marhum di Muara Bangun pernah kawin dengan Aji Galuh Besar putri Pangeran Mangkubumi cucu Marhum Pamarangan dari kerajaan Kutai. Raja Alam sultan Sambaliung kawin dengan Aji Nantu putra Pangeran Petta dengan isterinya Aji Bungsu putri bangsawan Kutai.⁵

4. Dr. J. Eisenberger, *Loc. cit*

5. J. Hageman Joz: *Aanteekeningen omtrent een ge deelte van der Oostkust van Borneo*, TNI, 4, 1883, halaman 88

c. Hubungan dengan Kerajaan Sulu Pilipina Selatan

Dengan kerajaan Sulu, kerajaan Sambaliung mempunyai hubungan yang erat. Sultan Hasanuddin kawin dengan Dayang Lana anak raja Sulu Pilipina Selatan.⁷⁾ Empat orang putranya yaitu Datu Syaifuddin, Datu Jalaluddin, Si Dayang Bungsu, Si Dayang Bunyut pulang ke Sulu. Seorang putranya dari anak raja Sulu ini bernama Amirilmukminin tinggal di Berau dan menjadi sultan sesudah sultan Aji Kuning II putra sultan Badaruddin.

Karena hubungan perkawinan kekeluargaan, terjadi hubungan persahabatan antara raja-raja Wajo, Kutai dan kerajaan Sulu dengan kerajaan Berau. Mereka bantu membantu di dalam menghadapi sesuatu kesulitan, terutama bagi Sulu dan suku Bugis yang banyak bermukim di daerah Berau.

4. Sosial Budaya dan Ekonomi

Dengan adanya asimilasi dan interaksi sosial budaya disebabkan perkawinan antar keluarga pemimpin-pemimpin di kerajaan yang tersebut, keamanan serta ketertiban di kerajaan menjadi mantap.

Pada tahun 1380 seorang ulama bernama Makdum, mulai menyiarkan agama Islam di Kalimantan Utara dan di kepulauan Sulu, Pilipina Selatan. Ia kemudian disusul pula oleh seorang ulama Minangkabau bernama Baginda Raja. Tiada berapa lama kemudian kerajaan Berau mulai menerima agama Islam, diperkirakan pada abad ke XV, pada pemerintahan raja ke VI Aji Tumanggung Barani ajaran Islam mulai mendapat pengaruh yang luas di wilayah Berau yang kemudian menjadi agama kerajaan.

Undang-undang perdata dan pidana Pematang Ammas, dimasukkan unsur-unsur ajaran Islam, sehingga hukum Islam diterapkan di dalam pelaksanaan pengadilan kerajaan, dan menjadi falsafah dalam kehidupan rakyat.

Barang-barang perdagangan pada waktu itu, ialah hasil hutan seperti sarang burung putih, madu, lilin, dan hasil laut seperti ikan dan teripang.

C. KEDATANGAN IMPERIALISME DAN KOLONIALISME SPANYOL DAN BELANDA

1. Kedatangan Spanyol di Berau

Hampir bersamaan waktunya dengan kedatangan Belanda tahun 1596 di kepulauan nusantara ini, bangsa Spanyol telah menduduki Filipina dan bermaksud hendak meluaskan ke selatan ke Kalimantan Utara dan selat Makasar. Selain dari untuk menjajah Spanyol juga bertujuan untuk menyiarkan agama Kristen pada penduduk pribumi yang telah didudukinya.

Karena itu kedatangan bangsa Spanyol ditentang dengan gigih oleh rakyat di kepulauan Sulu dan Mindanao yang fanatik bekerja sama dengan keluarganya raja-raja dari Berau yang sudah menyatakan agama Islam sebagai agama kerajaan.

2. Kedatangan VOC di kerajaan Berau

Pada tahun 1671 VOC mengirimkan misi perdagangannya di bawah pimpinan Paulus de Bock dengan kapal *de Noorman* ke Berau, tetapi tidak mendapat sambutan dari penduduk yang menaruh curiga terhadap bangsa Eropah terutama Portugis dan Spanyol, termasuk Belanda. Pada tahun 1756 VOC mengharapakan bantuan Kutai untuk meluaskan pengaruhnya ke Berau, tetapi tidak berhasil Berau dengan sekutu-sekutunya orang-orang kepulauan Sulu dan Bugis di bawah pimpinan Petta Torawe yang bersahabat dengan raja Berau sultan Hasa-nuddin.

Sampai kepada jatuhnya VOC tahun 1799, tidak seorang Belanda atau bangsa kulit putih lain yang berdiam di daerah kerajaan Berau, termasuk Bulungan dan Tidung.

D. JALANNYA PERLAWANAN TERHADAP HINDIA BELANDA (1800 – 1942)

Pada tanggal 13 Agustus 1814 diadakan perjanjian antara pemerintah Inggris dan Belanda yang disebut *Conventie Lon-*

don. Dalam conventie telah disepakati Inggris menyerahkan kembali nusantara kepada Belanda pada tahun 1816. Untuk melaksanakan penyerahan itu, pemerintah Belanda mengirim tiga orang komisaris Jenderal yaitu Elout, Buyskes dan Van der Capellen, untuk menerima penyerahan itu dari pemerintah Inggris. Kemudian Van der Capellen diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda berusaha keras untuk menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Tetapi dimana-mana mendapat tantangan dan perlawanan yang hebat dari pemimpin-pemimpin, raja-raja dan rakyat Indonesia. Di Sumatera terjadi perlawanan dipimpin oleh Imam Bonjol yang terkenal dengan perang Padri 1821 – 1837. Di Jawa terjadi perang besar yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro 1825 – 1830.

Untuk memantapkan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan pada tahun 1824 Gubernur Jenderal Van der Capellen sendiri datang ke Ujung Pandang, untuk meminta supaya raja-raja Sulawesi Selatan menandatangani perjanjian pembaharuan atas perjanjian Bungaya. Tetapi raja-raja Bone, Wajo, Luwu, Soppeng, Suppa dan kerajaan-kerajaan di daerah Mandar tidak mau menandatangani perjanjian itu.

Beberapa kali pemerintah kolonial Belanda mengirim serdadunya menindak raja-raja yang menentang perjanjian itu, semuanya gagal. Karena itu tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor Van Geen pada tahun 1825 dikirim ekspedisi dengan persenjataan yang modern. Tetapi gagal menangkap raja perempuan *I Maning Aru Data Matinrowe Ri Kessi*, raja Bone ke-XXV. Van Geen terpaksa kembali ke Makasar.

Pada tahun 1825 Van der Capellen mengirim utusan Mayor George Muller, untuk menuntut perjanjian dengan sultan Salehuddin dari kerajaan Kutai, supaya mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda atas kerajaan Kutai. Utusan Be-

landa itu dibunuh oleh rakyat Kutai di Muara Kaman.⁶ Pemerintah Hindia Belanda belum melanjutkan usahanya untuk melanjutkan ekspedisinya ke kerajaan Berau, disebabkan dua peristiwa yang harus dihadapinya, yaitu:

Pertama tentara Belanda masih menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro dan perang Imam Bonjol di Sumatera Barat serta perlawanan rakyat Sulawesi Selatan.

Kedua kerajaan Berau terutama raja Alam mempunyai persekutuan dengan pejuang-pejuang Bugis yang dipimpin oleh mertuanya Pangeran Petta anak Petta Torawe atau cucu dari La Madukelleng raja Wajo, dan Paneki yang terkenal anti VOC dan berjuang bahu membahu dengan kerajaan Gowa untuk mengusir penjajah Belanda. Demikian pula raja Alam bersekutu dengan orang-orang Sulu yang dipimpin oleh Syarif Dakula, menantunya, keturunan dari Syarif Bungsu Raja kepulauan Sulu dan Mindanao, Pilipina Selatan yang sejak ke-XVI anti kepada penjajah kulit putih (Spanyol dan Belanda). Mereka semuanya tidak rela di bawah perintah orang kasif. Sebelum Belanda mengiriskan ekspedisi menduduki Berau, lebih dahulu pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik adu dombanya, untuk memecah belah persekutuan kerajaan Berau yang terdiri dari kerajaan Gunung Tabur, Sambaliung (Tanjung) dan Bulungan.

Mula-mula diusahakannya memisahkan kerajaan Bulungan dari persekutuan kerajaan Berau. Pada tahun 1800, Bulungan dan Tanah Tidung telah memisahkan diri dengan mendirikan kesultanan sendiri.⁷ Kemudian Belanda mendekati sultan Gunung Tabur Aji Kuning II (1833 – 1850) putra dari sultan Badaruddin. Pemerintah tahu bahwa kedua kerajaan itu tidak terdapat kesatuan pendapat.

Raja Alam dengan sekutu-sekutunya mengerti akan siasat licik Belanda sebab itulah ia mengadakan persiapan dengan

6. Dr. J. Eisenberger; *op. cit.*, hal. 21, 22

7. *Ibid*, halaman 17

memperkokoh kesatuan antara rakyatnya dengan suku Bugis dan orang-orang Sulu. Raja Alam beristana di Batu Putih (di Kecamatan Talisayan sekarang). Di daerah itu banyak bermukim pejuang-pejuang Bugis, yang disebut Belanda bajak laut. Persekutuan raja Alam ini dengan suku Bugis semakin erat, karena raja Alam kawin dengan Andi Nantu putri Pangeran Petta dengan Aji Bungsu putri Aji Pati Tuha Raja Kutai. Seorang anak dari Pangeran Petta ini menjadi Pangeran Mangkubumi kerajaan Kutai. Anak perempuan dari raja Alam dengan isterinya putri Bugis ini ternama Pangeran Ratu Ammas Mira kawin dengan Syarif Dakula pemimpin bangsa Sulu yang juga memperkuat pertahanan raja Alam di Batu Putih.

Baik raja Alam dengan segenap rakyatnya, mau pun pejuang-pejuang suku Bugis dan orang Sulu, sudah bertekad bulat tidak menerima bangsa Belanda sebagai yang dipertuan di tanah air mereka. Menurut pendirian dan kepercayaan mereka bangsa Belanda adalah penjajah yang tergolong orang kapir. Setelah pemerintah Hindia Belanda dapat mematahkan perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 dengan meminta korban yang sangat besar, mereka mulai mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi perlawanan raja-raja dan rakyat di luar pulau Jawa.

Selain dari perlawanan rakyat di Nusantara Belanda khawatir terhadap orang-orang Inggris yang bermaksud hendak meluaskan pengaruhnya di Kalimantan Timur, seperti James Brooke di Kalimantan Utara dan kemudian oleh Kapten laut Inggris E. Belcher yang pada tahun 1834 dan 1848 dengan kapal perang dengan lima perahu pinis ke Berau dan Bulungan.⁸ Oleh karena itu Belanda memberikan prioritas pertama untuk menundukkan Berau yang bersekutu dengan pejuang-pejuang Bugis, Wajo dan Sulu.

Perlawanan kerajaan Berau ini, dipimpin oleh raja Alam dari kerajaan Sambaliung. Raja Alam mempunyai istana di

8. J. Hageman, *op. cit.*, hal. 104

Tanjung, sebuah lagi dekat kampung Bugis di Tanjung Redeb sekarang. Di tempat ini ia dibantu oleh seorang panglima suku Bugis bernama panglima Limbuti, keturunan panglima La Madu Daeng Pallawa yang mendirikan kampung Bugis di Tanjung Redeb.⁹

Pertahanan yang kuat dibangun dekat laut di Batu Putih di Tanjung Mangkalihat, tempat gabungan suku Berau, suku Bugis dan Sulu pimpinan Syarif Dakula, menantu raja Alam. Armada Bugis dan Sulu inilah yang dianggap sangat berbahaya bagi kapal-kapal Belanda.

Untuk menghancurkan armada persekutuan Berau, Bugis dan Sulu ini, pihak militer Belanda menyediakan angkatan laut sejak bulan April 1834 dengan perlengkapan persenjataan di markas angkatan laut Belanda di Makasar. Dengan dalih pengaduan sultan Gunung Tabur Aji Kuning (Gazi Mahyudin), bahwa raja Alam bersekutu dengan bajak laut Bugis yang mengganggu ketertiban pelayaran di perairan Berau, pemerintah Hindia Belanda menyetujui permintaan sultan Aji Kuning.¹⁰

Pada bulan September 1834, Belanda mengirim ekspedisi menindak raja Alam. Empat buah kapal perang yaitu Korvet *'Heldin*, brik *Syiwa*, sekuner *Korokodil* dan *Kastor*, serta ber-puluh-puluh perahu pendarat di bawah pimpinan Kapten laut Anemaelt, menyerang pertahanan armada laut raja Alam di Batu Putih.¹¹

Untuk menghadapi serangan Belanda, raja Alam dengan sekutu-sekutunya suku Bugis dan orang-orang Sulu di bawah pimpinan menantunya Syarif Dakula, membuat beberapa buah kubu pertahanan, diantaranya di Batu Putih di daerah Tanjung Mangkalihat yang menghadap arah ke laut dan ke darat, dan sebuah benteng agak ke daerah pedalaman 40 x 40 m, di

9. *Catatan ringkas Sejarah Samarinda Seberang*, Samarinda 1882, hal. 3

10. Dr. J. Eisenberger; *op. cit.*, hal. 21, 22

11. J. Hageman, *op. cit.*, hal. 102

sungai Dumaring, tidak jauh dari Batu Putih. Di Tanjung yang sekarang bernama Tanjung Redeb, raja Alam dibantu oleh panglima Bugis bernama panglima Limbuto keturunan dari La Madu Daeng Pallawa. Kubu-kubu pertahanan mereka diperkuat dengan meriam-meriam besar kecil yang sampai sekarang masih ada di daerah Berau. Senjata api dibeli dari Singapura dengan perantaraan perahu-perahu Bugis.

Dengan perahu-perahu pendaratnya pasukan Belanda mengadakan serangan terhadap pertahanan raja Alam di Batu Putih dengan dilindungi oleh tembakan meriam dari kapal-kapal perang Belanda. Pejuang-pejuang Berau, Bugis dan Sulu mempertahankan Batu Purih dengan gigih. Karena perlengkapan Belanda sudah 6 bulan dipersiapkan di Makasar, dan pasukannya telah berpengalaman dalam perang Diponegoro dan perang Imam Bonjol, raja Alam mengundurkan diri ke Tanjung untuk mempertahankan istananya di tempat itu dengan dibantu oleh panglima Limbuto putranya Hadi, menantunya Syarif Dakula dan orang-orang Bugis, mempertahankan kubu pertahanan di sungai Dumaring daerah Tanjung Mangkalihat.

Raja Alam, dapat dikalahkan Belanda dan bertahan di Muara Lasan. Di tempat ini raja Alam ditangkap Belanda dengan putranya Hadi yang kemudian menjadi sultan Hadi menggantikan Raja Alam. Raja Alam dengan keluarganya dijadikan sandera Belanda. Pemimpin tentara Belanda Kapten Anemaelt, meminta agar Syarif Dakula dan orang-orang Bugis menghentikan perlawanan dengan jaminan keselamatan Raja Alam dan keluarganya. Untuk itu diminta Syarif Dakula dengan pengikutnya datang menghadap di kapal perang Belanda.

Syarif Dakula dan keluarganya, datang di kapal Belanda. Di kapal perang Belanda itu Syarif Dakula berunding dengan tentara Belanda. Karena Syarif Dakula tetap tidak mau bekerja sama dengan bangsa kulit putih yang dianggapnya kafir, ia hendak ditangkap Belanda dan diasingkan ke Makasar. Tetapi Syarif Dakula mengadakan perlawanan, sehingga tewas. Mayat-

nya dibuang ke laut. Melihat peristiwa itu, isterinya Pangeran Ratu Ammas Mira, yang sangat setia pada suaminya, melompat ke laut bersama-sama anaknya yang masih kecil. Ia dengan anaknya dapat diselamatkan. Karena Raja Alam dengan keluarganya antara lain putranya Hadi Jalaluddin Pangeran Ratu Ammas Mira isteri dari Syarif Dakula, dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda, mereka diasingkan ke Makasar sebagai tawanan negara (*staatgevangene*). Sultan Bongkoch putra dari raja Alam dapat melepaskan diri.

Setelah perlawanan raja Alam dengan sekutu-sekutunya yang terdiri dari pejuang Bugis yang dipimpin Pangeran Petta, dan orang-orang Sulu di bawah pimpinan Syarif Dakula, pemerintah kolonial Belanda mengadakan Perjanjian dengan sultan Gubung Tabur pada tanggal 27 September 1834 yang berbunyi sebagai berikut:^{1 2}

1. Batu Putih dan Berau, menurut hukum perang, sebagai negeri yang dikalahkan masuk dalam kekuasaan Belanda.
2. Sultan Gunung Tabur Aji Kuning berjanji akan melindungi keamanan kerajaan dan perdagangan dari bajak laut, dan akan mentaati segala perintah dari Gubernemen Belanda di Makasar, berjanji akan menyerahkan bajak laut dan setiap tahun akan mengirim utusan ke Makasar.
3. Landschap Sambaliung atau Tanjung, sementara penguasannya diserahkan kepada sultan Gunung Tabur sebagai vazal gubernemen Hindia Belanda, sebagai tanah pinjaman (*als vazal van het Ned. Ind. Gouv. en als leen*).
4. Sultan Gunung Tabur harus segera menghadap gubernemen Belanda ke Makasar.^{1 3}

Selama Raja Alam dalam pembuangan di Makasar sejak 1834 kerajaan Berau menjadi tidak aman. Pengikut-pengikut Syarif Dakula dan Pangeran Petta, melakukan pengacauan di perairan selat Makasar dan kampung-kampung di daerah Berau.

12. *Ibid*, halaman 102

13. J. Hageman, *op. cit*, hal. 103

Sungai Ulak dahulu bekas pusat pemerintahan kerajaan Berau, dirampok oleh suku Bugis dan Sulu. Kampung Pujut wilayah Gunung Tabur diserang oleh suku Bugis. Muara Bangun kedudukan sultan Gunung Tabur diserang oleh suku Bugis dan Sulu. Pemimpin-pemimpin pejuang suku Bugis ialah Tuassa dan pemimpin bangsa Sulu yang mengadakan perlawanan terhadap kerajaan yang diakui Belanda sebagai jajahannya itu ialah Datu Kamsah.¹⁴

Untuk mengatasi keadaan yang selalu tidak aman itu sultan Gunung Tabur meminta bantuan ipar raja Alam saudara isterinya yang menjadi Pangeran Mangkubumi kerajaan Kutai dan memerintah di Batu Putih. Pangeran ini hanya dapat bertahan selama dua tahun di Batu Putih. Untuk mententeramkan keadaan yang tidak ada kepastian itu, Sultan Gunung Tabur dan Pangeran Mangkubumi, bersama-sama memajukan permohonan kepada gubernemen Belanda di Makasar, supaya raja Alam dengan keluarga serta putra-putra dan cucunya dikembalikan ke Berau.

Permohonan ini, disetujui oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 15 September 1836. Setahun kemudian pada tanggal 24 Juni 1837 gubernemen Belanda mengijinkan raja Alam dengan keluarganya kembali ke Batu Putih dengan ketentuan raja Alam harus mengakui kedaulatan Belanda. Raja Alam memindahkan ibukota kerajaannya dari Batu Putih ke Tanjung daerah kampung Bugis Tanjung Redeb sekarang.

Antara kedua kerajaan itu yaitu Gunung Tabur dan Sambaliung selalu saja terjadi peperangan. Karena raja Alam tidak dapat memenuhi perjanjian yang diduktekkan Belanda, ia kembali ke Batu Putih dan meninggal di tempat 7 Juli 1848.¹⁵ Ia dimakamkan di sungai Rindang dekat Batu Putih.

Putranya sultan Hadi Jalaluddin yang diangkat Belanda sebagai sultan Sambaliung yang sejak tahun 1844, meninggal

14. H. van Hoevell, "*Aanteekeningen omtrent de Noordkust van Borneo*", *TBG*, 4, 1885, halaman 426

15. J. Hageman; *op. cit.*, hal. 88

pada tahun 1852. Pada akhir pemerintahannya yang berpengaruh ialah saudaranya sultan Asyik Syarafuddin putra raja Alam dengan isterinya putri dari Bugis, yang menggantikannya pada bulan April 1850, raja ini pada tahun 1852 berumur 38 tahun, ia sudah seorang sultan yang berpengaruh, memerintah dengan tidak ada penguasa (rijkbestierder) di sampingnya. Sultan Bongkoch putra raja Alam, yang sejak semula tidak dapat ditawan oleh Belanda, tetap tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda dan terus berjuang mengadakan pengacauan bersama-sama pejuang Bugis dan Sulu di perairan Berau laut Sulawesi dan selat Makasar.¹⁶

E. PERLAWANAN H.A. KUNING GUNUNG TABUR

Setelah Aji Kuning Gunung Tabur meninggal dunia ia digantikan oleh kemanakannya sultan Amirilmukminin putra raja Muda Si Bandang. Saudara sultan Amiril dua orang laki-laki, seorang bernama raja Alam dan seorang lagi bernama raja Muda Si Kinarang. Pada waktu pemerintahan Sultan Amiril, tidak seorang pegawai berkembangsaan Belanda yang berdiam di Berau. Pemerintahan kerajaan, langsung dilaksanakan oleh sultan bersama-sama orang besarnya pegawai kerajaan. Walaupun sultan Aji Kuning Gunung Tabur telah menanda tangani kontrak yang mengakui suprematie dari gubernemen Belanda, tetapi gubernemen belum mempunyai kemampuan untuk mencampuri pemerintahan kerajaan kekuasaan pemerintahan dan urusan perdagangan langsung ditangani oleh pemerintah kerajaan.

Di antara pembesar yang berpengaruh ialah dua orang saudara sultan, yaitu raja Alam dan raja Muda Si Kinarang. Kedua pembesar ini, tidak mau tunduk kepada perjanjian

16. *Ibid*, hal. 99

Raja-raja berikutnya adalah Asyih Syarafuddin (meninggal tahun 1869), Sultan Adil Jalaluddin (meninggal tahun 1881), Sultan Bayanuddin (meninggal tahun 1902) dan Sultan terakhir Moh. Aminuddin memerintah sampai tahun 1860

dagang yang didektikan pedagang Belanda. Raja Alam yang dicapnya sebagai penjudi dan pemadat yang tidak dapat dipegang janjinya, mempunyai hutang, tetapi hanya dibayar dengan janji-janji saja.

Perjanjian tanggal 27 September 1834 itu, rupanya hanya di atas kertas saja. Pemerintah kolonial Belanda tidak mempunyai wibawa terhadap kerajaan Gunung Tabur dan kerajaan Sambaliung.

Pada tahun 1876 Amiril meninggal dunia, kemudian digantikan anaknya sultan Hasanuddin. Di masa ini kerap kali terjadi peperangan kecil dengan kerajaan Sambaliung, tetapi kemudian dapat didamaikan oleh asisten residen dari Samarinda.¹⁷⁾

Pada tahun 1882 sultan Hasanuddin Gunung Tabur, meninggal dunia ia digantikan oleh sepupunya Aji Kuning putra raja Alam Gunung Tabur. Pada pemerintahan Aji Kuning ini, hubungan kerajaan dengan gubernemen Belanda tidak terdapat keserasian. Setelah Aji Kuning menunaikan haji kecurigaan Belanda semakin bertambah tidak senang kepada pemerintahan Haji Aji Kuning yang diakui Belanda. Sebagian besar rakyat membela kepada beliau. Sultan Haji Aji Kuning pindah ke Sambaliung diiringkan oleh Pangeran-pangeran, ketua-ketua, rakyat turut pindah ke kerajaan Sambaliung dan membuat kampung di Tanjung Baru, Karang Embun, Gurimbang, Bebanir dan Sepinang.¹⁸

Masalahnya ialah Haji Aji Kuning, seorang raja yang tidak selalu menurut kehendak gubernemen Belanda. Beliau berpendirian kerajaan Gunung Tabur dengan gubernemen adalah merupakan dua pemerintahan yang mengadakan hubungan persahabatan. Gubernemen tidak berhak mencampuri pemerintahan kesultanan dan pengangkatan atau penggantian sultan. Haji Aji Kuning, menurut adat istiadat kerajaan, berhak untuk menjadi

17. Dr. J. Eisenberger, *op. cit.* hal. 64

18. *Ibid*, hal. 72

sultan. Sebagian besar rakyat menyetujui kepemimpinan beliau sebagai raja. Adalah tidak wajar gubernemen Belanda mencampuri persoalan adat. Tindakan gubernemen dengan kekuatan senjata tidak dapat diterimanya dengan wajar.

Tersiar berita bahwa dari pihak eks Wali Negara bahwa Haji Aji Kuning telah mengadakan komplotan di Sambaliung, untuk mengadakan perlawanan terhadap kebijaksanaan gubernemen sang sultan Gunung Tabur. Karena itu pemerintah memperkuat penjagaan dengan mengganti kepala pos penjagaan pribumi dengan seorang kontler bangsa Belanda mulai tanggal 1 Mei 1987.¹⁹

Mulai tanggal 1 Mei penjagaan pon pribumi di Berau diganti dengan seorang kontler Belanda, untuk lebih meningkat keamanan di kawasan landschap Gunung Tabur, dimana pihak ex wali Negara Haji Aji Kuning telah mengadakan komplotan di Sambaliung, untuk mengadakan perlawanan terhadap pihak sultan (yang baru diangkat Belanda).

Dengan diadakannya controleur Belanda di Berau, gubernemen setiap saat dapat mengawasi tindak tanduk bekas Wakil Negara kerajaan Gunung Tabur. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban di daerah Berau, sebelum pemerintah kolonial Belanda bertindak dengan kekerasan dianhjurkan melalui penguasa kerajaan Sambaliung, dianjurkan agar bekas Wali Negara Haji Kuning meninggalkan Berau. Dengan diiringkan para keluarganya yang setia Haji Aji Kuning meninggalkan Berau dan berdiam di Tanah Kuning perbatasan antara kerajaan Bulungan dan Berau.

F. PERLAWANAN ABAD KE-XX (1900 – 1945)

1. Perlawanan Terhadap Pemerintah Kolonial Belanda

Kalau tadinya perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah bangsa Eropah, terutama bangsa Belanda di seluruh

19. *Ibid*, hal. 76

nusantara, dilakukan secara lokal, mulai abad ke-XX pemimpin-pemimpin Indonesia merubah siasat perjuangannya.

Jika bangsa penjajah kulit putih mulai dari bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda mencapai maksudnya menjajah nusantara dengan memakai taktik pecah belah kemudian mengadu domba pemimpin-pemimpin dan raja-raja di Indonesia, pada abad ke-XX kaum intelek Indonesia mulai insyaf akan kesalahan siasat perjuangan perlawanannya terhadap imperialisme dan kolonialisme bangsa kulit putih.

Untuk membangun sesuatu kekuatan yang maha besar, perlu diusahakan menghimpun segala potensi perjuangan di daerah-daerah dengan menggalang kesatuan dari segenap suku bangsa Indonesia di seluruh nusantara. Dengan gagasan serta pemikiran mengembalikan kerukunan dan kesatuan seperti di jaman kedatuan Sriwijaya dan Majapahit, terbentuklah organisasi-organisasi sosial dan politik, seperti Budi Utomo, 1908 SDI yang kemudian menjadi partai Sarikat Islam, partai Nasional Indonesia dan lain-lain.

Jaman kebangkitan nasional bangsa Indonesia ini, terjadi di mana-mana. Salah satu organisasi politik yang dapat menggerakkan dan menggelorakan hati nurani bangsa Indonesia ialah partai Sarikat Islam. Hal itu disebabkan, karena azas perjuangan organisasi ini sesuai dengan dasar keyakinan agama dari bangsa Indonesia yang lebih dari 90% beragama Islam. Seluruh umat Islam merasa terpanggil untuk menjadi anggota Sarikat Islam. Hampir disegenap pelosok tanah air berdiri cabang SI seperti di Banjarmasin, Pasir, Samarinda tidak terkecuali di daerah Berau:

Pada tahun 1914 di Samarinda berdiri Cabang Sarikat Islam. Di daerah-daerah lain pun Sarikat Islam lokal berdiri dan mendapat pengarahan dari pemerintah.²⁰

Di daerah Berau berdiri cabang Sarikat Islam yang berpusat di Tanjung Redeb. Organisasi ini dapat berkembang dengan

20. Dr. J. Eisenberger, *op. cit*, halaman 94

pesat karena tokoh-tokoh agama dan para bangsawan memasuki organisasi ini. Di antara tokoh-tokoh agama yang memimpin SI ialah Kadhi kerajaan Sambaliung Haji Abdullah, Haji Junait, Pembekal Anang Dahlan di Tanjung Redeb, Raden Kelana, Pangeran Perojo, Datu Bendahara di Gunung Tabur, Datu Maharaja Dinda, Datu Raja Aji Raden Saparta di Sambaliung. Dengan masuknya tokoh-tokoh ini dalam SI di seluruh kawasan Berau, dapat dikatakan seluruh umat Islam menjadi anggota SI. Sampai sekarang masih terdapat bekas gedung Sarikat Islam di Tanjung Redeb. Di Teluk Bayur, di daerah perusahaan Batubara SMP (*Steenkolen Maatschappij Parapatan*) tidak terkecuali terdapat anggota SI.

Untuk memantapkan azas dan tujuan SI dan menggalang kesatuan persatuan umat Muslimin pribumi, peranan Cina, Arab memberikan pengarahannya perjuangan Sarikat Islam setiap tahun diadakan kongres Sarikat Islam di Banjarmasin. Kemudian sifat dari azas tujuan Sarikat Islam berubah menjadi organisasi yang bersifat kebangsaan, menjadi Partai Sarikat Islam.

Di bawah pimpinan seorang berasal dari Sumatera, Maraja Sayuti Lubis dan Presiden Sarikat Islam Haji Muhammad Arif,²¹ maka Sarikat Islam Banjarmasin menjalin hubungan kerja sama antara CSI dan PSI. Dengan kerja sama antar orang pribumi, Cina dan Arab, diadakan gerakan propaganda secara pesat. Pada tanggal 31 Agustus setiap tahun diadakan kongres nasional di Kalimantan. Sifat perkumpulan itu berubah menjadi gerakan nasional, yang bertujuan untuk merubah keadaan. Berhubung dengan sifat kegiatan perkumpulan itu, Tjokroaminoto dilarang mengunjungi Kalimantan.

Sayuti Lubis pindah ke Samarinda. Sarikat Islam mulai menunjukkan kegiatannya dengan semacam Biro Pengaduan tentang pajak-pajak yang tinggi, kerja rodi yang berat, dan berbagai tindakan pemerintah yang dianggap memberatkan

21. *Ibid*, halaman 102

rakyat. Diterbitkannya sebuah surat kabar yang bernama *Persatuan*. Tulisan-tulisannya membangkitkan semangat kebangsaan dan semangat persatuan, yang bertujuan untuk menyusun kekuatan, guna merubah perbaikan nasib bangsa Indonesia.

Di Kalimantan Timur, di daerah Kutai dan Berau dibuka tambang batubara, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi kapal-kapal KPM (*Koninkelijk Paketvaart Maatschappij*) perusahaan pelayaran Belanda yang terbesar yang memperhubungkan pelayaran di kepulauan nusantara.

Batubara ditambang oleh *Steenkolen Maatschappij* di daerah Kutai. Selanjutnya penambangan batubara "Parapatan di kerajaan Sambaliung (Berau) di tambang oleh Tuan Cools."^{2 2}

Pertambangan batubara Parapatan Tuan Cools ini, kemudian diambil alih oleh KPM dengan ganti rugi. Mulai saat itu perusahaan tambang batubara diperbesar dan dieksploitasi, dengan alat-alat modern. Untuk pekerjaan itu didatangkan buruh dari pulau Jawa. Buruh-buruh itu dikontrak untuk waktu beberapa tahun; mereka tidak boleh berhenti sebelum kontraknya habis, hal ini disebut *kuli kontrak*. Mulai pukul 7.00 pagi sampai pukul 17.00 sore, buruh-buruh harus bekerja di dalam tambang yang berpuluh-puluh meter di bawah tanah. Kemudian diganti pula oleh buruh-buruh yang bekerja malam sampai waktu pagi. Mereka harus bekerja keras memecah batubara dan mengangkatnya ke dalam lori di dalam kegelapan yang hanya diterangi lentera-lentera di kepala. Gaji yang diterima tidak seimbang dengan waktu dan tenaga yang diperas dari para buruh itu.

Oleh karena itu, banyak buruh yang melarikan diri sebelum kontraknya habis. Apabila mereka tertangkap oleh pegawai-pegawai perusahaan yang dibantu oleh *opas-opas* (polisi)

Belanda, mereka dipukul. Kemudian mereka dipenjarakan di rumah penjara kolonial Belanda, tanpa diadili.

Perlakuan yang sewenang-wenang ini sangat melukai hati kaum nasionalis yang tergabung dalam Sarikat Islam. Di antara pekerja-pekerja batubara itu, terdapat juga kaum intelek dari Jawa yang bekerja sebagai inspektur polisi, perawat rumah sakit dan pekerja sebagai staf di kantor-kantor perusahaan itu. Karena selalu pulang balik ke Jawa sedikit banyaknya mereka mendengar dan menyaksikan sendiri gerakan kebangsaan yang menentang perbuatan yang sewenang-wenang dari pemerintah kolonial Belanda.

Anggota Sarikat Islam yang bekerja secara bawah tanah untuk menggembleng semangat perjuangan kebangsaan di Tanjung Redeb dan Teluk Bayur, akhirnya bisa mempengaruhi jiwa mereka.

Ketidak senangan dari para buruh itu pada tahun 1926 meningkat menjadi kemarahan dan keberanian. Mereka mengadakan pemogokan dan demonstrasi, tidak mau bekerja sebelum ada perbaikan jam bekerja dan upah yang wajar.

Di pertambangan batubara N.V. Steenkolen Mattschappy parapatan di Teluk Bayur, terjadi kerusuhan pada malam 6 dan 7 Nopember 1926. Kerusuhan itu baru dapat dipadamkan setelah pihak serdadu kolonial Belanda menembak dengan peluru tajam yang ditujukan kepada masyarakat yang berkerumun. Kerusuhan ini tidak ada hubungannya dengan politik.^{2 3}

Menurut saksi mata yang turut menyaksikan kerusuhan itu, selama dua hari dua malam itu pihak perusahaan tidak dapat menguasai keadaan, sehingga manager tambang batubara itu, meminta bantuan pemerintah Belanda untuk mendatangkan serdadu KNIL ke Teluk Bayur. Walau pun serdadu-serdadu Belanda itu mengancam akan menindak mereka dengan senjata, tetapi buruh-buruh itu melempari serdadu-serdadu itu dengan batu. Dengan kejamnya tentara Belanda itu

23. *Ibid*, hal. 104, 105

menembaki halayak ramai dengan peluru tajam. Berpuluh-puluh rakyat yang luka-luka dan tewas. Semua korban ini diangkut Belanda secara sembunyi-sembunyi dengan tidak diberitakan berapa jumlahnya.

Sebagai akibat kerusakan di perusahaan tambang batu-bara itu, Partai Sarikat Islam dilarang mengadakan kegiatan. Dengan dibekukannya Partai Sarikat Islam di kawasan daerah Berau, kaum nasionalis banyak bergerak di bawah tanah. Mereka tidak putus asa untuk tetap menggerakkan semangat rakyat berorganisasi. Mereka merubah siasatnya dan bergerak di bidang perbaikan dan perubahan masalah sosial. Mereka mengajak rakyat untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak sejalan dengan ajaran agama dan bertentangan hadis Nabi dan ajaran Al Qur'anul Karim.

Seorang tokoh Muhammadiyah dari Sumatera bernama Yahya Siregar dan Maksum dari Banjarmasin mendirikan Cabang Muhammadiyah dengan bantuan bekas tokoh Sarikat Islam seperti Haji Abdullah, Kadhi Sambaliung, Haji Datu Raja menteri kerajaan Sambaliung, A.R. Perwira kepala SDN Sambaliung, A.R. Suparta seorang Anemar/pedagang, Soetomo pensiunan Kepala District Tanjung Redeb, Penghulu Anang Kuyak Teluk Bayur. Pada tahun 1928 mereka mendirikan sekolah Muhammadiyah dan HIS Partikuler di Tanjung Redeb.

Dengan didirikannya cabang-cabang organisasi Muhammadiyah di Banjarmasin, dan di Amuntai maka gerakan modernisasi Islam memasuki daerah ini, didirikan cabang-cabang di Banjarmasin, Martapura (Riam Kanan), Kandangan Alabio, Rantau, Kuala Kapuas, Sampit, Samarinda, Tanjung Redeb, Balikpapan.²⁴

Pemuka-pemuka aliran tua mendirikan Nahdatul Ulama dan mengadakan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama. Gedung dan sekolahnya dibangun di jalan Tanjung Redeb.

24. *Ibid*, halaman 105

Mereka yang beraliran maju mendirikan sekolah HIS. Partikuler di antara alumninya meneruskan di Mulo di Malang dan seorang lulus *Rechts hooge School* di Betawi (Jakarta). Beberapa orang diantaranya meneruskan di sekolah perguruan di Makasar.

Demikianlah rakyat Berau, membentuk dan memajukan pemuda-pemuda mereka, sebagai kader perjuangan untuk merubah keadaan alam penjajahan kolonial, di daerah Berau. Lulusan yang mendapat didikan barat inilah kemudian mengadakan perlawanan dengan gerakan di bawah tanah melawan pemerintah Jepang.

G. PERLAWANAN TERHADAP PEMERINTAH JEPANG (1942 – 1945)

Setelah lapangan udara tentara Belanda di Tarakan dan di Samarinda II (Melak) dapat dihancurkan Angkatan Udara tentara Jepang, pada bulan Januari 1942 tambang minyak pulau Tarakan diduduki Angkatan Laut Jepang. Kemudian kota tanjung Selor dan Tanjung Redeb, jatuh pula ke tangan mereka. Berturut-turut daerah-daerah lain di Indonesia bagian Timur satu demi satu dapat diduduki Angkatan Laut kerajaan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda bertekuk lutut menyerah tanpa syarat kepada angkatan perang Jepang di Kali Jati Bandung. Seluruh Indonesia secara resmi mengakui kekuasaan angkatan perang Jepang.

Seperti di tempat-tempat lain, rakyat kecil memuji-muji angkatan perang Jepang yang telah mengalahkan tentara Belanda dengan sekutu-kutunya Inggeris dan Amerika di Asia Timur Raya termasuk Indonesia. Mereka menyambut dengan gembira, bangsa Jepang dianggapnya sebagai juru selamat yang membebaskan rakyat Indonesia dari Belenggu penjajahan dan akan membawa rakyat ke pintu kemakmuran dan kebahagiaan. Rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan selama penjajahan Belanda menginginkan perubahan kehidupan yang makmur dan bahagia. Pada pikiran mereka pemerintah Jepang

akan mengirimkan barang-barang melimpah ruah dengan harga yang murah.

Pada mulanya tentara Jepang bersikap simpatik pada rakyat. Di mana-mana mereka giat berpropaganda: kemenangan pasti dipihak Angkatan Perang Jepang *Teikuku*. Tetapi kenyataan adalah sebaliknya. Baru setahun lebih Berau diduduki tentara Jepang, barang-barang keperluan hidup sehari-hari di toko-toko kian menipis, akhirnya kosong sama sekali. Kapal-kapal yang membawa barang dagangan dari Samarinda, Donggala, Makasar dan Surabaya dapat dikatakan tidak datang lagi. Semua kapal-kapal KPM (satu-satunya maskapai pelayaran Belanda yang memegang monopoli pelayaran di Indonesia pada jaman penjajahan) telah mengalihkan pelayarannya ke luar negeri.

Angkatan Perang Jepang tidak mempunyai kesempatan memikirkan keperluan rakyat. Mereka sedang berperang sehingga harus memusatkan pikiran dan mengarahkan segala kekuatannya untuk menghadapi Angkatan Perang sekutu. Kabupaten Berau bukan daerah yang bisa berswasembada. Makanan terutama beras, gula dan lain-lain, harus didatangkan dari daerah yang lain. Hasil hutan seperti damar, tengkawang, rotan kayu dan lain-lain tidak laku lagi, karena pedagang-pedagang hasil hutan antar pulau telah menghentikan kegiatannya. Pengumpul hasil hutan dan pedagang mengalihkan kegiatannya pada bertani dan berkebun.

Blokade Sekutu semakin hebat, pada akhir tahun 1943 laut Sulawesi dan Selat Makasar sepenuhnya dikuasai oleh Angkatan Laut Sekutu kembali. Kapal selam Amerika sekali-sekali muncul di permukaan selat Makasar dekat Tanjung Mangkalihat wilayah Berau. Hubungan Berau dengan daerah lain dapat dikatakan terputus sama sekali. Kapal-kapal Jepang banyak yang ditenggelamkan Sekutu, baik oleh kapal selam maupun oleh Angkatan Udara Sekutu. Armada Jepang menjadi lumpuh, hanya perahu kumpit suku Bajau dan perahu layar

suku Bugis yang berani berlayar yang menghubungkan Sulawesi dan Kalimantan, membawa makanan ke Berau.

Bukan saja rakyat, tetapi tentara Jepang mengalami kekurangan makanan. Karena menghadapi kesukaran itu, tentara Jepang mulau memaksa rakyat menjual kebutuhan pokok seperti padi, ayam, telur ayam dan minyak makan dengan wang kertas Jepang yang tiada berharga di mata rakyat.

Mereka membentuk suatu badan yang bernama *Yakaten*, yang mengumpulkan makanan untuk keperluan tentara Jepang, dan sebagian dibagikan kepada rakyat dengan memakai kupon. Siapa yang berani menentang peraturan ini, dengan tidak menjual padi atau keperluan lain yang ditentukan oleh Jepang, dicap anti Jepang, dan diancam hukuman mati.

Sebagai kepala pemerintahan sipil diangkat seorang Kanrikang sebagai ganti kontrolir di jaman penjajahan Belanda. Pegawai-pegawai sipil Indonesia di jaman Belanda masih dipergunakan. Kedua sultan Gunung Tabur dan Sambaliung dengan pegawai-pegawainya masih dipakai Jepang, tetapi kedua pembesar Indonesia ini, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sultan Gunung Tabur dibantu oleh dua orang asisten wedana, yaitu asisten wedana Gunung Tabur dan asisten wedana Pulau Derawan. Sultan Sambaliung dibantu oleh asisten wedana Sambaliung dan asisten wedana Talisayan.

Pemuda-pemuda dan pegawai-pegawai diwajibkan masuk *seinendan*, suatu organisasi yang bersiat semi kemiliteran. Mereka diajar baris berbaris secara serdadu Jepang. Pemuda-pemudi dipaksa masuk organisasi yang bernama *Fujingikai* yang bertujuan membantu Jepang di garis belakang. Wanita-wanita muda yang turun temurun hidup mewarisi adat tradisi, dipaksa menjadi ke Jepang-jepangan, sehingga rakyat tidak senang. Selain dari perantaraan *Yakaten*, kepada lurah-lurah, diinstruksikan juga untuk mengumpulkan padi rakyat, kadang-kadang tanpa dibayar. Karena keadaan ekonomi yang sudah

sulit, ditambah pula kewajiban untuk menyerahkan padi kepada Jepang, rakyat semakin susah dan melarat.

Rakyat tidak berani mengadakan perlawanan sebab, bila satu atau dua orang warga kampung yang membangkang dan mempelopori mengadakan perlawanan, maka seluruh kampung akan dibumi hanguskan, semua penduduknya akan menjadi korban termasuk yang tiada berdosa. *Kempetai* (dinas rahasia Jepang) dibantu oleh *jumpon-jumponya* (polisi rahasia Indonesia) yang bekerja untuk Jepang, selalu siap mencari berita dan mengawasi sikap rakyat yang berani menentang kebijaksanaan pemerintah Jepang. Bahkan yang berani mencela dan mengejek Jepang akan ditangkap dan dibunuh. Di antara kaki tangan Jepang yang terkenal banyak memfitnah rakyat Berau ialah Raden Sukarna dan seorang jumpon yang bernama di Garuda. Setelah Jepang menyerah jumpon yang bernama si Garuda ini ditangkap dan dibunuh rakyat.

Kaki tangan Jepang inilah yang menggembor-gemborkan semboyan "Tiga A" yaitu Jepang memimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia. *Nippon Teikoku, Dai Toa* pasti mencapai kemenangan terakhir dan akan menghancurkan musuh Asia, Inggeris, Belanda serta Amerika. Tetapi semboyan demikian tidak mempan lagi di hati rakyat. Perut yang lapar tidak akan kenyang dengan disuruh mengucapkan dan mende-ngarkan semboyan-semboyan kosong.

Sebagian dari golongan nasionalis yang terpelajar seperti Dr. Lukardi, Kepala Rumah Sakit Berau, Abidinsyah Asisten Wedana Sambaliung, Aji Berui Massuarno asisten wedana Talisayam, Haris Asisten Wedana Gunung Tabur Datu Said Agil putra dari sultan Sambaliung, Raden Katamsi, Ibrahim Effendi, Haji Aji Umar, Tan Kim Long berpendapat bahwa pemerintah sebagai rezim fascis, tidak mungkin akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, setinggi-tingginya akan memberikan pemerintahan otonomi, yang merupakan bagian dari Dai Toa.

Besar kemungkinan Dr. Lukardi mempunyai hubungan dengan gerakan bawah tanah di Banjarmasin yang dipimpin oleh Dr. Soesilo Kepala Inspektur Kesehatan Rakyat Kalimantan yang juga menjadi korban pembunuhan Jepang bersama pengikut-pengikutnya di daerah itu.

Haji-haji yang taat beribadat, sangat jengkel, terhadap tindak tanduk Jepang karena dipaksa menyembah bendera Jepang dan karena murid-murid setiap hari dipaksa menghormati bendera di sekolah-sekolah.

Setelah kaum nasionalis di Banjarmasin ditangkap Jepang dan dibunuh secara massal, diantaranya Dr. Susilo, lalu menyusul pembunuhan massal di Pontianak. Tibalah gilirannya penangkapan besar-besaran di Tanjung Redeb, dan Sambaliung, dan di Gunung Tabur. Mereka yang ditangkap adalah Dr. Lukardi sekeluarga, Abidinsyah Asisten Wedana Sambaliung, Haris Asisten Wedana Gunung Tabur, Datu Said Agil putra Sultan Sambaliung, Haji Aji Umar, Raden Katamsi, Ibrahim Effendi, Tan Kim Long, Po Beh Wat, Aji Mamai, Abd. Manan, Abd. Manap, Usman Anang Kocot dan lain-lain.

Pada akhir tahun 1944 tiba sebuah kapal perang Jepang di Talisayan, untuk menangkap Asisten Wedana Aji Berni Masuarno dengan warga di kampung Biduk-biduk. Labuan Kelembu, Kelindakan, antara lain tokoh-tokoh masyarakat Wa Burhan, Kaldak Nanang dengan pengikut-pengikutnya sebanyak 45 orang. Mereka dicurigai selain mempunyai hubungan dengan gerakan bawah tanah pimpinan Dr. Lukardi dengan kawan-kawan juga didakwa mempunyai hubungan dengan kapal selam Sekutu di Tanjung Mangkalihat, semuanya dibawa ke Balikpapan.

Beberapa minggu kemudian datang pula sebuah kapal perang untuk melakukan penangkapan. Kali ini sekitar 15 orang dan dibawa ke Balikpapan.

Ketiga kalinya dikirim pula sebuah kapal perang Jepang, tetapi kapal ini tidak sempat melakukan penangkapan karena

ditenggelamkan Angkatan Udara Sekutu di Tanjung Mangkalihat.

Pada bulan Mei 1945 Angkatan Perang Sekutu menduduki kota minyak Tarakan. Beberapa orang Berau, berkata : "Bilamana rakyat di Berau ini, memakan susu mentega seperti rakyat Tarakan."

Pembicaraan ini disampaikan oleh jumbo-jumbo tentara Jepang. Seorang haji bernama Debab dengan kawan-kawannya ditangkap *Kempitai* dengan tanpa diadili, dibunuh oleh tentara Jepang. Semakin mendekati akhir kekalahannya *Kempetai* Jepang semakin ganas menangkapi rakyat. Rakyat ditangkap dan dibunuh tanpa diadili.

1. Perlawanan di Kampung Biduk-biduk Kecamatan Talisayan

Setelah penangkapan secara massal di kecamatan Talisayan, rakyat menunggu kesempatan yang baik untuk melaksanakan pembalasan. Ketika mendekati akhir kekalahannya, Jepang pada bulan Juli dan Agustus 1945, oleh penduduk kampung Biduk-biduk mengundang tentara Jepang yang menjaga pos di kampung itu, untuk selamatan. Mereka menyediakan nyiur muda yang menjadi kegemaran orang Jepang. Sedang asyik meminum nyiur muda orang-orang Jepang itu diserang diantaranya tiga orang tentara Jepang tewas.

Perlawanan seperti ini dilakukan juga oleh penduduk Bulalung di kecamatan Tanjung Batu (Derawan).

2. Perlawanan di Kampung Talassau Kecamatan Gunung Tabur

Selain bertindak sendiri, tentara Jepang mempergunakan juga polisi rahasia Indonesia yang disebut jumbo-jumbo dengan pemimpinnya Raden Sukarna, Garuda dan lain-lain. Beberapa orang mengambil kesempatan keuntungan pribadi dan lurah-lurah yang teperdaya propaganda Jepang dan kaki tangannya.

Seorang lurah di kampung Tanjung Baru dengan beberapa warga kampungnya yang dapat dipengaruhi para jumpo, diperintah Jepang untuk mengumpulkan padi, ayam, telur, rakyat di kampung-kampung, di Kampung Sukan Lurah tersebut melakukan perampasan dan pembakaran rumah yang ditinggalkan penduduknya, karena takut pada tentara Jepang dan jumpo-jumponya.

Ketika lurah Tanjung Baru itu hendak melakukan perampasan terhadap makanan rakyat di kampung Talassau, rakyat dengan dipimpin oleh Raden Nata mengadakan perlawanan, sehingga lurah itu dengan 5 orang anak buahnya mati dibunuh oleh rakyat. Yang lain sempat melarikan diri ke Tanjung Redeb. Jepang dengan jumpo-jumponya tidak berani melakukan pembalasan.

3. Akhir masa Jepang

Setelah tentara Jepang meninggalkan Berau, menuju ke Kutai melalui Muara Lesan di udik sungai Kelay Sambaliung, jumpo-jumpo polisi rahasia dan kaki tangan Jepang ditangkap dan diadili rakyat. Seorang jumpo bernama Garuda ditangkap dan dibunuh rakyat. Raden Sukarna melarikan diri, sampai sekarang tidak diketahui ke mana perginya. Beberapa orang tokoh yang mendapat kedudukan yang baik pada waktu pemerintahan Jepang, ditangkap dan ditahan di Tarakan.

Korban kekejaman tentara Jepang di Berau tercatat antara 500 sampai 600 orang. Tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh masyarakat yang menjadi korban ialah:

1. Dr. Lukardi dan keluarga.
2. Datu Said Agil putra sultan Sambaliung.
3. Abidinsyah asisten wedana Sambaliung.
4. Aji Berni Massuarno asisten wrdana Talisayan.
5. Haris asisten wedana Gunung Tabur.
6. Raden Katamsi kepala perawat Rumah sakit Berau.
7. Haji Aji Umar Gunung Tabur.
8. Ibrahim Effendi Menter Kehutanan Tanjung Redeb.

9. Haji Debab Tanjung Redeb.
10. Tan Kim Long Tanjung Redeb.
11. M. Yunan Tanjung Redeb.
12. Abdul Manan Tanjung Redeb.
13. Matsheh Klerk Tanjung Redeb.
14. Po Beh Wat Tanjung Redeb.
15. Aji Mamai bin Aji Kuning.
16. Anang Kocot.
17. Abdul Manap Tanjung Redeb.

BAB V

P E N U T U P

Perlawanan rakyat Kalimantan Timur adalah reaksi terhadap politik Belanda yang berusaha dengan kekerasan militer untuk menyatukan wilayah jajahannya. Reaksi terhadap politik Belanda ini, dimulai pada abad ke-XVII sampai abad ke-XX. Seluruh kerajaan di Kalimantan Timur bangkit melawan usaha yang dilancarkan oleh Belanda.

Perlawanan rakyat Kalimantan Timur merupakan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia, baik di pulau Jawa, Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Lombok dan daerah-daerah lainnya, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu menentang imperialisme Belanda. Cara perlawanan pada beberapa daerah berbeda-beda, dalam perjuangannya menentang penjajahan di bumi Indonesia. Tetapi hakekat dari perlawanan adalah sama yaitu jiwa patriotik dalam menentang imperialisme dan kolonialisme.

Pengertian nasional didasari adanya rasa kesatuan dan prinsip yang sama dalam menentang penjajahan.

Pengaruh pergerakan nasional yang timbul di pulau Jawa, juga sampai ke pelosok Kalimantan Timur dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat politik, mau pun yang bersifat sosial seperti Partai Sarikat Islam, PARINDRA, GERINDO, Muhammadiyah, NU, begitu cepat mendapat tempat di hati rakyat di Kalimantan Timur.—

DAFTAR BACAAN

1. Abdurahman A.R., *Aji Nyesei Pangeran Raja Muda Kerajaan Pasir*, Catatan Sejarah Kerajaan Pasir, koleksi Mohd. Noor ex Asisten Perw. Dep. P dan K. Prop. Kaltim di Samarinda.
2. Aji Bambang Abdurrahman, *Sedikit Catatan Sejarah Kutai*.
3. Endo Harjasoewita, *Sejarah Indonesia jilid III*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
4. Eisenberger Dr.J., *Kroniek Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*, Banjarmasin 1936, halaman 3.
5. Hageman Joz J., *Aanteekeningen omtrent een gedeelte van der Oostkust van Borneo.*, Tijdschrift Indische Taal en Land Volkenkunde deel 4, 1885.
6. I Kiranan Ranreng Daeng Risompa, *Catatan Sejarah Ringkas Kedatangan orang Bugis di Samarinda*, koleksi Mohd. Noor ex Asisten Perw. P dan K. Prop. Kaltim di Samarinda.
7. Krom J.S., *Memorie Overgave dan Overname*, Ktr. Controleur Tajnugredeh Kaltim., 1940.
8. Krom J.S., *Achmad Maulana Sultan Tabur, Muhammad Aminuddin Sultan Sabaliung cs.*, Silsilah Kerajaan Berau, killeksi Mohd. Noor ex Asisten Perwakilan Dep. P dan K. Prop. Kaltim di Samarinda.
9. Mees Dr. C.A., *Kroniek van Koetei*, N.V. Uitgeverij/ Mees H.C.A., Santpoort.
10. Muhammad Tayeb E., *Silsilah Kerajaan Kutai Kertanegara Kraton Kutai 1284 H.*
11. Proyek Peneilitan dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Kaltim*, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen P dan K, 1978.

12. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Sumatera Barat*, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Dep. P dan K 1978.
13. *Terjemahan Lontara Kedatangan Suku Bugis di Samarinda*, oleh I Kirana Kapitan Renreng Daeng Risompa, koleksi Mohd. Noor ex Asisten Perw. Dep. P dan K, Bidang Kebudayaan Propinsi Kaltim di Samarinda.
14. S.C. Knappert, *Beschrijving van de Onderafdeeling van Koetei*, Martinus Nijhoff, Gravenhage 1905.
15. Von de Wall, *Aanteekeningen Omtrent de Noordoostkust van Borneo*, Tijdschrift Bataviaasche Genootschap (T.B.G.) deel 4.
16. Weddik A.L., *Beknopl Overzicht van Het Rijk van Koetei*, Indische Archief, 1 ste jaargang deel 1, 1849.

